

PEDOMAN PENINGKATAN KOMPETENSI SMK DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DAN KAWASAN EKONOMI INDUSTRI

PEDOMAN PENINGKATAN KOMPETENSI SMK DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DAN KAWASAN EKONOMI INDUSTRI

Buku ini berisikan laporan akhir dari dua kerja besar. Pertama adalah yang memotret secara menyeluruh perkembangan dan pertumbuhan kawasan industri dalam kaitan dengan program kemitraan (partnership) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan KEK dan KEI, termasuk di dalamnya upaya-upaya yang mesti disiapkan oleh pihak SMK dalam meningkatkan kompetensi. Riset ini dilakukan di dua wilayah (lokasi penelitian) yang merupakan representasi dari KEK dan KEI, yaitu di Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung dan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Sebagai kerja besar kedua, riset tersebut juga diikuti oleh focus group discussion (FGD) untuk membuat Pedoman Peningkatan Kompetensi SMK di KEK dan KEI. Sebagaimana disebutkan dalam buku ini, FGD ini dilaksanakan dengan mengundang peserta dengan beragam latarbelakang, dari mulai pihak sekolah (SMK), pengguna lulusan, perwakilan dari pemerintah daerah, ahli pendidikan, termasuk perwakilan dari Direktorat Pembinaan SMK.

**SUARA
MUHAMMADIYAH**
Melayani Ilmu dan Amal



Direktori Pembinaan
Sekolah Menengah Kejuruan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jakarta

ISBN : 978-602-6268-79-2



TIM PENULIS:

DR. MA'MUN MUROD, M.Si.

DR. RETNOWATI WD. TUTI, M.Si.

DR. ENDANG SULASTRI, M.Si.

DR. USNI, M.Si.

DR. KURNIASIH MUFIDAYANTI, M.Si.

DR. SA'DIYAH EL-ADAWIYAH

DJONI GUNANTO, M.Si.

SUARA MUHAMMADIYAH

- Soeharto, Bohar. 1991. *Perencanaan Sosial Kasus Pendekatan*. Bandung: Armico
- Suryadi, Ace dan H.A.R. Tilaar. 1993. *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar*. Bandung: Rosdakarya
- Tilaar, H.A.R. 1999. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Rosdakarya. Cet IV
- Usman, Husaini. 2006. *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara

Internet

- <https://pangkalpinangkota.bps.go.id/pressrelease/2018/11/06/227/menurut-persepsi-konsumen--kondisi-ekonomi-kondisi-kepulauan-bangka-belitung-triwulan-iii-2018-menurun.html>
- <http://www.pangkalpinangkota.go.id/pariwisata/>

PEDOMAN PENINGKATAN KOMPETENSI SMK DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DAN KAWASAN EKONOMI INDUSTRI

TIM PENULIS:

DR. MA'MUN MUROD, M.Si.
DR. RETNOWATI WD. TUTI, M.Si.
DR. ENDANG SULASTRI, M.Si.
DR. USNI, M.Si.
DR. KURNIASIH MUFIDAYANTI, M.Si.
DR. SA'DIYAH EL-ADAWIYAH
DJONI GUNANTO, M.Si.

Daftar Pustaka

Buku

- Anshori, Nunung Isa. 1992. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Bumi Ankasa
- Cammings, Williams. *Studi Pendidikan dan Tenaga Kerja pada Beberapa Industri Besar di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian BP3K
- Enoch, Jusuf. 1992. *Dasar-dasar Perencanaan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hasibuan, Sayuti. 1987. *Changing Manpower Requirements in The Face of Non-Oil Growth*
- Indar, Djumberansyah. 1995. *Perencanaan Pendidikan Strategi dan Implementasinya*. Surabaya: Karya Aditama
- Labor Force Growth and Fast Tehnological Change. Jakarta: Bappenas
- Limongan, Andreas. *Masalah Pengangguran di Indonesia*. Diakses Tanggal 07 Januari 2008
- Sa'ud, Udin Syaefudin dan Abin Syamsuddin Makmun, 2006. *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Cet II
- Sindhunata (ed), 2001. *Pendidikan Kegelisahan Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Kanisius
- Sindhunata (ed). 2000. *Menggegas Paradigma Baru Pendidikan: Demokrasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*. Yogyakarta: Kanisius

Pengantar Direktur Pembinaan SMK Kemdikbud

Alhamdulillah, meskipun sedikit terlambat, penulisan laporan akhir riset Peningkatan Kompetensi SMK di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Ekonomi Industri (KEI) berhasil diselesaikan. Laporan akhir ini sebenarnya merupakan penggabungan dari dua kerja besar. Pertama, memotret secara menyeluruh perkembangan dan pertumbuhan kawasan industri dalam kaitan dengan program kemitraan (*partnership*) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan KEK dan KEI, termasuk di dalamnya upaya-upaya yang mesti disiapkan oleh pihak SMK dalam meningkatkan kompetensi.

Sebagai upaya memotret secara menyeluruh, maka riset ini mengambil dua wilayah (lokasi penelitian) yang merupakan representasi dari KEK dan KEI, yaitu di Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung dan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Riset ini menghasilkan beberapa temuan yang mendesak untuk ditindaklanjuti lewat pembuatan kebijakan-kebijakan yang setidaknya dapat memperkuat *positioning* SMK, terutama dalam upaya menjalin kemitraan dengan KEK dan KEI, sehingga ke

depannya diharapkan akan menjadikan lulusan SMK lebih mudah untuk bisa diterima di dunia kerja.

Hasil dari riset lapangan ini kemudian ditindaklanjuti dengan kerja besar kedua, yaitu dengan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) untuk membuat Pedoman Peningkatan Kompetensi SMK di KEK dan KEI. Sebagaimana disebutkan dalam laporan ini, FGD ini dilaksanakan dengan mengundang peserta dengan beragam latarbelakang, dari mulai pihak sekolah (SMK), pengguna lulusan, perwakilan dari pemerintah daerah, ahli pendidikan, termasuk perwakilan dari Direktorat Pembinaan SMK.

Kalau menilik laporan yang dibuat Tim Peneliti, penting rasanya untuk memperbanyak dan dibuat tersendiri dalam bentuk "Buku Pedoman Peningkatan Kompetensi Sekolah Menengah Kejuruan di Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Ekonomi Industri", yang kemudian dibagikan kepada pihak-pihak terkait, terutama pihak sekolah, para pengguna lulusan, dan pembuat kebijakan di bidang pariwisata.

Akhirnya, dengan selesainya pemuatan laporan akhir riset ini, saya merasa perlu untuk mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak. Yang pertama, tentu ucapan terima kasih kepada Tim Peneliti yang diketuai oleh Dr. Retnowati WD. Tuti beserta anggota tim lainnya. Kemudian terima kasih juga kepada pihak sekolah, para pengguna lulusan, dan pihak lainnya yang mendukung pelaksanaan riset ini. Semoga hasil riset ini bermanfaat. Sekian.

Direktur Pembinaan SMK Kemdikbud

Dr. Ir. M. Bakrun, MM.

1.8.4. Sinergi dengan Asosiasi Profesi

1. Asosiasi profesi, sesuai dengan tugas, wewenang, peran dan fungsinya, perlu menata diri yang mengarah pada eksistensinya sebagai Asosiasi Profesi Dosen dan Guru Vokasi, bersama-sama dengan SMK, pemerintah dan dunia usaha/dunia industri bersinergi melakukan peran dan fungsinya sesuai tugas dan Standarisasi Program Pendidikan Calon Guru dan Program Pendidikan Profesi Guru SMK,
2. Uji Kompetensi Guru dan calon Guru SMK
3. Pembinaan Guru Vokasi Profesional SMK
4. Menghasilkan pemikiran, konsep, model, program yang didasarkan pada penelitian di berbagai aspek pendidikan vokasi baik pada program pendidikan profesi guru, pembinaan guru dan proses pendidikan di SMK.
5. Merangsang munculnya keunggulan kompetitif yang dinamis melalui pendidikan dan pelatihan yang memiliki akar yang kuat dan landasan yang benar-benar visioner dan missioner.

Wewenangnya, yaitu, melaksanakan kerjasama kolaborasi yang sinergi ini yakni antara SMK, pemerintah pusat, di mana empat kementerian terkait secara teknis, Kemendikbud; Kemenristekdikti; Kemenperin dan Kemennaker, BNSP dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan satuan kerja perangkat daerah yang terkait), asosiasi profesi dan dunia usaha/dunia industri harus berujung pada dihasilkannya "Lulusan SMK yang Terstandar" sebagai manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. •

pelaksanaan pendidikan, dan peningkatan efektivitas external (relevansi) sekolah menengah kejuruan. Pada perkembangan prosesnya wakil dunia kerja akan menjadi unsur dalam "Badan Penasehat Sekolah" (Advisory Board).

Untuk mencapai hubungan kerjasama yang erat antara sekolah dengan dunia kerja diperlukan waktu dan tenaga khusus yang menangani hal tersebut. Keberhasilan sekolah dalam membina kerjasama yang baik dengan dunia kerja tidak diperoleh dari satu atau dua kali pendekatan saja, melainkan diperlukan pendekatan yang berulang kali.

Kegiatan validasi kurikulum, praktek kerja industri (prakerin) bagi siswa, program Bimbingan Karier, dan Unit Produksi dapat pula merupakan kegiatan yang akan membuka jalan menuju kerjasama yang lebih luas antara sekolah dan dunia kerja. Penempatan siswa SMK "on the job training di dunia usaha/dunia industri", secara konseptual SMK dan dunia usaha melakukan perencanaan bersama, dalam arti penempatan siswa SMK memenuhi kriteria akademik dan sinkron dengan "job" yang ada pada dunia usaha/dunia industri. Kegiatan ini akhirnya bermuara pada siswa dapat bekerja pada lini produksi (production line) sehingga segala peraturan yang diberlakukan pada dunia usaha/dunia industri terhadap karyawan juga diberlakukan sama kepada siswa yang melakukan praktik kerja industri (prakerin). Kalau konsep kerjasama ini dapat dilaksanakan secara sistematis dan sistemik, akan terjadi kemitraan sinergik antara dunia usaha/dunia industri mendapatkan tenaga kerja murah", di sisi lain siswa SMK akan mendapatkan pengalaman kerja langsung tidak lagi bersifat simulasi.

Dalam membangun kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri mesti direalisasikan dalam sebuah Memorandum of Understanding (MOU) dan Standart Operating Procedure (SOP). Prosedur kerjasama untuk kegiatan praktek kerja industri (Prakerin) dimulai pada awal tahun dengan tahap perencanaan dan persiapan, dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan Prakerin, kemudian tahap evaluasi Prakerin.

Daftar Isi

PENGANTAR DIREKTUR PEMBINAAN SMK KEMDIKBUD— v DAFTAR ISI— vii

- 1.1. Pendahuluan — 1
- 1.2. Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan — 3
 - 1.2.1. Muatan Kurikulum Mengandung Unsur Moral dalam Teori dan Praktek — 3
 - 1.2.2. Kesesuaian Kurikulum dengan Regulasi dan Kebutuhan DUDI — 8
- 1.3. *Link and Match* Sekolah Menengah Kejuruan— 12
 - 1.3.1. Adaptasi Konsep Pembelajaran SMK dengan DUDI — 12
 - 1.3.2. Konsep Teaching Factory Memberikan Ruang dan Peluang bagi Siswa untuk Lebih Berkreasi — 16
- 1.4. Metode Pembelajaran— 17
 - 1.4.1. Pemahaman TIK Pembelajaran terdiri dari proses belajar mengajar— 20
 - 1.4.2. Pendidikan kejuruan — 22

- 1.5. **Kriteria Tempat Magang – 23**
 - 1.5.1. Program Pemagangan – 24
 - 1.5.2. Sarana dan Prasarana Pemagangan – 24
 - 1.5.3. Pembimbing Pemagangan – 25
- 1.6. **Praktek Kerja – 25**
 - 1.6.1. Data primer – 27
 - 1.6.2. Data Sekunder – 27
- 1.7. **Pemagangan Pra dan Pasca Kelulusan – 30**
 - 1.7.1. Pemagangan Pra Kelulusan – 30
 - 1.7.2. Program Pemagangan Pasca Kelulusan – 34
- 1.8. **Sinergi Sekolah, Pemerintah, Dunia Usaha, dan Asosiasi Profesi – 34**
 - 1.8.1. Sinergi Dengan Pemerintah – 34
 - 1.8.2. Sinergi dengan DUDI – 36
 - 1.8.3. Pemilihan calon siswa – 37
 - 1.8.4. Sinergi dengan Asosiasi Profesi – 39

DAFTAR PUSTAKA – 41

pihak industri telah mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimiliki para lulusan dari sekolah yang telah menjalin kerjasama dengan industri yang bersangkutan.

Kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri dapat dikembangkan sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah. Peranan kerjasama dengan dunia industri akan menjadi penting artinya karena kerjasama tersebut akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sekolah menengah kejuruan (SMK).

Hubungan kerjasama antara sekolah dan dunia kerja dapat meliputi:

1. Output sekolah menengah kejuruan, yakni penempatan/ penyerapan lulusan kedalam lapangan kerja secara semestinya.
2. Proses pelaksanaan proses belajar mengajar dan evaluasi performasi: pada gilirannya dapat mengarah pada sertifikasi keahlian.
3. Input Instrumental, yang meliputi.
 - a. Pemanfaatan sumber-sumber belajar, misalnya sarana peralatan praktek, bengkel/shop, lahan pertanian (field laboratory), dapur produksi, dsb.
 - b. Penyandangan bersama dana pendidikan
 - c. "Saling-asah" personil (antara guru/sekolah dan teknisi/ industri)
 - d. Keterlibatan dalam semua aspek pelaksanaan Prakerin, seperti perencanaan dan evaluasi Prakerin, hal ini agar pelaksanaan Prakerin SMK berhasil. Dengan turut terlibat dalam perencanaan dan evaluasi Prakerin DUDI dapat menyeleksi lebih awal calon tenaga kerja yang mereka butuhkan dan memberikan masukan secara langsung tentang pelaksanaan Prakerin.
 - e. Pelatihan Bagi Tenaga Pendidik (guru SMK)
4. Input Siswa.

1.8.3 **Pemilihan calon siswa**

Kesemuanya pada dasarnya adalah upaya untuk pemutakhiran kemahiran (guru maupun siswa), transformasi teknologi, efisiensi

6. Pemanfaatan potensi yang ada di masyarakat, dunia usaha dan dunia industri untuk peningkatan kualitas pendidikan.
7. Optimalisasi utilitas SMK di luar jam belajar mengajar untuk pemberdayaan masyarakat sekitar SMK:
 - a. Pembangunan karakteristik pendidikan kejuruan model pasar (the market model. Model pasar yakni di mana pemerintah tidak terlibat dalam proses kualifikasi kejuruan, tapi diberikan kepada dunia usaha atau dunia industri.
 - b. Koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud melalui Dirjen Pembinaan SMK dan pemerintah Provinsi serta SKPD yang sesuai dengan jurusan yang ada di SMK, dalam penyaluran siswa magang maupun praktek kerja industri (Prakerin).
 - c. Pola Koordinasi intensif antara beberapa kementerian terkait.
 - d. Sinkronisasi Kurikulum.
 - e. Penataan bidang/program keahlian sebagai upaya penyesuaian bidang dan program keahlian yang ada di seluruh SMK agar sesuai dengan potensi wilayah atau kebutuhan pasar kerja.
 - f. Sistem diklat yang permeable dan fleksibel menempatkan SMK sebagai bagian integral dari sistem diklat di daerah dan kebijakan penataan kurikulum disesuaikan potensi wilayah/daerah.

1.8.2. Sinergi dengan DUDI

Kerjasama antara SMK dan dunia usaha atau dunia industri sangat diperlukan terkait dengan perkembangan teknologi yang terjadi di industri yang sangat pesat sehingga sekolah akan jauh tertinggal jika tidak menjalin kerjasama dengan industri, sebab pihak sekolah tidak mungkin menyediakan semua peralatan yang sesuai dengan kebutuhan industri dalam proses pembelajaran di sekolah. Di samping itu, kerjasama dengan industri juga akan membantu pihak sekolah dalam menyalurkan lulusannya sebab

1.1. Pendahuluan

Dunia pendidikan memiliki peran sentral dalam perkembangan kemajuan negara Indonesia. Seiring dengan berbagai perkembangan jaman, dunia pendidikan di Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan dan kekurangan. Hal ini dapat diukur dari kurang atau rendahnya kompetensi lulusan berbagai keahlian di sekolah, terutama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan dunia kerja. Hasil penelitian yang kami lakukan, menunjukkan perkembangan dunia pendidikan selalu lebih lambat dari perkembangan dunia industri. Kondisi tersebut, dikhawatirkan lulusan SMK mengalami kesulitan dalam menyesuaikan dengan lapangan kerja dan industri.

Gambaran tentang kualitas lulusan pendidikan kejuruan merupakan suatu ukuran ganda, yaitu kualitas menurut ukuran sekolah (*in-school succes standarts*) dan kualitas menurut ukuran masyarakat (*out-of school succes standarts*). Kriteria pertama meliputi aspek keberhasilan peserta didik dalam memenuhi tuntutan kurikulum yang telah diorientasikan pada tuntutan dunia kerja. Sedangkan kriteria kedua meliputi keberhasilan peserta didik yang tertampilkan pada kemampuan untuk kerja sesuai dengan standart hasil belajar nasional ataupun internasional setelah mereka berada di lapangan kerja sebenarnya.

Upaya untuk mencapai kualitas pendidikan kejuruan yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industry (DUDI), perlu dibarengi dengan kurikulum yang rancang dan dikembangkan dengan prinsip kesesuaian dengan kebutuhan *stakeholders*. Kurikulum

pendidikan kejuruan secara spesifik memiliki karakter yang mengarah pada pembentukan kecakapan peserta didik berkaitan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan tertentu. Kecakapan tersebut telah diakomodasi dalam kurikulum SMK yang meliputi kelompok mata pelajaran normatif, adaptif, dan produktif.

Sinergi antara dunia pendidikan dengan dunia industri serta *stakeholders* di masyarakat sangat dibutuhkan. Pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan di sekolah perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan harapan pendidikan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik dari sisi pengetahuan maupun penyelesaian masalah kontekstual yang dihadapi sehari-hari.

Selama ini pembelajaran belum bisa memenuhi semua tuntutan masyarakat, terutama bidang keterampilan hidup sesuai kondisi lokal hidup peserta didik. Materi pembelajaran seringkali tidak sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Konsekuensinya, setelah lulus sekolah peserta didik tidak bisa langsung menerapkan teori yang didapatkan dari sekolah.

Fenomena yang terjadi, antara dunia pendidikan dan perkembangan masyarakat tidak sesuai dan terjadi kesenjangan yang cukup signifikan. Kebutuhan masyarakat belum bisa diwujudkan sepenuhnya oleh lembaga pendidikan. Di antara indikator masalah ini adalah lulusan lembaga pendidikan belum siap pakai karena hanya menguasai teori, sementara miskin keterampilan. Dunia industri pun akhirnya meninggalkan sekolah karena tidak ada *linkage*. Selain itu juga disebabkan materi pembelajaran tidak sesuai potensi daerah di mana peserta didik bertempat tinggal. Materi pembelajaran dan konteks kehidupan peserta didik tidak padu, sehingga tidak terjadi transfer pembelajaran dalam kehidupan peserta tidak terjadi. Mengacu pada indikasi tersebut, maka peluang kerja bagi lulusan SMK pada dasarnya belum begitu menggembirakan.

Sesuai dengan tujuan pendidikan SMK, yaitu membekali peserta didik dengan keterampilan tertentu untuk memasuki dunia kerja atau dunia usaha, maka pengembangan SMK harus selalu mengacu

pengembangan keterampilan peserta didik untuk melaksanakan jenis pendidikan tertentu. SMK bertujuan untuk mempersiapkan siswa agar memiliki keterampilan dan siap terjun ke duniakerja. Penyiapan tenaga kerja harus sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Industri (DU/DI) dan ini harus menjadi pusat perhatian pendidikan kejuruan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dirumuskan kebijakan pengintergrasian aspek yang menumbuhkan jiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha dalam metodologi pendidikan. Lulusan Pendidikan Kejuruan diharapkan mempunyai 5 elemen kompetensi yang sesuai kebutuhan Pemangku Kepentingan :

1. Kebutuhan masyarakat (societal needs)
2. Kebutuhan dunia kerja (industrial needs)
3. Kebutuhan profesional (professional needs)
4. Kebutuhan generasi masa depan (vision)
5. Kebutuhan ilmu pengetahuan (scientific)

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu sinergi dengan pemerintah baik ditingkat pemerintah pusat maupun ditingkat pemerintah daerah yaitu perlu dirumuskan kebijakan mengenai :

1. Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis dengan dunia usaha dan dunia industri untuk peningkatan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
2. Optimalisasi pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk peningkatan dan pengembangan bidang pendidikan.
3. Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis dengan organisasi kemasyarakatan.
4. Membangun mekanisme kemitraan antara Direktorat Pembinaan SMK dan SMK dengan pelaku usaha untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan berkualitas.
5. Mendorong pihak swasta untuk membangun lembaga pendidikan dan pelatihan khususnya yang terkait dengan kebutuhan Sumber daya manusia khususnya yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia.

2. Work shop dan / atau
3. Laboratorium.

SMK harus dilengkapi dengan infrastruktur kompetensi, yang pembangunannya difasilitasi oleh kementerian industri. Infrastruktur dimaksud berupa :

1. SKKNI.
2. LSP.
3. TUK.
4. Assesor kompetensi.

SMK menyelenggarakan Sertifikasi melalui uji kompetensi terhadap siswanya. Uji kompetensi dilaksanakan oleh LSP di TUK yang dimiliki oleh SMK atau perusahaan industri dan atau perusahaan kawasan industri.

1.7.2. Program Pemagangan Pasca Kelulusan

Program Pemagangan Pasca kelulusan, keterangannya sama, yang membedakan pihak SMK tidak sepenuhnya mengawal dari mulai mendapatkan sampai selesai Program Pemagangan. Bedanya lagi, dari sisi usia juga syaratnya minimal 18 tahun. Pemagangan Pasca kelulusan bisa juga ke luar negeri. Program Pemagangan keluar negeri penyelenggara langsung ditangani oleh Kementerian Tenaga Kerja .

Pemagangan Pasca kelulusan mengenai uang saku juga lebih besar pendapatannya, karena pihak peserta Pemagangan sudah memenuhi syarat untuk bekerja, sehingga uang lemburpun bisa didapatkan. Uang insentif ditentukan antara 75% - 80% dari UMR.

1.8. Sinergi Sekolah, Pemerintah, Dunia Usaha, dan Asosiasi Profesi

1.8.1. Sinergi Dengan Pemerintah

Sekolah menengah kejuruan (SMK) merupakan jenjang pendidikan menengah kejuruan yang mengutamakan

pada kebutuhan pasar kerja. Namun pengembangan SMK bukan sekedar pada memperbesar jumlah unit SMK dan jumlah siswa, tetapi bagaimana keberadaan SMK jika dikaitkan dengan potensi wilayah daerah. Sudah menjadi masalah klasik bagi dunia pendidikan SMK di Indonesia pada umumnya, bahwa *link and match* antara output pendidikan SMK dengan DUDI sebagai pengguna output pendidikan SMK belum tercapai. Di antara kebutuhan tersebut, kebutuhan atau tuntutan dunia kerja/usaha/industri, dirasakan amat mendesak, maka prioritas *link and match* diberikan pada pemenuhan kebutuhan dunia kerja. Salah satu masalahnya terletak pada kualitas lulusan SMK yang belum selesai dengan standart kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri.

1.2. Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan

1.2.1. Muatan Kurikulum Mengandung Unsur Moral dalam Teori dan Praktek

Lulusan SMK dituntut tidak hanya memiliki *hard skill*, tetapi juga *soft skill*. *Hard skill* dapat dibentuk pada diri siswa melalui masing-masing bidang keahlian sesuai dengan jurusan yang diambilnya di SMK. Sementara *soft skill* merupakan keterampilan kepribadian yang terbentuk karena penanaman nilai-nilai kebajikan, moral atau dalam bahasa agama disebut dengan akhlak. Dalam bahasa kebijakan di era Pemerintah Jokowi sering disebutnya juga dengan "Pendidikan Karakter", yang telah diwacanakan sebagai solusi untuk membentuk kepribadian yang baik pada diri siswa.

Tujuan pendidikan karakter selaras dengan tujuan pendidikan nasional seperti tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, yang menyebutkan, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

Sementara isi Pendidikan Karakter adalah nilai dan keterampilan yang diberikan oleh pendidik dalam rangka membentuk karakter peserta didik. Isi Pendidikan Karakter berupa nilai-nilai yang perlu disampaikan oleh pendidik untuk membentuk karakter siswa adalah:

1. Tata tertib siswa di sekolah,
2. Tata tertib siswa di kelas,
3. Nilai-nilai kesopanan,
4. Nilai-nilai kebangsaan,
5. Nilai-nilai kejujuran,
6. Nilai-nilai kesabaran,
7. Nilai-nilai kemandirian.

Penguasaan *soft skill* sangat penting dalam perkembangan usia siswa. *Soft skill* lah yang akan membimbing lebih jauh karakter siswa ketika yang bersangkutan sudah masuk ke dalam DUDI. Ketika seseorang sudah memasuki dunia kerja, menguasai *hard skill* cenderung statis, terkecuali akan beradaptasi dengan kemunculan inovasi-inovasi baru terkait dengan perkembangan yang terkait dengan *hard skill*. Namun terkait dengan *soft skill* akan bersentuhan dan bersinggungan langsung dalam kehidupan sehari-hari di DUDI. Siswa akan bersentuhan dengan beragam manusia dengan segala tabiatnya, baik yang buruk, baik, maupun yang pertengahan (*muqtashid*), yang jujur maupun tidak jujur, yang sopan maupun tidak sopan, yang berintegritas maupun yang tanpa integritas. Menghadapi realitas ini, maka menjadi penting melakukan penguatan *soft skill* atau pendidikan karakter.

Materi pendidikan karakter mencakup pengertian, langkah-langkah, dan manfaat pendidikan karakter. Sebagai contoh untuk nilai-nilai kesopanan, maka cakupan materinya adalah pengertian kesopanan, langkah-langkah menjadi sopan, dan manfaat kesopanan.

Dalam rangka pembentukan karakter siswa yang tidak hanya memiliki *hard skill*, tapi juga *soft skill*, perlu adanya pengembangan metode pembelajaran yang mampu:

4. Memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja dan kematian kepada peserta pemagangan.
5. Memberi uang saku kepada peserta pemagangan.
6. Mengevaluasi peserta pemagangan.
7. Memberikan sertifikat.

Pada proses pemagangan antara SMK dengan Penyelenggara Pemagangan harus Link & Mach. Program keahlian pada SMK disesuaikan dengan kebutuhan industri. Kurikulum pendidikan pada setiap program keahlian di SMK disusun berbasis kompetensi mengacu pada :

1. SKKNI bidang industry.
2. Standart internasional dan atau
3. Standart khusus.

Penyusunan kurikulum dilakukan dengan melibatkan :

1. Assosiasi industry
2. Perusahaan industri dan atau
3. Perusahaan kawasan industri

SMK harus memiliki guru bidang studi produktif sesuai dengan kebutuhan program keahlian. SMK dapat memanfaatkan karyawan purna bhakti dari perusahaan industri dan atau perusahaan kawasan industri yang memiliki kesesuaian kompetensi sebagai guru bidang study produktif di SMK.

Karyawan purna bhakti harus mendapat pelatihan untuk pelatih (*training for trainer*) bidang kompetensi pedagogik. Pelatihan dapat difasilitasi oleh kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah. Peningkatan kompetensi guru bidang studi produktif dapat dilakukan melalui pemagangan industry. Pemagangan industri difasilitasi oleh perusahaan industri dan atau perusahaan kawasan industri.

Untuk menunjang praktikum pembelajaran berbasis kompetensi, SMK dilengkapi dengan :

1. Teaching factory.

Penyelenggaraan Pemagangan dilaksanakan atas dasar Perjanjian Pemagangan secara tertulis antara peserta pemagangan dengan perusahaan.

Perjanjian pemagangan memuat:

1. Hak dan kewajiban peserta pemagangan
2. Hak dan kewajiban penyelenggara pemagangan
3. Program pemagangan
4. Besarnya uang saku.

Perjanjian pemagangan harus diketahui dan disahkan oleh Dinas Tenaga kerja kabupaten/kota setempat. Pengesahan harus selesai dalam 3 hari. Peserta pemagangan berhak memperoleh :

1. fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan.
2. uang saku, yang meliputi biaya transport, uang makan, dan insentif peserta pemagangan
3. perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan dan kematian.
4. Sertifikat.

Peserta pemagangan berkewajiban

1. Mentaati perjanjian pemagangan.
2. Mengikuti pemagangan sampai selesai.
3. Mentaati tata tertib yang berlaku di perusahaan yang menyelenggarakan pemagangan.
4. Menjaga nama baik perusahaan penyelenggara pemagangan

Penyelenggara pemagangan berhak :

1. Memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan.
 2. Memberitahukan tata tertib dan perjanjian pemagangan.
- Penyelenggara Pemagangan berhak :
1. Membimbing peserta pemagangan sesuai dengan program yang ditetapkan.
 2. Memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan perjanjian pemagangan.
 3. Menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.

1. Memberikan teladan untuk memberikan kesan keyakinan peserta didik.
2. Mengklarifikasi nilai karakter/kepribadian yang harus dimiliki kepada peserta didik.
3. Mengidentifikasi dan membangun minat serta pengalaman peserta didik.
4. Memberikan peserta didik untuk belajar kelompok bersama, diskusi, bermain peran, atau yang lainnya.
5. Bercerita, bernyanyi, atau bermain bersama murid dalam rangka penanaman nilai.

Selain itu perlu juga merekonstruksi kurikulum yang mampu melahirkan lulusan SMK yang bukan saja menguasai *hard skill*, tapi juga *soft skill*. Caranya bukan dengan mendikotomi secara ekstrim kurikulum yang terkait dengan *hard skill* dan *soft skill*, tapi kurikulum yang mampu mengintegrasikan *hard skill* dan *soft skill* secara bersamaan. Dalam kurikulum ini penting menuangkan hal yang bersikap *soft skill* ke dalam hal yang berkenaan dengan *hard skill*.

Kurikulum yang mampu mengintegrasikan *hard skill* dan *soft skill* juga harus tergambar secara tegas dalam setiap mata pelajaran. Mata pelajaran setidaknya harus menyangkut mata pelajaran *soft skill* yang bersifat normatif, menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai secara konstruktif. Adapun pengembangan metode pembelajaran yang dapat dilakukan oleh pendidik adalah:

1. Memberikan keteladanan kepada siswa dengan pribadi yang baik,
2. Mengingatkan peserta agar selalu ingat bahwa mereka adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dilakukan untuk membangun pengertian yang mendalam bahwa manusia hidup di dunia ini dengan aturan Tuhan dan tidak boleh hidup dengan seenaknya,
3. Memusatkan kebutuhan peserta didik akan nilai-nilai kehidupan dan apa-apa yang dibutuhkan sebagai lulusan SMK, dan
4. Membangun motivasi yang kuat pada diri siswa.

Selain itu, tentu saja dibutuhkan mata pelajaran produktif, yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktik. Oleh karena itu, pendidik harus dapat memilah dalam memberikan metode penyampaian kepribadian pada siswa. Adapun metode yang dapat dilakukan oleh guru adalah:

1. Memberikan teladan yang baik pada peserta didik,
2. Mengklarifikasi karakter/kepribadian apa sajakah yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah memiliki keahlian dalam mata pelajaran produktif,
3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah yang diberikan,
4. Memberikan kepada para siswa untuk berlatih dan kerja tim selama melaksanakan praktik,
5. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menarik kesimpulan atas pelajaran yang telah diberikan,
6. Menasihati siswa agar bekerja sesuai dengan prosedur yang ada, dan
7. Menasihati siswa untuk mengunpulkan tugas tepat pada waktunya.

Sementara yang semestinya dilakukan oleh siswa adalah:

1. Mentaati peraturan yang ada. Peraturan tersebut adalah peraturan tata tertib siswa di sekolah, tata tertib siswa di kelas, tata tertib siswa di luar sekolah, serta tata tertib lain yang dibuat oleh sekolah.
2. Mendengarkan dan mengamalkan pesan moral yang disampaikan oleh guru.
3. Berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang baik.
4. Membawa buku saku siswa setiap hari.

Sementara yang seharusnya dilakukan oleh pihak sekolah adalah:

1. Memberlakukan norma-norma di sekolah.

yang berbadan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.

Peserta Pemagangan disyaratkan:

1. Usia paling rendah 17 tahun dan harus melampirkan surat persetujuan dari orang tua/wali.
2. Sehat Jasmani dan rohani.
3. Lulus seleksi.

Yang dimaksud peserta pemagangan ini adalah siswa yang masih duduk di kelas 3 pada Sekolah Menengah Kejuruan.

Penyelenggara Pemagangan harus memiliki:

1. Program Pemagangan.
2. Sarana dan Prasarana.
3. Pembimbing Pemagangan.

Penyelenggara Pemagangan menyusun Program Pemagangan:

1. nama Program Pemagangan
2. tujuan Program Pemagangan
3. kompetensi yang akan ditempuh
4. perkiraan waktu Pemagangan
5. persyaratan peserta Pemagangan
6. persyaratan Pembimbing Pemagangan
7. kurikulum dan silabus

Program Pemagangan mengacu pada:

1. Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI)
2. Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK)
3. Standar Kompetensi Kerja Internasional (SKKI)

Program Pemagangan meliputi:

1. Pemberian teori dan praktek di unit pelatihan Dilaksanakan paling banyak 25% dr komposisi program pemagangan.
2. Praktek kerja di Unit produksi Perusahaan Dilaksanakan paling sedikit 75% dari komposisi program Pemagangan. Jangka waktu pemagangan dibatasi paling lama 3 bulan.

peserta didik di tempat kerja agar lebih fokus memberikan bimbingan dan arahan sesuai dengan proposal yang telah disusun, pihak sekolah juga dapat menganggarkan/ memberikan insentif bagi para instruktur di tempat kerja. Pemberian insentif tersebut selain dapat lebih mengikat tanggung jawab tempat praktek kerja, juga menjadi bentuk apresiasi bagi pegawai di tempat kerja yang telah membimbing peserta didik di tengah mengerjakan tugas utama/ kewajiban terhadap institusi. Oleh karena tidak dipungkiri bahwa membimbing peserta praktek kerja, menjadi tugas tambahan bagi pegawai di tempat kerja.

1.7. Pemagangan Pra dan Pasca Kelulusan

1.7.1. Pemagangan Pra Kelulusan

Pemagangan merupakan program tahunan bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung, dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai ketrampilan atau keahlian tertentu.

Penyelenggara pemagangan adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pemagangan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha berbadan hukum, milik perorangan, milik persekutuan, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Ada istilah lainnya bahwa perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan usaha usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Unit Pelatihan adalah satuan unit yang menyelenggarakan Pelatihan di Perusahaan baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) adalah Instansi pemerintah

2. Memberikan kearifan-kearifan local kepada siswa lewat kegiatan intra dan ekstrakurikuler.
3. Mengadakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan karakter siswa secara berkala, seperti:
 - a. Kegiatan keagamaan untuk meningkatkan akhlak yang mulia;
 - b. kegiatan out bond untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kerja tim;
 - c. kegiatan latihan kepemimpinan untuk meningkatkan rasa kedisiplinan, kepemimpinan, serta jiwa mandiri.
4. Mengadakan pelatihan terhadap guru-guru dalam pelaksanaan pendidikan karakter. Pelatihan tersebut berisi tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan karakter;
5. Melakukan pengontrolan terhadap perkembangan pemberian nilai-nilai karakter/kepribadian.
6. mewajibkan penggunaan baju batik pada salah satu hari untuk guru dan siswa.
7. mewajibkan siswa untuk menyanyikan lagu kebangsaan pada jam pertama pelajaran akan dimulai.
8. membuat buku saku siswa yang berisi norma-norma dan kearifan lokal, serta lembar point hukuman terhadap pelanggaran dan point hadiah untuk tindak kebaikan.

Untuk membentuk karakter siswa yang bukan hanya mumpuni dalam hard skill dan soft skill, perlu juga mendapat penopang dari pihak sekolah. Beberapa hal yang penting untuk dilakukan oleh pihak sekolah:

1. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga luar sekolah dalam upaya peningkatan karakter siswa, seperti:
 - a. Lembaga kepolisian atau militer untuk membina kedisiplinan siswa dan pemahaman bela Negara;
 - b. Organisasi kemasyarakatan yang bersifat agamis untuk pembinaan akhlak mulia; dan
 - c. Lembaga Trainer/Motivator untuk membina rasa

semangat dan percaya diri.

2. Melakukan supervisi terhadap guru terkait dengan hasil dari pelaksanaan pendidikan karakter secara terus-menerus dan berkesinambungan.
3. Melakukan pengontrolan terhadap buku saku siswa.
4. Menjalin hubungan yang baik dengan orang tua siswa

1.2.2. Kesesuaian Kurikulum dengan Regulasi dan Kebutuhan DUDI

Substansi dari pendidikan kejuruan harus menampilkan karakteristik pendidikan kejuruan yang tercermin dalam aspek-aspek yang erat dengan perencanaan kurikulum, yaitu :

1. Orientasi (*Orientation*)

Kurikulum pendidikan kejuruan telah berorientasi pada proses dan hasil atau lulusan. Keberhasilan utama kurikulum pendidikan kejuruan tidak hanya diukur dengan keberhasilan pendidikan peserta didik di sekolah saja, tetapi juga dengan hasil prestasi kerja dalam dunia kerja. Finch dan Crunkilton (1984 : 12) mengemukakan bahwa: Kurikulum pendidikan kejuruan berorientasi terhadap proses (pengalaman dan aktivitas dalam lingkungan sekolah) dan hasil (pengaruh pengalaman dan aktivitas tersebut pada peserta didik).

2. Dasar kebenaran/Justifikasi (*Justification*)

Pengembangan program pendidikan kejuruan perlu adanya alasan atau justifikasi yang jelas. Justifikasi untuk program pendidikan kejuruan adalah adanya kebutuhan nyata tenaga kerja di lapangan kerja atau di dunia usaha dan industri. Dasar kebenaran/justifikasi pendidikan kejuruan menurut Finch dan Crunkilton (1984: 12), meluas hingga lingkungan sekolah dan masyarakat. Ketika kurikulum berorientasi pada peserta didik, maka dukungan bagi kurikulum tersebut berasal dari peluang kerja yang tersedia bagi para lulusan.

3. Fokus

Fokus kurikulum dalam pendidikan kejuruan tidak terlepas pada pengembangan pengetahuan mengenai suatu bidang

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Praktek Kerja
- 1.3 Identitas Guru Pembimbing dan Peserta Didik
- 1.4 Periode Pelaksanaan Praktek Kerja

BAB II PROGRAM PRAKTEK KERJA

- 3.1. Kompetensi Dasar Peserta Didik
- 3.2. Topik Pembelajaran/Pekerjaan yang Dipelajari di Tempat Praktek Kerja
- 3.3. Monitoring Pelaksanaan Praktek Kerja
- 3.4. Indikator Penilaian Praktek Kerja
- 3.5. Rencana Evaluasi Praktek Kerja

BAB III PENUTUP

- 3.1. Simpulan
- 3.2. Rekomendasi

LAMPIRAN

Selain penyusunan proposal praktek kerja, ada hal yang juga harus diperhatikan oleh tempat praktek kerja/industri agar pelaksanaan program praktek kerja peserta didik dapat berjalan ideal. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang *link and match* dengan Industri, tempat praktek kerja pun harus memperhatikan beberapa hal agar pelaksanaan praktek kerja mencapai kualitas ideal. Tempat praktek kerja sudah semestinya dapat menempatkan siswa di unit kerja/divisi yang sesuai dengan jenjang kualifikasi dan kompetensi yang akan dicapai, menyediakan instruktur sebagai tenaga pembimbing siswa, dan memberikan sertifikat kepada peserta didik yang telah menyelesaikan praktek kerja.

Selain hal-hal di atas, untuk mengikat instruktur/pembimbing

bagi tiap peserta didik/kelompok peserta didik yang akan melaksanakan praktek kerja berkoordinasi dengan Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum dan Wakil Kepala Sekolah bidang Hubungan Industri. Hal tersebut sebagai bentuk upaya penyalarsan dalam mengolaborasikan kurikulum pembelajaran dengan praktek kerja. Selain itu, tiap sekolah juga harus memiliki standar dan acuan untuk menyusun proposal praktek kerja. Dengan demikian, meskipun disusun oleh guru pembimbing yang berbeda-beda, tetapi gaya narasi dan sistematika yang digunakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sekolah. Selanjutnya, proposal praktek kerja yang telah disusun ditandatangani Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah bidang Hubungan Industri sebagai bentuk pengesahan.

Berikut adalah contoh format penulisan proposal praktek kerja:

JUDUL PROPOSAL

(Judul, logo sekolah, nama sekolah, program keahlian/kejuruan, kota domisili sekolah dan tahun penyusunan)

LEMBAR PENGESAHAN

(Memuat tanda tangan guru pembimbing sebagai penyusun proposal dan tanda tangan Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah bidang Hubungan Industri sebagai bentuk pengesahan dari pihak sekolah).

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

tertentu, tetapi harus secara simultan mempersiapkan peserta didik yang produktif. Finch dan Crunkilton (1984: 13) mengemukakan bahwa: Kurikulum pendidikan kejuruan berhubungan langsung dengan membantu siswa untuk mengembangkan suatu tingkat pengetahuan, keahlian, sikap dan nilai yang luas. Setiap aspek tersebut akhirnya bertambah dalam beberapa kemampuan kerja lulusan. Lingkungan belajar pendidikan kejuruan mengupayakan di dalam mengembangkan pengetahuan peserta didik, keahlian meniru, sikap dan nilai serta penggabungan aspek-aspek tersebut dan aplikasinya bagi lingkungan kerja yang sebenarnya.

Seluruh kemampuan tersebut di atas, dapat dikuasai oleh peserta didik melalui pengalaman belajar yang diberikan, yaitu berupa rangsangan yang diaplikasikan baik pada situasi kerja yang tersimulasi lewat proses belajar mengajar di sekolah maupun situasi kerja yang sebenarnya pada dunia usaha atau industri (pembelajaran di dunia kerja). Dari hasil belajar atau kemampuan yang telah dikuasai diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan diri peserta didik, sehingga mereka mampu bekerja sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan industri.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dirancang untuk menyiapkan peserta didik atau lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan mampu mengembangkan sikap profesional di bidang kejuruan. Lulusan pendidikan kejuruan, diharapkan menjadi individu yang produktif yang mampu bekerja menjadi tenaga kerja menengah dan memiliki kesiapan untuk menghadapi persaingan kerja. Kehadiran SMK ini didambakan masyarakat khususnya masyarakat yang berkecimpung langsung dalam dunia kerja. Dengan catatan, bahwa lulusan pendidikan kejuruan memang mempunyai kualifikasi sebagai (calon) tenaga kerja yang memiliki keterampilan vokasional tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.

Gambaran tentang kualitas lulusan pendidikan kejuruan

yang disarikan dari Finch dan Crunkilton (1979), bahwa :
"Kualitas pendidikan kejuruan menerapkan ukuran ganda, yaitu kualitas menurut ukuran sekolah atau in-school success standards dan kualitas menurut ukuran masyarakat atau out-of school success standards". Kriteria pertama meliputi aspek keberhasilan peserta didik dalam memenuhi tuntutan kurikuler yang telah diorientasikan pada tuntutan dunia kerja, sedangkan kriteria kedua, meliputi keberhasilan peserta didik yang tertampilkan pada kemampuan unjuk kerja sesuai dengan standar kompetensi nasional ataupun internasional setelah mereka berada di lapangan kerja yang sebenarnya. Upaya untuk mencapai kualitas lulusan pendidikan kejuruan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja tersebut, perlu didasari dengan kurikulum yang dirancang dan dikembangkan dengan prinsip kesesuaian dengan kebutuhan stakeholders. Kurikulum pendidikan kejuruan secara spesifik memiliki karakter yang mengarah kepada pembentukan kecakapan lulusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan tertentu. Kecakapan tersebut telah diakomodasi dalam kurikulum SMK yang meliputi kelompok Normatif, Adaptif dan kelompok Produktif. Kurikulum yang diimplementasikan di SMK saat ini, khusus untuk kelompok produktif masih menggunakan kurikulum tahun 2004, sedangkan untuk kelompok normatif dan adaptif sudah menggunakan model pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 2006. Pada tataran implementasi kurikulum ini menuntut kreativitas guru di dalam memberikan pengalaman belajar yang dapat meningkatkan kompetensi peserta didik, karena betapapun baiknya kurikulum yang telah direncanakan pada akhirnya berhasil atau tidaknya sangat tergantung pada sentuhan aktivitas dan kreativitas guru sebagai ujung tombak implementasi suatu kurikulum. Pendidikan dan pelatihan di SMK; khususnya pada program produktif yang sesuai dengan bidang keahlian, secara ideal dituntut untuk menerapkan pendekatan pembelajaran yang

1.6.1. Data primer

Data ini diperoleh dengan melakukan survei langsung tempat kerja dan melaksanakan wawancara dengan perwakilan pegawai di tempat praktek kerja yang ditetapkan sebagai penanggung jawab pengelola praktek kerja bagi peserta didik, mewawancarai peserta didik (jenjang kelas di atas atau yang telah lulus sekolah) yang pernah praktek kerja di tempat praktek kerja yang sama. Observasi dan wawancara dilakukan untuk menghimpun data dan informasi tentang proses kerja/ produksi di tempat kerja, tugas, pokok dan fungsi tempat praktek kerja, mengetahui keunikan/ciri khas tempat praktek kerja, mengetahui butir kegiatan kerja yang telah menjadi kebiasaan atau yang telah resmi ditetapkan oleh institusi untuk dikerjakan oleh peserta praktek kerja, dan memetakan/menarik benang merah keselarasan tempat praktek kerja dengan kejuruan dan kompetensi peserta didik.

1.6.2. Data Sekunder

Data ini diperoleh dengan menganalisis bahan pustaka baik secara daring (*online*) ataupun luring (*offline*). Analisis bahan pustaka secara daring misalnya dapat dilakukan dengan mengunjungi situs web resmi (*official website*) tempat praktek kerja, akun media sosial resmi (*official account*) tempat praktek kerja, artikel terkait tempat praktek kerja, dan lain-lain. Sedangkan analisis bahan pustaka secara luring dapat dilakukan dengan membaca buku, leaflet, booklet, produk hukum/kebijakan yang dihasilkan tempat praktek kerja (biasanya jika tempat praktek kerja yang berperan sebagai regulator/instansi pemerintah), artikel terkait tempat kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan praktek kerja. Hal tersebut pun dilakukan tak lain untuk menghimpun data dan informasi tentang proses kerja/ produksi di tempat kerja, tugas, pokok dan fungsi tempat praktek kerja, mengetahui keunikan/ciri khas tempat praktek kerja, dan memetakan/ menarik benang merah keselarasan tempat praktek kerja dengan kejuruan dan kompetensi peserta didik.

Saat penyusunan proposal praktek kerja, guru pembimbing

Mencapai pelaksanaan praktek kerja yang ideal bukan suatu hal yang mudah. Apalagi berdasarkan data di lapangan, ditemukan bahwa saat pelaksanaan praktek kerja, keterampilan jurusan/bidang kejuruan peserta didik kurang mendapatkan perhatian. Hal tersebut terindikasi berdasarkan temuan lapangan di mana peserta didik diberikan tugas yang sangat teknis, bersifat administratif (bukan praktek sesuai dengan kejuruan), dan belum maksimal untuk mengenal pekerjaan yang menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) terkini.

Sebagai upaya mencapai pelaksanaan praktek kerja yang ideal, hasil kajian merekomendasikan bahwa terdapat sebuah upaya yang dapat dilakukan pihak sekolah agar praktek kerja sesuai dengan kompetensi dunia usaha serta peserta didik memperoleh manfaat pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan (*link and match*). Upaya tersebut adalah menyusun rancangan pelaksanaan praktek yang dapat menjadi kerangka acuan bagi siswa, sekolah dan tempat praktek kerja. Rancangan praktek kerja dapat dituangkan dalam sebuah proposal yang disusun oleh pihak sekolah. Proposal tersebut merupakan deskripsi program praktek kerja yang memuat sejumlah kompetensi dasar yang akan dipelajari peserta didik di tempat praktek kerja. Proposal praktek kerja juga dimaksudkan agar dalam pelaksanaan, penempatan peserta didik tepat sasaran.

Sebelum menyusun proposal praktek kerja, pihak sekolah baiknya memetakan dan menetapkan terlebih dahulu guru pembimbing bagi tiap peserta didik/kelompok peserta didik yang akan melaksanakan praktek kerja. Ini menjadi hal penting karena penyusunan proposal praktek kerja selanjutnya menjadi tanggung jawab tiap guru pembimbing. Jika guru pembimbing sudah ditetapkan, maka langkah selanjutnya yang ditempuh oleh guru pembimbing sebagai representasi pihak sekolah dalam menyusun proposal praktek kerja adalah mengumpulkan data dan informasi tentang tempat pelaksanaan praktek kerja yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Data dan informasi tersebut dapat diperoleh guru pembimbing melalui dua cara, yaitu:

mampu memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik di dalam penguasaan kompetensi atau kemampuan kerja sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan industri. Pendekatan pembelajaran tersebut terdiri dari: Pelatihan Berbasis Kompetensi (*Competency Based Training*), Pelatihan Berbasis Produksi (*Production Based Training*) dan Pelatihan Berbasis Industri. Dengan menerapkan pendekatan pembelajaran ini diharapkan mampu memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik di dalam penguasaan seluruh kompetensi yang harus dikuasai sesuai Standar Kompetensi Nasional, sehingga mereka mampu mengikuti uji level pada setiap akhir semester untuk Kelas X dan XI serta uji kompetensi untuk kelas XII yang dilaksanakan oleh pihak industri sebagai inatitusi pasangan.

4. Sertifikasi profesi.

Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas capaian kompetensi pada kualifikasi tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi yang berwenang. Siswa lulusan SMK bisa memiliki lebih dari satu sertifikat kompetensi, tergantung pada program keahlian yang diambilnya di SMK. Misalnya lulusan SMK dengan program keahlian Teknik Mesin, bisa memiliki enam sertifikat untuk kompetensi Teknik Pengelasan, Teknik Fabrikasi Logam, Teknik Pengecoran Logam, Teknik Pemesinan, Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri, dan Teknik Gambar Mesin. Sertifikat kompetensi untuk siswa SMK diberikan setelah siswa dinyatakan lulus dalam ujian kompetensi keahlian (UKK). UKK adalah bagian dari ujian nasional (UN) untuk peserta didik SMK, yang terdiri atas ujian teori kejuruan dan ujian praktik kejuruan. Setelah siswa lulus UKK, sertifikat kompetensi diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). SMK yang telah dinyatakan sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) oleh BNSP juga bisa menyelenggarakan ujian kompetensi keahlian secara

mandiri dan menjadi tempat ujian kompetensi bagi SMK lain di sekitarnya.

Salah satu tujuan UKK adalah memfasilitasi kerja sama SMK dengan DUDI untuk melaksanakan ujian kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan DUDI. Dalam pelaksanaan UKK, SMK melibatkan DUDI atau institusi berskala internasional, nasional atau lokal, yang memiliki pekerjaan utama yang relevan dengan kompetensi keahlian siswa yang diujikan. Diharapkan, DUDI tersebut bisa melihat secara langsung dan mengakui kompetensi para siswa SMK sehingga bisa langsung diserap sebagai tenaga kerja oleh DUDI.

1.3. *Link and Match* Sekolah Menengah Kejuruan

1.3.1. Adaptasi Konsep Pembelajaran SMK dengan DUDI

1. Kesesuaian Kurikulum dengan DUDI

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 terkait revitalisasi SMK menyebutkan empat poin yang menjadi fokus melingkupi revitalisasi kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, kerja sama, dan lulusan. Kurikulum untuk jenjang SMK sering dianggap kaku oleh berbagai kalangan yang berdampak sulit untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang siap dipakai oleh dunia usaha dan industri. Dengan revitalisasi ini, dari tiga kurikulum di SMK ada satu kurikulum yang dirancang lebih fleksibel. Artinya, kurikulum ini menyesuaikan dengan kebutuhan industry.

Sebetulnya konsep *link and match* sempat diluncurkan Mendiknas Prof. Wardiman Djojonegoro dalam rangka menjawab kebutuhan dunia Usaha dan Industri baik dalam maupun luar negeri, khususnya dalam negeri. Disamping kurikulum, revitalisasi juga dilakukan dari sisi pendidik dan tenaga kependidikan, terutama guru. Selain ketersediaan, revitalisasi juga menasar pada perbaikan kompetensi guru. Sebagai solusi jangka pendek, pemenuhan kebutuhan guru produktif dilakukan melalui program keahlian ganda.

1.5.3. Pembimbing Pemagangan

Pembimbing pemagangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Karyawan tetap.
2. Sehat jasmani dan rohani.
3. Memiliki kompetensi teknis dalam jabatan yang sesuai dengan program pemagangan.
4. Memiliki kompetensi Metodologi pelatihan.
5. Surat Penunjukan Pembimbing dari manajer Personalia atau di atasnya.
6. Memahami regulasi pemagangan

1.6. Praktek Kerja

Praktek kerja menjadi bagian dari kurikulum pendidikan di SMK dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu sesuai dengan kejuruan/konsentrasi yang dipilih peserta didik. Praktek kerja yang diselenggarakan SMK merupakan entitas penting baik bagi peserta didik, sekolah maupun dunia usaha. Bagi peserta didik, praktek kerja dapat menjadi sebuah medium untuk mempraktekan berbagai teori yang telah diperoleh di bangku sekolah, mengenal etos dan iklim kerja dunia usaha, memperoleh pengalaman dan pengetahuan bekerja sesuai dengan bidang kejuruan/konsentrasi. Bagi pihak sekolah, praktek kerja menjadi sebuah medium untuk membina hubungan baik dengan dunia usaha, mengembangkan program, metode pembelajaran, sarana dan prasarana di sekolah sesuai dengan hasil observasi di tempat kerja, dan meningkatkan kualitas lulusan. Selanjutnya, praktek kerja bagi dunia usaha dapat memberikan manfaat di antaranya menjadi medium untuk mengembangkan hubungan baik dengan *stakeholders* yang akan mencetak calon tenaga kerja, memperoleh gambaran kualitas calon tenaga kerja, membantu kegiatan publisitas tempat kerja untuk mengomunikasikan produk/jasa/kebijakan yang dihasilkan. Manfaat-manfaat tersebut dapat dicapai jika pelaksanaan praktek kerja berjalan ideal.

memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pemagangan.

Penyelenggara pemagangan (perusahaan) harus memiliki beberapa persyaratan/kriteria :

1.5.1. Program Pemagangan

Program pemagangan disusun oleh Penyelenggara Pemagangan. Program Pemagangan meliputi :

1. Nama Program Pemagangan.
2. Tujuan Program Pemagangan.
3. Kompetensi yang harus ditempuh.
4. Perkiraan Waktu Pemagangan.
5. Persyaratan Peserta Pemagangan.
6. Persyaratan Pembimbing Pemagangan.
7. Kurikulum dan Silabus

Program pemagangan harus mengacu pada

1. Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
2. Standart Kompetensi Kerja Khusus.
3. Standart Kompetensi Kerja Nasional

Program Pemagangan meliputi:

1. Pemberian teori dan praktek di Unit Pelatihan yang dilaksanakan paling banyak 25% dari komposisi Program Pemagangan.
2. Praktek kerja di Unit Produksi Perusahaan dilaksanakan paling sedikit 75% dari komposisi Program Pemagangan.

1.5.2. Sarana dan Prasarana Pemagangan

Sarana dan prasarana ideal yang seharusnya dimiliki di tempat pemagangan meliputi :

1. Ruang teori.
2. Ruang Simulasi / praktek.
3. Kelengkapan Alat keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Buku kegiatan (*log book*) bagi peserta pemagangan.

Revitalisasi yang juga tidak kalah penting adalah berkaitan kerja sama antara SMK dengan DUDI, juga perlu perbaikan kerja sama dengan perguruan tinggi maupun antar-kementerian. Dan yang terakhir adalah revitalisasi kualitas lulusan SMK yang harus melalui uji kompetensi dan sertifikasi yang diakui DUDI. Karena kualitas lulusan SMK akan menentukan apakah SMK bisa merespons kebutuhan DUDI atau tidak.

Salah satu tolok ukur yang dapat digunakan untuk merespons masalah kualitas lulusan SMK adalah melalui Lomba Kreatifitas Siswa (LKS). Hal tersebut terlihat lewat fakta bahwa sekolah yang berhasil mengirimkan peserta didiknya ke ajang ini merupakan SMK yang memiliki siswa kreatif dan terbaik di daerahnya. Oleh karena itu, dengan LKS ini diharapkan semakin banyak baik para siswa maupun SMK yang terpacu untuk berkompetisi dan menghasilkan lulusan-lulusan terbaik pula.

2. Konsep Pembelajaran Diasumsikan dengan Kondisi Praktis DUDI

Nampaknya konsep Pembelajaran Teaching Factory ini secara teoritis sudah bisa ikut menjawab kebutuhan DUDI, namun implementasi konsep ini membutuhkan daya dukung yang kuat dan serius, baik dari aspek pengalaman empirik SDM/ Guru, kesiapan mental siswa, bahan baku, dan infra struktur/ peralatan pendukung. Beberapa hal yang harus dipahami dalam konsep pembelajaran Teaching Factory ini (TEFA) di antaranya sbb:

a. Orientasi Sistem Pembelajaran Teaching Factory

Pembelajaran yang berorientasi produksi dan bisnis adalah proses penguasaan keahlian atau keterampilan yang dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk atau jasa yang dipesan oleh konsumen. Dalam dunia broadcast televisi diperlukan keahlian yang focus dan spesifik. Artinya siswa dituntut untuk lebih menekuni salah keahlian tertentu disamping keahlian lainnya. misalnya kamera, audio, pencahayaan, penyuntingan/ editing dsb.

Keahlian tersebut masing-masing memiliki spesifikasi yang berbeda dan khusus, sehingga harus ditekuni secara serius. Selain itu pula memang dalam dunia broadcast TV fungsi dan jabatan tersebut memiliki posisi dan porsi skill/keahlian yang berbeda, seperti cameraman, lightingman, audioman, editor dsb. Sementara konsep pembelajaran yang sedang berlangsung bisa dikatakan abu-abu, sehingga ketika siswa lulus SMK, mereka belum memiliki keahlian atau keterampilan secara khusus sesuai kebutuhan pasar.

b. **Penerapan Konsep Teaching Factory di SMK/Broadcast**
Prinsip dasar teaching factory (TIFA) adalah pengintegrasian pengalaman dunia kerja ke dalam kurikulum sekolah. Semua peralatan dan bahan serta pelaku pendidikan disusun dan dirancang untuk melakukan proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan produk (barang dalam ataupun jasa). TIFA merupakan perpaduan dari pembelajaran berbasis produksi dan pembelajaran kompetensi. Dalam pembelajaran berbasis produksi, siswa terlibat langsung proses produksi, sehingga kompetensinya dibangun berdasar kebutuhan produksi. Dalam teaching factory, sekolah melaksanakan kegiatan produksi atau layanan jasa yang merupakan bagian dari PBM. Dengan demikian sekolah diharuskan memiliki sebuah pabrik, workshop/studio mini atau unit usaha lain untuk kegiatan pembelajaran.

c. **Melalui Realisasi Praktek Produksi Program/konten dalam Pembelajaran**

- 1) mempersiapkan individu menjadi pekerja;
- 2) mempersiapkan individu untuk terus belajar ke level yang lebih tinggi;
- 3) membantu siswa memilih bidang kerja yang sesuai kemampuannya;
- 4) menunjukkan bahwa 'learning by doing' sangat penting bagi efektivitas pendidikan dan menumbuhkan kreatifitas;

kemajuan masa depan harus dapat dilaksanakan secepat mungkin (*education in short*)

2. Pendidikan kejuruan dalam pengembangannya harus berorientasi kepada jenis-jenis pekerjaan yang langsung dibutuhkan di lapangan kerja
3. Pendidikan kejuruan diatur sedemikian rupa supaya peserta didik dapat keluar masuk lembaga pendidikan secara mudah (*entry exit system*)
4. Pendidikan kejuruan harus disesuaikan dengan permintaan pasar (*demand driven*), bukan pasar yang menyesuaikan dengan pendidikan kejuruan.
5. Pengembangan pendidikan kejuruan harus terbuka sehingga dimungkinkan terjadinya interaksi antar disiplin ilmu serta disiplin teknologi (*cross discipline*)
6. Pendidikan kejuruan harus berani mengembangkan teknologi yang sedang dan akan terus berkembang (*forward technology*). (Ki Supriyoko, 2000)

Untuk mengantisipasi perkembangan tuntutan dunia usaha dan industri tersebut, maka perlu sumber daya manusia yang *hi-tech* yang mampu bersaing dalam dunia kerja. Oleh sebab itu penting membekali peserta didik dengan kemampuan kompetensi dalam bidang teknologi informasi dan komputerisasi di era digital milenial seperti sekarang.

1.5. Kriteria Tempat Magang

Beberapa hal yang mesti menjadi perhatian dalam pemagangan:

1. Perusahaan Industri dan/atau perusahaan kawasan industri memfasilitasi pemagangan industri untuk setiap guru bidang study produktif yang mengawal siswa siswanya untuk pemagangan.
2. Pemagangan Industri dilaksanakan sesuai dengan jenjang kualifikasi dan atau kompetensi yang akan dicapai.
3. Penyelenggara pemagangan adalah perusahaan yang

yang dipelajarinya, serta kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan organisasi kerja (antara lain komunikasi dan kolaborasi), diperlukan pengalaman belajar kontekstual dalam berbagai bentuk model pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar dari mata pelajaran yang dipelajarinya. Atas dasar itulah pada uraian berikut, selanjutnya akan dibahas tentang model-model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan tujuan dan karakteristik pembelajaran pada pendidikan SMK/MAK.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif-mandiri mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Atas dasar itu maka dikembangkan Standar Proses Pembelajaran di SMK/MAK mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi; merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan pengawasan pembelajaran pada satuan pendidikan SMK/MAK untuk mencapai kompetensi lulusan.

Proses pembelajaran diselenggarakan berbasis aktivitas secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik. Selain itu proses pembelajaran juga harus memberikan ruang untuk berkembangnya keterampilan abad XXI yaitu kreatif, inovatif, berfikir kritis, pemecahan masalah, kolaboratif, dan komunikatif untuk menyongsong era revolusi industri 4.0 dan yang akan datang. Era ini dikenal juga dengan fenomena *disruptive innovation* yang menekankan pada pola ekonomi digital, kecerdasan buatan, *big data*, dan robotik.

1.4.2. Pendidikan kejuruan

Perubahan teknologi tersebut berimplikasi pada penyesuaian penyelenggaraan pembekalan keterampilan vokasional kepada peserta didik dibidang kejuruan, oleh karena itu perlu diperhatikan beberapa prinsip pendidikan kejuruan, antara lain:

1. Pendidikan kejuruan yang prospektif dan berorientasi pada

- 5) mendefinisikan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja;
- 6) memperluas cakupan kesempatan rekrutmen bagi siswa;
- 7) memberi kesempatan kepada guru memperluas wawasan instruksional;
- 8) membantu siswa dalam mempersiapkan diri menjadi tenaga kerja, bagaimana menjalin kerjasama dalam dunia kerja yang aktual, dll;
- 9) memberi kesempatan kepada siswa untuk melatih keterampilannya sehingga dapat membuat keputusan tentang karir yang akan dipilihnya;
- 10) memberi kesempatan kepada guru untuk membangun 'jembatan instruksional' antara kelas dengan dunia kerja;
- 11) membuat pembelajaran lebih menarik dan memotivasi siswa belajar.

d. Hal yang diharapkan dalam konsep Teaching Factory

- 1) Menyadarkan siswa bahwa dalam penguasaan keterampilan siswa tidak hanya mempraktikkan soft skill dalam pembelajaran, (bekerja dalam tim, melatih kemampuan komunikasi interpersonal dari buku), tetapi juga merealisasikan pengetahuan secara langsung dan latihan bekerja untuk memasuki dunia kerja secara nyata. (Hadlock, Wells, Hall, Clifford, Winowich, dan Burns 2008: 14).
- 2) Sarana pelatihan dan praktik berbasis produksi secara langsung bagi siswa yang berorientasi pada pasar;
- 3) Mengembangkan sikap mandiri dan percaya diri siswa melalui kegiatan produksi;
- 4) Menjalin hubungan yang lebih baik dengan dunia usaha dan industri serta masyarakat lain atas terbukanya fasilitas untuk umum dan hasil-hasil

d. **Konsep Teaching Factory menemukan adanya beberapa faktor yaitu:**

- 1) pembelajaran keterampilan murni yang biasa saja tidak cukup;
- 2) Siswa dan Guru melalui pembelajaran yang berbasis produksi, mendapat pengalaman langsung menggandengkan berbagai komponen kompetensi dalam satu ikatan;

1.3.2. **Konsep Teaching Factory Memberikan Ruang dan Peluang bagi Siswa untuk Lebih Berkreasi**

Melalui pembelajaran berbasis team yang melibatkan siswa, guru, para praktisi dan partisipasi industry televisi/media memperkaya proses pendidikan dan memberikan manfaat yang nyata bagi semua pihak termasuk lembaga lembaga penyiaran, khususnya stasiun TV lokal yang menjadi mitra SMK. Kreatifitas dan potensi siswa akan muncul dengan diberikannya kesempatan terjun ke dunia Industri, sehingga akan semakin memahami kebutuhan realistik terhadap dunia industry/usaha. Lembaga pendidikan/SMK termasuk para guru dapat mempertimbangkan persentase dan metode pembelajaran sesuai kebutuhan pasar secara proporsional.

Sangat disadari untuk dapat menopang SMK Jurusan Broadcast/Penyiaran TV membutuhkan fasilitas dan infrastruktur dengan biaya relative cukup mahal dan fasilitas yang digunakan harus adaptable dengan perkembangan teknologi saat ini. Maka agar perkembangan teknologi tetap dapat diikuti para siswa, sekolah SMK melalui Direktorat PSMK harus dapat bersinergi dengan lembaga lembaga penyiaran/stasiun TV lokal/TV nasional setempat agar para siswa dapat melakukan magang tanpa ada kendala. Melalui magang tersebut para siswa disamping dapat memahami dunia kerja sebenarnya, juga mengetahui perkembangan teknologi terbaru melalui station TV tersebut.

peradaban suatu bangsa. Bangsa yang besar dan maju akan tampak dari seberapa besar pertumbuhan generasi yang menempuh jenjang pendidikan yang layak. Hal tersebut juga otomatis akan tampak dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan industrinya. Sistem pendidikan yang berjenjang telah berjalan dinamis selama ini mencetuskan sebuah ide dan harapan baru akan adanya perubahan sistem di dunia pendidikan. Sebagai sebuah bangsa, Indonesia pun mengikuti pergerakan dinamis dunia pendidikan guna menjawab tantangan jaman. Oleh karena itu pendidikan kejuruan menjadi sebuah tawaran yang menjanjikan di era pesatnya perkembangan teknologi.

Perkembangan pada dunia kerja ini harus diikuti oleh lembaga pendidikan yang menyiapkan tenaga kerja seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasyah Aliyah Kejuruan (MAK). Pendekatan pengembangan sekolah kejuruan sudah harus mengacu pada *market driven*. Penggunaan pendekatan tersebut memungkinkan terjadinya kesesuaian antara proses pembelajaran di sekolah dengan proses yang terjadi di dunia kerja atau dunia usaha. Sehingga terjadi keselarasan antara penguasaan kompetensi dari lulusan SMK/MAK dengan kebutuhan tenaga kerja. SMK/MAK memiliki tujuan menyiapkan lulusannya untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruan. Ini menunjukkan bahwa SMK/MAK sebagai institusi harus menyiapkan lulusannya secara komprehensif dan inklusif, membantu peserta didik menumbuh-kembangkan capaian hasil pendidikan secara bermakna berdasarkan potensi yang dimilikinya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat di mana mereka hidup kelak setelah menyelesaikan pendidikan.

Tugas SMK/MAK di atas, sesuai dengan tuntutan keterampilan kerja abad 21, yakni keterampilan berfikir tingkat tinggi yang meliputi berfikir kreatif, berfikir kritis dan memecahkan masalah. Adapun untuk membangun kemampuan yang lainnya yakni keterampilan literasi dan informasi teknologi, keterampilan untuk hidup mandiri sesuai dengan kompetensi keahlian

kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kecakapan, mengetahui, berwenang, dan berkuasa memutuskan atau menentukan atas sesuatu. Definisi kompetensi menurut Depdikbud (1994) adalah karakteristik yang dimiliki oleh individu dan digunakan secara tepat dengan cara yang konsisten untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Wardiman Djojonegoro (1996: 11) memberikan arti kompetensi sebagai karakteristik dasar yang dimiliki oleh seorang individu yang berhubungan secara kausal dengan standar penilaian yang tereferensi pada performansi yang superior atau pada sebuah pekerjaan.

Menjadi kajian dan perhatian serius bagi semua pihak untuk bisa memperbaiki sistem pendidikan kejuruan performanya menjadi lebih sempurna untuk diadopsi oleh industri. Sehingga tujuan awal dari pendidikan kejuruan agar dapat mencetak tenaga kerja tingkat menengah yang handal dan siap pakai dapat terealisasi. Dari hasil uraian ini ada beberapa yang menjadi pertimbangan dan masukan bagi pendidikan kejuruan, salah satunya merubah prosentasi bobot pembelajaran antara teori dan praktek dari yang awalnya 40% teori dan 60% praktek, perlu ditingkatkan dalam aspek pembelajaran praktek yaitu menjadi 30% dalam bentuk teori dan 70% dalam bentuk proaktek. Pertimbangan ini didasarkan pada betapa besarnya tuntutan pangsa pasar terhadap kebutuhan tenaga kerja siap pakai. Pendidikan kejuruan menjadi omong kosong belaka tatkala bobot praktek yang seharusnya dialami oleh peserta didik tidak terlaksana sesuai dengan porsinya.

1.4.1. Pemahaman TIK Pembelajaran terdiri dari proses belajar mengajar

Teknologi selalu berjalan beriringan dengan kemajuan sebuah peradaban. Teknologi yang di hari kemarin dianggap modern (*sunrise technology*) bukan tidak mungkin hari ini sudah mulai *obsolete* atau basi (*sunset technology*). Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi parameter kemajuan pendidikan suatu negeri. Pendidikan memberikan kontribusi besar dalam perubahan

1.4. Metode Pembelajaran

Prosser dan Quigley dalam Surya Dharma (2013) menyatakan bahwa esensi dari pendidikan kejuruan adalah mengajarkan kebiasaan berfikir dan bekerja melalui pelatihan yang berulang-ulang. Terdapat tiga kebiasaan yang harus diajarkan yaitu :

1. Kebiasaan beradaptasi dengan lingkungan kerja,
2. Kebiasaan dalam proses pelaksanaan kerja, dan
3. Kebiasaan berfikir (dalam pekerjaan).

Wenrich dan Galloway (1988) mengemukakan bahwa pendidikan kejuruan dapat diartikan sebagai pendidikan yang spesial yang berfungsi menyiapkan peserta didik untuk memasuki pekerjaan tertentu atau pekerjaan keluarga, atau untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Calhoun (1982) menyatakan bahwa pendidikan kejuruan adalah suatu program pendidikan yang menyiapkan individu peserta didik menjadi tenaga kerja profesional, dan juga siap untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Clarke dan Winch (2007) mendefinisikan pendidikan kejuruan sebagai pendidikan yang menyiapkan anak-anak muda dan orang dewasa untuk memasuki lapangan kerja, di mana proses pembelajarannya berkaitan dengan masalah dan praktik. Henry dan Thomson dalam Berg (2002) mendeskripsikan pendidikan kejuruan sebagai berikut, pendidikan kejuruan itu identik dengan belajar "bagaimana untuk bekerja", pendidikan kejuruan berupaya bagaimana untuk meningkatkan kompetensi teknik dan posisi seseorang di lingkungan melalui penguasaan teknologi dan pendidikan kejuruan berkaitan erat dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu sering dipandang sebagai sesuatu yang memberikan kontribusi yang kuat terhadap ekonomi nasional.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil, siap kerja dan produktif pada bidang tertentu. Pendidikan kejuruan diselenggarakan dengan membawa "suasana kerja ke bangku

sekolah", sehingga didalam prosesnya peserta didik akan belajar "bagaimana cara bekerja". Pendidikan kejuruan membekali peserta didik pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman bekerja secara efektif dan efisien, serta kemampuan untuk selalu beradaptasi dan mengantisipasi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi.

Menurut Trilling and Fadel (2011: 91) pendidikan kejuruan adalah pemecahan problem, sehingga pertanyaan yang muncul bertujuan untuk menemukan solusi: bagaimana membuat pesawat terbang yang lebih aman? Bagaimana membuat kursi yang lebih ergonomis? Bagaimana menggunakan energi matahari untuk memanaskan air dan menghidupkan listrik? Berbeda dengan pendekatan seorang saintis dimulai dengan pertanyaan: mengapa langit itu biru? Mengapa air bisa mengalir ke atas pucuk pohon? Berdasarkan dua pendekatan tersebut, pendidikan menengah kejuruan bertujuan menemukan berbagai solusi untuk mencapai tujuan kehidupan yang lebih baik.

Pembelajaran dengan replikasi seperti konsep di atas sebenarnya mirip dengan *Teaching Factory* atau *Production Based Training/ Production Based Education and Training/Design Based Training* yang merupakan pembelajaran bentuk rekayasa dan teknologi sebagai strategi perancangan dan penemuan solusi atas problematika kehidupan. Adapun pada konsep sains lebih menekankan metoda penyelidikan dan penemuan untuk menjelaskan gejala-gejala alam. Pekerjaan di abad ke-21 membutuhkan keterampilan dengan kombinasi baru yaitu pemikiran tingkat tinggi dan komunikasi yang kompleks (Trilling dan Fadel, 2009). Pekerjaan dalam abad ke-21 bertumpu pada kemampuan kreativitas.

Dengan definisi tersebut, sangat tidak mungkin apabila pendidikan kejuruan tidak dibekali dengan beban prakteknya yang memadai untuk membekali peserta didik siap kerja. Sistem pendidikan yang sedang berjalan sekarang proporsi untuk teori 40%, sedangkan praktek 60% dirasa masih kurang proporsinya. Apalagi ditambah dengan beban banyaknya jumlah mata pelajaran yang dibebankan kepada peserta didik.

Terkait dengan mempersiapkan peserta didik untuk mampu bekerja pada bidang tertentu maka kurikulum SMK wajib memuat (UU Menurut UU No 20 Tahun 2003) :

1. Pendidikan Agama;
2. Pendidikan kewarganegaraan;
3. Bahasa;
4. Matematika;
5. Ilmu Pengetahuan Alam;
6. Ilmu Pengetahuan Sosial;
7. Seni dan budaya;
8. Pendidikan jasmani dan olah raga;
9. Keterampilan/kejuruan, dan
10. Muatan lokal.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang dimaksud produktif adalah mata pelajaran yang membekali peserta didik dengan kemampuan untuk bekerja yang sesuai dengan tuntutan perkembangan yang terjadi di dunia kerja. Muatan Produktif merupakan muatan pokok/inti yang ada di SMK, karena sangat berperan untuk mendukung kemampuan peserta didik memasuki dunia kerja. Dengan demikian peserta didik banyak memperoleh beban belajar, sementara disisi lain dituntut juga untuk mempunyai kompetensi profesional yang mumpuni sesuai kebutuhan duni usaha/dunia industri. SKKNI juga diharapkan digunakan oleh dunia usaha/dunia industri sebagai acuan untuk rekrutmen dan seleksi, penempatan, penilaian kompetensi dan pengembangan karir lulusan SMK, baik di jalur struktural maupun fungsional. Digunakan untuk merumuskan pola pembagian kerja dan tata hubungan kerja antar posisi atau jabatan, terutama dengan mempertimbangkan hasil analisis hierarki dan keterkaitan fungsi-fungsi produktif.

Dengan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perlu adanya perubahan proporsi dalam pendidikan kejuruan agar peserta didik memperoleh bekal kompetensi yang cukup untuk terjun ke dunia kerja yang sebenarnya. Pengertian

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN KAJIAN NORMA STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA
(KNSP)



KAJIAN PERKEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DALAM
PENINGKATAN KOMPETENSI PADA SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK)

TIM PENELITI

- Ketua : Dr. Ma'mun Murod, M.Si (NIDN: 0324106002)
- Anggota : 1. Dr. Retnowati WD Tuti, M.Si (NIDN: 0316036103)
2. Dr. Endang Sulastri, M.Si (NIDN: 0326106502)
3. Dr. Usni Hasanudin, M.Si (NIDN: 0302057801)
4. Dr. Kurniasih Mufidayati, M.Si (NIDN: 0319027003)
5. Dr. Sa'adiyah El Adawiyah, M.Si (NIDN:0322107005)
6. Djoni Gunanto, M.Si (NIDN: 0330038005)

Dibiayai oleh

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

DESEMBER 2020

HALAMAN PENGESAHAN

Judul	KAJIAN PERKEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DALAM PENINGKATAN KOMPETENSI PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
Peneliti/Pelaksana	Dr. Ma'mun Murod, M.Si
Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Jakarta
NIDN	0313067301
Jabatan Fungsional	Lektor
Program Studi	Ilmu Politik
Alamat Email	mamun.murod@umj.ac.id
Anggota :	
Nama	Dr. Retnowati WD Tuti, M.Si
NIDN	0316036103
Nama	Dr. Endang Sulastri, M.Si
NIDN	0326106502
Nama	Dr. Usni Hasanudin, M.Si
NIDN	0302057801
Nama	Dr. Kurniasih Mufidayati, M.Si
NIDN	0319027003
Nama	Dr. Sa'adiyah El Adawiyah, M.Si
NIDN	0322107005
Nama	Djoni Gunanto, M.Si
NIDN	0330038005
Nama Institusi Mitra	Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Tahun Pelaksanaan	2020
Biaya Penelitian	Rp. 200.000.000,-

Jakarta, Desember 2020

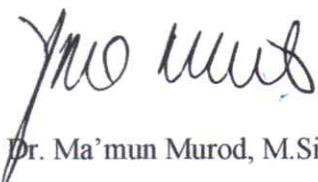
Mengetahui,
Wakil Dekan I FISIP



Dr. Evi Satispi, M.Si




Ketua




Dr. Ma'mun Murod, M.Si

Menyetujui,
Ketua FM - UMJ



Dr. Retnowati, M.Si



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
Latar Belakang	4
Tujuan	12
Sasaran	13
BAB II KERANGKA KONSEP DAN METODOLOGI	14
Kerangka Konsep	14
Metodologi Penelitian	20
BAB III PERTUMBUHAN KAWASAN INDUSTRI	28
Profil Lokasi Kajian	28
BAB IV KEMITRAAN KAWASAN INDUSTRI DAN SMK	47
Kebijakan Pemerintah	47
Proses dan Tahapan Kerjasama yang Dilakukan Sekolah dengan DUDI	51
BAB V	68
PENINGKATAN KOMPETENSI PADA SMK	
BAB VI PEDOMAN PENINGKATAN KOMPETENSI SMK DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DAN KAWASAN EKONOMI INDUSTRI	104
Pendahuluan	104
Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan	106
Link and Match Sekolah Menengah Kejuruan (SMK	115
Metode Pembelajaran	120
Praktek Kerja	128
Pemagangan Pra dan Pasca Kelulusan	133
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	145
Kesimpulan	145
Rekomendasi	146
DAFTAR PUSTAKA	148

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah secara serius berusaha terus memacu pembangunan ekonomi yang terintegrasi di wilayah-wilayah yang memiliki potensi dan keunggulan dari aspek geopolitik, geoekonomi atau geostrategic melalui pembangunan dan pengembangan kawasan industri.

Saat ini dan ke depan, industri merupakan salah satu sektor utama dalam pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional, maka diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan-kawasan tertentu yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategic. Kebijakan untuk mendukung percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang telah dilakukan pemerintah antara lain adalah pembangunan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan lain yang mendukung.

Kawasan industri sebagai pendorong dan penyokong pertumbuhan sektor manufaktur dan pemerataan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat dunia atau global. Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kinerja kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana telah diatur dalam PP Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa pembangunan kawasan industri bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan industri di

daerah, memberikan kemudahan bagi kegiatan industri, mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di Kawasan Industri, dan meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan. Perkembangan industri yang sangat cepat membutuhkan keterampilan baru yang selaras dengan perkembangan dan percepatan industry, sehingga penyiapan SDM dengan kompetensi sesuai dengan pengembangan teknologi dari setiap jenis industri menjadi keniscayaan. Berdasarkan kajian perencanaan Kementerian Perindustrian, kebutuhan tenaga kerja di sektor industri, Indonesia membutuhkan tambahan sebanyak 600 ribu tenaga kerja yang terampil dan siap kerja di setiap tahunnya pada periode 2017-2020.

Peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja industri selain menjadi tanggung jawab pemerintah, juga merupakan salah satu tanggung jawab dunia pendidikan, karena pendidikan merupakan bagian integral dari proses penyiapan SDM berkualitas dan berdaya saing. Melalui pendidikan, akan lahir tenaga kerja-tenaga kerja berkualitas sehingga industri lebih produktif dan siap bersaing dengan negara lain. Hasil survei terkait daya saing global (Global Competitiveness Index, GCI) pada 2017 menempatkan Indonesia pada peringkat 47 dari 137. Sementara untuk tahun 2018, GCI Indonesia sedikit lebih baik, mengalami kenaikan dua tingkat dengan menempati peringkat 45 dari 140 negara.

Kementerian Perindustrian terus mendorong terciptanya tenaga kerja Indonesia yang terampil sesuai kebutuhan pengembangan industri melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Salah satu upayanya adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai pemasok tenaga kerja terampil memiliki peran penting dalam kawasan itu. Oleh karenanya,

sesuai dengan nawacita yang telah dicanangkan oleh pemerintah, terutama nawacita kelima sampai dengan kedelapan yang secara ringkas berisi tentang keinginan untuk meningkatkan tiga kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, keinginan untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, keinginan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dan keinginan untuk melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional.

Pendidikan kejuruan menurut Evans (Lestari, 2019:1) adalah “bagian dari sistem pendidikan yang menyiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada suatu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya”. Pendidikan kejuruan (SMK) dan/atau vokasi dalam sistem pendidikan nasional diharapkan mampu mempersiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu bekerja secara profesional di bidangnya, sekaligus berdaya saing dalam dunia kerja, terutama dalam menghadapi tuntutan masyarakat ekonomi asia (MES). Pendidikan kejuruan yang disesuaikan dengan penyediaan lapangan kerja merupakan kebutuhan sangat mendasar dan pokok dalam proses pembangunan nasional Indonesia.

SMK merupakan lembaga pendidikan formal di bawah Direktorat Pembinaan SMK (DitpSMK) yang menyiapkan lulusannya untuk bekerja dengan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam bidang tertentu yang sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), serta diharapkan dapat berwirausaha. Hal ini tercantum dalam UUSPN Pasal 18 dan penjelasan Pasal 15 yang mengatur Pendidikan Menengah Kejuruan, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Pendidikan Nasional (RPJP Depdiknas) Tahun 2005-2025 SMK yang akan menjadi icon dalam perkembangan dunia pendidikan menengah di Indonesia. Beberapa strategi yang telah dilakukan

dalam menjawab tantangan tersebut, Direktorat Pembinaan SMK menyiapkan lulusan agar siap pakai. Strategi tersebut di antaranya adalah: merubah dan memperbaiki kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri, pemenuhan pengajar dalam waktu pendek, pemenuhan peralatan murah, dan implementasi industri perdagangan dan jasa Indonesia berbasis Kemitraan SMKindustri.

Perkembangan industri mampu membantu meningkatkan mutu siswa dan sekolah. Hal ini sesuai dengan prinsip pendidikan yang dijelaskan oleh Charles Prosser (1925) dalam Djojonegoro (1998, p. 38) bahwa terdapat 16 prinsip yang dapat dikemukakan dalam pendidikan kejuruan, dan di antaranya yang terkait dengan peran industri terdapat tiga prinsip pendidikan. Pendidikan kejuruan akan efektif jika, pertama, tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat, dan mesin yang sama seperti yang ditetapkan di tempat kerja. Kedua, melatih seseorang dalam kebiasaan berpikir, dan bekerja seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri. Ketiga kejuruan akan efisien jika lingkungan tempat siswa dilatih, merupakan replika lingkungan tempat nanti ia akan bekerja.

Berdasarkan PP 38/2007, terdapat beberapa prinsip NSPK yang dapat dijabarkan, yaitu serangkaian aturan yang merupakan kebijakan nasional, dapat berupa NSPK yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman untuk pemerintahan daerah. Pada pasal 9 ayat (1), dijelaskan bahwa penyelenggaraan yang dimaksud meliputi urusan wajib dan pilihan, serta penetapan untuk urusan sisa dijelaskan pada pasal 25 ayat (1). Dalam hal ini, penyelenggaraan tersebut merupakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintahan daerah. Urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah selambat-lambatnya satu tahun setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah ini. Urusan wajib dan pilihan yang dimaksud, menjadi dasar penyusunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

Peningkatan mutu dan relevansi lulusan SMK melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1992 telah mengeluarkan Keputusan Mendikbud Nomor 0490 Tahun 1992 tentang kerjasama SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang bertujuan meningkatkan kesesuaian program SMK dengan kebutuhan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dirumuskan kebijakan bersama antara Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dengan Nomor 0267a/U/1994 dan Nomor 84/KU/X/1994 tanggal 17 Oktober 1994 tentang pembentukan lembaga Kerjasama Tingkat Pusat yang disebut dengan Majelis Kejuruan Provinsi (MPKP) dan Tingkat Sekolah disebut Majelis Sekolah (MS). Dan untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut telah mengeluarkan Kepmendikbud Nomor 323 Tahun 1996 tentang penyelenggaraan pendidikan sistem ganda (PSG) yang didalamnya memuat kebijakan kemitraan SMK dan dunia usaha industri (Dudi) dalam rangka praktik industri, kebijakan tersebut tetap berlangsung walaupun terjadi perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi termasuk pengelolaan pendidikan.

Kebijakan kemitraan dalam lingkup pendidikan kejuruan dalam hal ini SMK, pada dasarnya melibatkan tiga komponen penting yaitu pihak majelis sekolah. Pihak DUDI yang akan memakai siswa dan pihak sekolah menengah kejuruan (SMK). Ketiga institusi itulah yang melaksanakan kemitraan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui mekanisme pendidikan sistem ganda (PSG), dalam hal ini praktik industri di dunia usaha industri. Kurang tercapainya sasaran kebijakan kemitraan SMK yang terjadi sebagai akibat tidak berjalannya mekanisme implementasi yang telah dirancang sebelumnya dapat dinyatakan sebagai terjadinya belum tercapainya kinerja implementasi. Hal tersebut mengindikasikan kurang sesuainya pencapaian hasil dengan rancangan implementasi yang ada. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu analisis yang

mendalam mengenai proses implementasi tersebut mulai dari awal hingga hasil dan dampak akhirnya.

Berbagai upaya dilakukan dalam meningkatkan kualitas atau mutu dari lulusan pendidikan kejuruan dengan penetapan kebijakan *link and match*, adanya kerjasama antara pihak sekolah khususnya pendidikan menengah kejuruan dengan DUDI dalam membina dan mengembangkan potensi peserta didik di lapangan. Hubungan yang sinergis sekolah dengan DUDI merupakan kondisi yang sangat membantu dalam upaya menciptakan proses yang benar-benar efektif bagi anak didik. Bekal keterampilan bagi anak didik adalah faktor utama yang menjadi prioritas program sekolah dan DUDI. Bekal keterampilan yang aplikatif adalah pembekalan yang terkait erat dengan kebutuhan masyarakat. Jika institusi sekolah dan DUDI memberikan pembekalan keterampilan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, lulusan sekolah dapat diserap secara maksimal oleh DUDI. Kondisi seperti inilah yang diharapkan dari proses pendidikan pembelajaran di sekolah kejuruan.

Salah satu model pengelolaan pendidikan kejuruan untuk memperbaiki kualitas pendidikan dapat dilaksanakan dengan pendekatan pengelolaan pendidikan berbasis industri/keunggulan wilayah, yaitu pengelolaan SMK dengan menginduksikan prinsip-prinsip kualitas yang diterapkan industri ke dalam proses pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki *hard skill* dan *soft skill* sesuai tuntutan kompetensi kerja yang dibutuhkan dunia industri. Pada hakekatnya, pengelolaan SMK sebagaimana dimaksud di atas adalah untuk memberikan layanan dalam rangka pemenuhan kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*), baik untuk peserta didik maupun dunia industri sebagai pengguna lulusan. Tentunya, pelayanan yang diberikan SMK kepada pelanggan harus bermutu sehingga dapat memuaskan dunia industri.

Untuk memenuhi standar pelayanan yang bermutu, maka SMK berkewajiban untuk senantiasa memelihara konsistensi dan berupaya meningkatkan mutu hasil pendidikan demi tercapainya tingkat kepuasan DUDI sebagai pelanggan. Jadi SMK dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik apabila kepuasan pelanggan internal (peserta didik, guru, tenaga kependidikan) dan pelanggan eksternal (DUDI), perguruan tinggi, dan termasuk orang tua peserta didik) telah terpenuhi. Sehubungan dengan hal tersebut, peluang kepada SMK untuk bereksplorasi menerapkan pembelajaran selaras dengan industri/keunggulan wilayah untuk menjawab perubahan paradigma tersebut.

Tiga wilayah yang menjadi pilihan dalam kajian ini memiliki potensi untuk mengembangkan pendidikan SMK yang lebih berkualitas. Ketiga wilayah tersebut yaitu Provinsi Jawa Barat, Bangka Belitung dan DKI Jakarta. Wilayah yang secara karakteristik masyarakat dan potensi yang dimiliki berbeda. Perbedaan inilah yang akan menghasilkan capaian yang berbeda pula dalam bentuk pengembangan karakteristik siswa, modul kurikulum, serta kemitraan antara pihak SMK dengan kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan oleh DUDI.

Salah satu dari lima wilayah di Propinsi Jawa Barat yang merupakan kawasan industri adalah Bekasi dengan memiliki banyak perusahaan. Di kawasan industry Bekasi terdapat lebih dari 75 perusahaan menjalankan produksinya. Secara keseluruhan menyerap ratusan ribu lapangan pekerjaan yang bisa terserap dari penduduk sekitar atau orang yang datang dari wilayah di luar Bekasi. Bekasi secara geografis juga merupakan kawasan penyanggah ibukota negara, sehingga industri yang berkembang memiliki keterkaitan dan harus terintegrasi dengan baik.

Selain juga karena semakin meningkatnya jumlah penduduk, secara jeli dilirik oleh pengusaha sektor properti. Maka pembangunan lokasi perumahan pun marak dilakukan sejak tahun 1980-an. Jauh sebelum Kota

Bekasi menjadi kota otonom. Bahkan, awal tahun 1990-an pun, gejala akan semakin padatnya Bekasi sudah terlihat dengan kian berkurangnya lahan pertanian dan perkebunan. Investor asing yang ingin menanam modal hanya tertarik di bidang perumahan atau industri. Tak ada yang melirik pertanian atau perkebunan. Seiring dengan perubahan yang terjadi, sayangnya, di Kota Bekasi tidak diimbangi penyediaan sumber daya manusia siap untuk digunakan dan memiliki kualitas yang memadai termasuk lulusan-lulusan dari SMK yang ada di Kota Bekasi.

Selain wilayah Jawa Barat dengan titik sentra Kota Bekasi, Provinsi Bangka Belitung adalah satu provinsi kepulauan yang merupakan provinsi pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 sebagai provinsi ke-31 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari enam kabupaten dan satu kota. Selama ini Kepulauan Bangka Belitung sangat identik dan dikenal sebagai pulau penghasil timah. Sebagai wilayah dengan sektor ekonomi utama pertambangan, permasalahan lingkungan menjadi isu utama yang selalu dihadapi oleh Kepulauan Bangka Belitung.

Pariwisata sebagai sektor yang lebih ramah lingkungan menjadi sektor alternatif dan unggulan bagi perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan, menggantikan sektor pertambangan, sekaligus diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Selain itu, pariwisata juga disiapkan menjadi alat dalam upaya pengembangan potensi wilayah secara berkelanjutan dan berdampak ekonomi signifikan.

Kebijakan dan strategi pengembangan sumber daya manusia dalam RIPPDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2007-2013 dipisahkan dari strategis kelembagaan kepariwisataan, tetapi karena dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata disebutkan bahwa aspek kelembagaan kepariwisataan juga mencakup sumber daya manusia, maka kajian terhadap keberadaan SMK sebagai

implementasi kebijakan sangat diperlukan agar siswa didik yang ada di SMK dapat diberdayakan setelah lulus sekolah. Kebijakan dan strategi kedua aspek ini sebagian juga merupakan kebijakan dan strategi pemberdayaan masyarakat dan sekaligus bentuk pengembangan dari sekolah-sekolah menengah kejuruan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan kepariwisataan tersebut adalah yang meliputi pengembangan SDM pariwisata yang berkualitas dan kompeten pada bidangnya; peningkatan peran SDM pariwisata sebagai ujung tombak pengembangan pariwisata Kepulauan Bangka Belitung; pemberdayaan masyarakat lokal sebagai subjek dalam pengembangan kegiatan pariwisata di daerahnya; koordinasi dan keterpaduan program antarlembaga dalam pengembangan pariwisata; pengembangan kemitraan dengan institusi dalam dan luar negeri serta antara institusi/lembaga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengembangkan kelembagaan perpajakan dan retribusi, serta pemasaran dan promosi; dan Mengembangkan sistem kelembagaan yang efektif untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.

1.2. Tujuan

1.2.1. Tujuan Umum

Program ini bertujuan secara umum untuk mengkaji perkembangan Kawasan Industri dalam peningkatan kompetensi keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

1.2.2. Tujuan Khusus

1. Membuat kajian NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) yang dapat dijadikan dasar Pengembangan SMK;

2. Membuat kajian yang dapat meningkatkan perkembangan Kawasan Industri dalam peningkatan kompetensi keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
3. Membuat kajian yang meningkatkan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi kepada Kegiatan SMK berbasis dunia kerja (experiential education/work-based learning/hand-on experience) dan produksi (production-based learning) dan menghasilkan barang jadi yang marketable;

1.3. Sasaran

Sasaran Program Penulisan Kajian NSPK (Norma Standar Prosedur Kriteria) ini adalah SMK Negeri dan Swasta di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Bangka Tengah. Kajian ini dibutuhkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pengembangan SMK agar dapat memenuhi kebutuhan SDM yang berketerampilan sesuai dengan kebutuhan industri setempat sebagai berikut.

1. Konsep Pendekatan Manajemen Berkelanjutan untuk sektor pengembangan kurikulum SMK agar mampu melahirkan lulusan yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan sektor industri setempat.
2. Terbangunnya konsep kemitraan antara SMK dengan pelaku industri yang dapat mengembangkan strategi pembangunan berkelanjutan.
3. Tersedianya lulusan SMK sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah setempat.
4. Pengembangan SMK unggulan dari aspek pemberdayaan lulusan SMK, aspek kelembagaan sekolah dan aspek sumber daya manusia.
5. Pengembangan SMK yang menciptakan SDM unggulan dan potensial yang terdiri dari program dan kegiatan, dilengkapi tahapan pelaksanaan, serta pemangku kepentingan yang menjadi penanggung jawab dan pendukung pelaksanaan program dan kegiatan NSPK.

BAB II

KERANGKA KONSEP DAN METODOLOGI

2.1. Kerangka Konsep

Rumusan arti pendidikan sangat bervariasi. Menurut Rupert Evans (1978), pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada satu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan kejuruan terdiri dari Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan.

Konsep keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) antara dunia pendidikan dan dunia kerja yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Wardiman Djojonegoro (1998) perlu dihidupkan lagi. Menurut beliau, *link and match* adalah penggalian kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja ke depan. Diharapkan paradigma orientasi pendidikan tidak lagi *supply minded* tapi lebih *demand minded* (kebutuhan pasar).

Terdapat tiga komponen yang harus bergerak untuk menyukseskan *link and match*. Pertama, sekolah. Peran sekolah merupakan keharusan dan syarat terpenting. Kreativitas dan kecerdasan pengelola perguruan tinggi menjadi faktor penentu bagi sukses tidaknya program tersebut. Ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan suatu sekolah, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menyukseskan program *Link and Match*. SMK mengetahui

kompetensi (keahlian) apa yang paling dibutuhkan dunia kerja dan kompetensi apa yang paling banyak dibutuhkan dunia kerja.

Kedua, dunia kerja (perusahaan). Keahlian (kompetensi) yang paling banyak dibutuhkan dunia kerja adalah kemampuan komputasi (komputer), berkomunikasi dalam bahasa Inggris, dan kemampuan akuntansi.

Ketiga, pemerintah. Pemerintah juga diuntungkan dengan berkurangnya beban pengangguran (terdidik). Karena itu, semestinya pemerintah secara serius juga menjaga iklim keterkaitan dan mekanisme implementasi ilmu dari perguruan tinggi ke dunia kerja sehingga diharapkan program *Link and Match* ini berjalan semakin baik dan semakin mampu membawa manfaat (maslahat) bagi semua pihak (perspektifglobal50.blogspot.com/2015/11/bab-ii-link-and-match-konseplink-and.htm).

Selanjutnya terdapat sedikitnya dua pendekatan dalam mewujudkan *link and match*. Pertama, pendekatan Sosial. Merupakan pendekatan yang didasarkan atas keperluan masyarakat pada saat ini. Pendekatan ini menitik beratkan pada tujuan pendidikan dan pada pemerataan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan (Husaini Usman, 2006: 56). Menurut A.W. Gurugen pendekatan sosial merupakan pendekatan tradisional bagi pembangunan pendidikan dengan menyediakan lembaga-lembaga dan fasilitas demi memenuhi tekanan tekanan untuk memasukan sekolah serta memungkinkan pemberian kesempatan kepada murid dan orang tua secara bebas.

Kedua, Pendekatan Ketenagakerjaan. Pendekatan ini dipakai dalam penyusunan perencanaan pendidikan suatu negara sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah yang sedang dilaksanakan. Karenanya wajar jika timbul pendekatan yang berbeda-beda antara beberapa negara dan juga terjadi perbedaan dalam pendekatan perencanaan antara berbagai periode pembangunan dalam satu negara. Dalam kebijakan pemerintah (sebut saja kebijakan lima tahunan), disana tergambar secara jelas harapan-harapan yang akan dan harus dipenuhi oleh sektor pendidikan. Dengan kata lain kebutuhan akan pendidikan yang akan menjadi

sasaran dalam perencanaan selalu dijadikan penuntun atau bisa dikatakan sebagai kebijakan awal perencanaan. Di dalam pendekatan ketenagakerjaan ini kegiatan-kegiatan pendidikan diarahkan kepada usaha untuk memenuhi kebutuhan nasional akan tenaga kerja pada tahap permulaan pembangunan tentu saja memerlukan banyak tenaga kerja dari segala tingkatan dan dalam berbagai jenis keahlian. Dalam keadaan ini kebanyakan negara mengharapkan supaya pendidikan mempersiapkan dan menghasilkan tenaga kerja yang terampil untuk pembangunan, baik dalam sektor pertanian, perdagangan, industri dan sebagainya (Jusuf Enoch, 1992: 90).

Ketiga, pendekatan lain yang digunakan yaitu pendekatan kemitraan. Menurut Beryl Lvinger dan Jean Mulroy (2004), ada empat jenis atau tipe kemitraan. Pertama, *potential partnership*. Pada jenis kemitraan ini pelaku kemitraan saling peduli satu sama lain tetapi belum bekerja bersama secara lebih dekat. Kedua, *nascent partnership*. Kemitraan ini pelaku kemitraan adalah partner tetapi efisiensi kemitraan tidak maksimal c. Ketiga, *Complementary Partnership*. Pada kemitraan ini, partner/mitra mendapat keuntungan dan penambahan pengaruh melalui perhatian yang besar pada ruang lingkup aktivitas yang tetap dan relatif terbatas seperti program delivery dan resource mobilization. Keempat, *Synergistic Partnership*. Kemitraan jenis ini memberikan mitra keuntungan dan pengaruh dengan masalah pengembangan sistemik melalui penambahan ruang lingkup aktivitas baru seperti advokasi dan penelitian.

Secara teoritis, Eisler dan Montuori (1997) membuat pernyataan yang berbunyi bahwa “memulai dengan mengakui dan memahami kemitraan pada diri sendiri dan orang lain, dan menemukan alternatif yang kreatif bagi pemikiran dan perilaku dominator merupakan langkah pertama ke arah membangun sebuah organisasi kemitraan.” Dewasa ini, gaya-gaya seperti perintah dan kontrol kurang dipercaya. Di dunia baru ini, yang dibicarakan orang adalah tentang karyawan yang “berdaya”, yang proaktif, karyawan yang berpengetahuan yang menambah nilai dengan menjadi agen perubahan.

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo (2003), kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.

Terdapat tiga prinsip kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing anggota kemitraan. Pertama, prinsip kesetaraan (*equity*) individu. Organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati. Kedua, prinsip keterbukaan. Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara golongan (mitra). Ketiga, prinsip azas manfaat bersama (*mutual benefit*). Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama.

Teori lain yang digunakan dalam kajian adalah teori tentang Karakteristik Pendidikan Kejuruan (Djojonegoro, 1998) adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan kejuruan diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja.
2. Pendidikan kejuruan didasarkan atas “demand-driven” (kebutuhan dunia kerja).
3. Fokus isi pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh dunia kerja.
4. Penilaian yang sesungguhnya terhadap kesuksesan siswa harus pada “hands-on” atau performa dalam dunia kerja.

5. Hubungan yang erat dengan dunia kerja merupakan kunci sukses pendidikan kejuruan.
6. Pendidikan kejuruan yang baik adalah responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi.
7. Pendidikan kejuruan lebih ditekankan pada “learning by doing” dan “hands-on experience”.
8. Pendidikan kejuruan memerlukan fasilitas yang mutakhir untuk praktik.
9. Pendidikan kejuruan memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar daripada pendidikan umum.

Prinsip-prinsip Pendidikan Kejuruan menurut Charles Prosser (1925) adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan di mana siswa dilatih merupakan replika lingkungan di mana nanti ia akan bekerja
2. Pendidikan kejuruan akan efektif hanya dapat diberikan di mana tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat, dan mesin yang sama seperti yang diterapkan di tempat kerja
3. Pendidikan kejuruan akan efektif jika dia melatih seseorang dalam kebiasaan berpikir dan bekerja seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri
4. Pendidikan kejuruan akan efektif jika dia dapat memampukan setiap individu memodali minatnya, pengetahuannya, dan keterampilannya pada tingkat yang paling tinggi
5. Pendidikan kejuruan yang efektif untuk setiap profesi, jabatan, atau pekerjaan hanya dapat diberikan kepada seseorang yang memerlukannya, yang menginginkannya, dan yang dapat untung darinya

6. Pendidikan kejuruan akan efektif jika pengalaman latihan untuk membentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berfikir yang benar diulangkan sehingga pas seperti yang diperlukan dalam pekerjaan nantinya
7. Pendidikan kejuruan akan efektif jika gurunya telah mempunyai pengalaman yang sukses dalam penerapan keterampilan dan pengetahuan pada operasi dan proses kerja yang akan dilakukan.
8. Pada setiap jabatan ada kemampuan minimum yang harus dipunyai oleh seseorang agar dia tetap dapat bekerja pada jabatan tersebut.
9. Pendidikan kejuruan harus memperhatikan permintaan pasar (memperhatikan tanda-tanda pasar kerja).
10. Proses pembinaan kebiasaan yang efektif pada siswa akan tercapai jika pelatihan diberikan pada pekerjaan yang nyata (pengalaman sarat nilai).
11. Sumber yang dapat dipercaya untuk mengetahui isi pelatihan pada suatu okupasi tertentu adalah pengalaman para ahli pada okupasi tersebut.
12. Setiap okupasi mempunyai ciri-ciri isi yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya.
13. Pendidikan kejuruan akan merupakan layanan sosial yang efisien jika sesuai dengan kebutuhan seseorang yang memang memerlukan dan memang paling efektif jika dilakukan lewat pengajaran kejuruan.
14. Pendidikan kejuruan akan efisien jika metode pengajaran yang digunakan dan hubungan pribadi dengan peserta didik mempertimbangkan sifat-sifat peserta didik tersebut.
15. Administrasi pendidikan kejuruan akan efisien jika dia luwes dan mengalir daripada kaku dan terstandar.
16. Pendidikan kejuruan memerlukan biaya tertentu dan jika tidak terpenuhi maka pendidikan kejuruan tidak boleh dipaksakan beroperasi

<https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/1869/konsep-pembelajaran-di-sekolah-menengah-kejuruan>: 2016).

2.2. Metodologi Penelitian

2.2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan gejala-gejala, realitas, atau fenomena kontemporer serta memberikan pemahaman (*understanding*) secara jelas mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala, realitas atau fenomena tersebut terjadi (Pawito 2007:36). Penelitian kualitatif merupakan usaha untuk mengungkapkan suatu masalah, keadaan, atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga hanya bersifat sekadar mengungkap fakta (*fact finding*).

Hasil penelitian ditekankan untuk memberikan gambaran obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Sementara ciri-ciri penelitian kualitatif yaitu mengkonstruksi realitas makna sosial budaya, meneliti interaksi peristiwa dan proses, melibatkan variabel-variabel yang kompleks, memiliki keterkaitan erat dengan konteks, melibatkan peneliti secara penuh, memiliki latar belakang ilmiah, menggunakan sampel purposive, menerapkan analisis induktif, mengutamakan makna di balik realitas dan mementingkan pertanyaan “mengapa” daripada ”apa” (Irawan 2007:7-12).

Penelitian kualitatif merupakan suatu proses pemahaman berdasarkan suatu tradisi tertentu. Creswell (Herdiansyah 2010:8) menyebut: “*Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, report detailed views of information, and conducts the study in a natural setting*”. Penelitian kualitatif menuntut pendekatan holistik, mendudukan obyek penelitian dalam suatu konstruksi ganda, melihat obyek dalam satu konteks natural bukan parsial (Rini 2014:129).

2.2.2 Lokasi Penelitian

1. SMK Jurusan Administrasi Perkantoran :
 - a. SMKN 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka
 - b. SMKN 1 Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah
 - c. SMK Muhammadiyah Bekasi
 - d. SMKN 1 Tambun Selatan
2. SMK Jurusan Pariwisata
 - a. SMK 1 Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah,
 - b. SMKN 3 Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka Tengah
 - c. SMKN 1 Tambun Selatan
3. Jurusan Broadcasting
 - a. SMKN 4 Bekasi
 - b. SMK 10 November Tambun Selatan

2.2.3 Teknik Pengumpulan Data

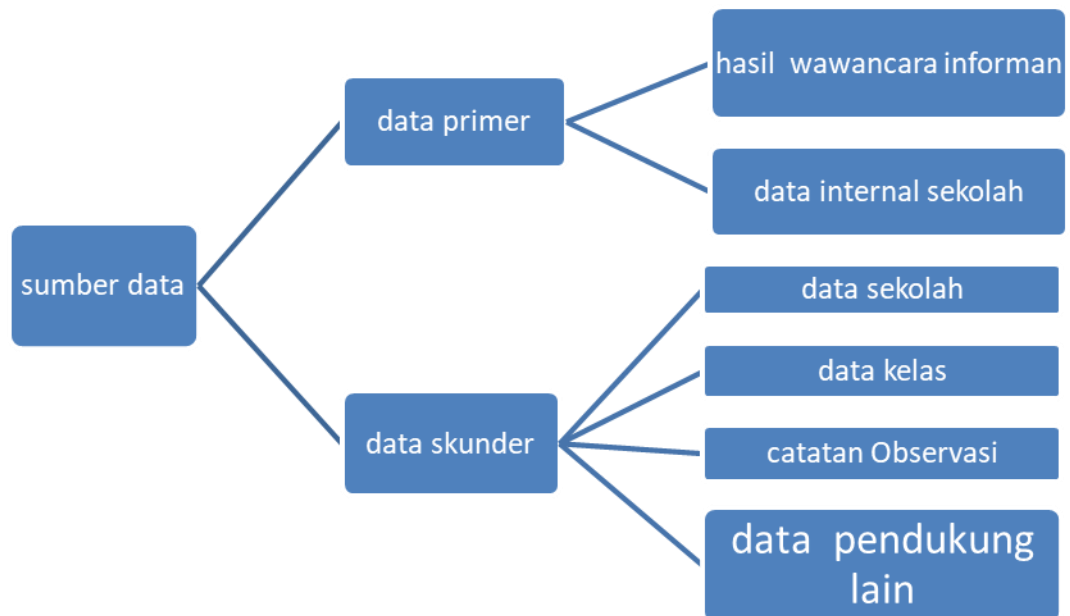
1. Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder serta didukung dengan pencatatan data. Sumber data primer diperoleh dari sumber informan pertama dalam penelitian ini, sumber informan yang dimaksud adalah Informan perempuan pemimpin daerah dari dinasti, Data tersebut berupa hasil wawancara mendalam terkait pemimpin daerah dalam meraih kepemimpinannya. Data primer diperoleh dalam penelitian ini berupa (1) catatan hasil wawancara mendalam, (2) rekaman suara hasil wawancara mendalam dan (3) data mengenai informan. Data sekunder yang sudah diolah disajikan oleh pihak pengumpul data primer dan data lainnya. Data sekunder berupa dokumen-dokumen yang terkait

dengan penelitian ini, berupa laporan ,rekaman kegiatan di lapangan (*audio* maupun *visual*).

Pencatatan data diperoleh peneliti selama melakukan pennenelitian direkam dalam recorder di kaset rekaman dan di telepon selular dan kemudia disalin dalam narasi tulisan yang diberi catatan khusus. Rekaman wawancara juga merupakan dokumentasi yang di tempatkan secara terbuka di hadapan informan dengan meminta ijin terlebih dahulu untuk melakukan perekaman. Data hasil penelitian yang diperoleh peneliti tersimpan dalam perangkat lunak yaitu *voice recorder*. Tahap selanjutnya peneliti akan melakukan transkripsi data semua hasil wawancara dari *software* ke bentuk tulisan. Data inilah yang pada akhirnya oleh peneliti dikategorisasikan untuk memperoleh hasil penelitian.

Sumber Data Penelitian



2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini berupaya memperoleh dan mengumpulkan data-data yang bersifat kualitatif. Patton (2003:4) menyebutkan bahwa pada dasarnya data dapat diperoleh melalui 3 jenis kategori yaitu: 1) *in depth, open ended interview*; 2) *participatiant observation*; and 3) *written documents*. teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara Mendalam (*in depth*).

Peneliti melakukan wawancara mendalam atau *in depth interview*, dengan mengajukan pertanyaan terbuka dengan panduan yang telah disiapkan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pengalaman yang dinyatakan dengan kata-kata mengenai persepsi, pendapat, perasaan dan pengetahuan subjek Mengadakan tanya jawab secara langsung kepada subjek informan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu link and match SMK dengan dunia usaha dan dunia industri.

b. Partisipan observasi

Peneliti melakukan pencatatan atas apa yang ada dan terjadi di lapangan. Data observasi berkenaan dengan pengalaman subjek yang diamati, terdiri dari deskripsi situasi dan tindakan-tindakan subjek dalam organisasi. Peneliti berperan sebagai observer atau pengamat. Ketika menjalin hubungan atau *building rapport* dengan subjek penelitian yaitu pemimpin perempuan, peneliti melakukan salah satu pendekatan dengan tingkat atau jenis partisipasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Patton (2003:312-313); "*often the best approach for gaining entrée is the "known sponsor approach", when employing this tactic, observer use the legitimacy and credibility of another person to establish their own legitimacy and credibility, for example, the director of an organiNation, for an organizational study, a local leader, and elected official.*

Peneliti melakukan pencatatan apa yang ada dan terjadi di lapangan. Data observasi ini berkenaan dengan pengalaman subjek yang diamati, terdiri dari deskripsi situasi dan tindakan-tindakan subjek serta organisasi perusahaan. Keadaan dilapangan memungkinkan, peneliti untuk menjadi partisipan dalam

kegiatan para informan secara lengkap, karena itu pengumpulan data observasi daripada sebagai partisipan.

Di lapangan, kedekatan peneliti dengan para informan dapat berada pada wilayah yang sama “*complet observer*” dan “*participant as observer*”. Akses memasuki lingkungan lapangan dilakukan peneliti terlebih dahulu melalui pendekatan informal dengan melakukan observasi. Pendekatan formal dengan para informan. Peneliti membangun hubungan secara tidak sengaja tetapi juga membangun hubungan pertemanan dengan informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tipe informasi untuk memperoleh data sekunder guna mendukung hasil penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengutip data yang tersedia dari sumber data. Disamping itu, data sekunder juga dapat diperoleh dengan cara menelaah dokumen-dokumen, peraturan perundangan, dan data tertulis lainnya yang relevan dengan masalah penelitian. Data yang didokumentasikan berupa berita terkait, rekaman visual dan audio visual.

d. Focus group discussion (FGD)

FGD merupakan suatu forum yang dibentuk untuk saling membagi informasi dan pengalaman di antara para peserta diskusi untuk membahas satu masalah yaitu SMK dengan dunia usaha dan industri. Selain itu, FGD dimaksudnya untuk bertujuan untuk membahas sekaligus meminta masukan terkait pembuatan pedoman peningkatan kompetensi SMK di kawasan ekonomi khusus dan kawasan ekonomi industri

Tabel

Data penelitian

Tipologi	Partisipan Observasi	Indepth Interview	FGD	Dokumen
Subjek penelitian:				
Kepala Sekolah	V	V		V
Informan:				
Guru		V	V	
Siswa		V	V	V
Dinas pariwisata			V	V
Dinas pendidikan			V	V
Dinas ketenagakerjaan			V	
Dunia Industri			V	

2.2.4. Teknik Pemilihan Informan

Informan ditentukan secara Purposif

1. Warga Sekolah tiap SMK

Kepala SMK; Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum; seorang Guru tiap kejuruan; Ketua Komite Sekolah; 1 Murid klas 12 SMK (sesuai kejuruannya), 3 Pengguna lulusan dan seorang Tokoh Masyarakat

2. Pihak Industri :

Direktur Perusahaan, Manager Kerjasama/Humas, Manager HRD, Manager Pengembangan Industry, dan Manager Operasional

3. Pemda

Kapala Dinas Pendidikan Menengah Propinsi, Kabid Perencanaan, Kabid Saprasi, Ka Dinas Perindustrian, dan Dinas terkait lainnya.

2.2.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja (Moleong, 2006:280).

Data di peroleh dari lapangan dianalisis melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap pertama, kategorisasi dan mereduksi data, yaitu melakukan pengumpulan terhadap informasi penting yang terkait dengan masalah penelitian.
2. Tahap kedua, data yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi, sehingga berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan masalah penelitian.
3. Tahap ketiga, melakukan interpretasi data yaitu menginterpretasikan apa yang telah diinterpretasikan nara sumber terhadap masalah yang diteliti.
4. Tahap keempat, pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga dapat memberi jawaban atas masalah penelitian.
5. Tahap kelima, melakukan verifikasi hasil analisa data dengan informan, yang didasarkan pada simpul tahap empat. Tahap ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan interpretasi dari hasil wawancara dengan sejumlah informan yang dapat mengaburkan makna persoalan sebenarnya dari fokus penelitian.

2.2.6. Uji Keabsahan Data

Peneliti menggunakan salah satu teknik keabsahan data atau triangulasi data. Triangulasi digunakan untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding dari data yang di peroleh.

2.2.7. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari program ini adalah :

1. Tersusunnya penulisan Kajian NSPK (Norma Standar, Prosedur, Kriteria) yang dapat mendukung program pengembangan SMK
2. Tersusunnya pedoman yang dapat mendukung program pengembangan Pendidikan Menengah Kejuruan

2.2.8. Keluaran Akhir

1. Buku Pedoman teknis sebagai hasil penyusunan Penulisan Kajian NSPK yang akan disebarluaskan oleh Direktorat Pembinaan SMK.
2. Penulisan Kajian NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) yang terdiri atas :

BAB III

PERTUMBUHAN KAWASAN INDUSTRI

3.1. Profil Lokasi Kajian

Sub bab ini menguraikan pertumbuhan kawasan industri di dua wilayah yang menjadi lokasi kajian, yaitu pertama, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi dan kedua, Kabupaten Pangkalpinang. Dua daerah yang disebut pertama lebih menggambarkan kawasan industri dalam pengertian sebagaimana Keputusan Presiden RI Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri sebagai kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana serta fasilitas penunjang lain yang disediakan serta dikelola oleh suatu perusahaan kawasan industri. Meskipun begitu, Kota Bekasi juga pengembangan industri yang fokus pada pengembangan sektor perumahan, sentral bisnis, dan rumah toko (ruko) untuk usaha, sebagai penopang utama kawasan industri yang berada di Kabupaten Bekasi. Sementara daerah yang disebut terakhir, lebih merepresentasikan sebagai kawasan industri dalam pengertian spesifik sebagai kawasan industri pariwisata.

Sebagai wilayah yang awalnya menjadi satu kesatuan bernama Kabupaten Bekasi, maka meskipun sekarang sudah menjadi dua daerah administrasi yang berbeda, yaitu Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi, namun dalam kajian ini pembahasannya masih tetap disatukan. Lulusan SMK di dua wilayah administrasi ini masih mengandalkan Kawasan Industri Bekasi sebagai incaran potensial untuk mendapatkan pekerjaan.

3.1.1. Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai merumuskan beberapa indikator ekonomi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) 2018 sebagai

upaya untuk meningkatkan ekonomi daerah. Informan dari pejabat Pemda setempat mengatakan bahwa terdapat sejumlah perubahan anggaran untuk mendukung berbagai program pembangunan manusia yang ditargetkan antara 71 persen hingga 71,54 persen disinergikan dengan kenaikan target indeks pendidikan dari sebesar 62,51 persen hingga 63,50 persen. Selain itu, pertumbuhan ekonomi akan didorong antara 5,5 persen sampai dengan 5,9 persen. Diharapkan investasi mencapai angka Rp. 315 triliun sampai dengan Rp. 335,3 triliun.

Besarnya investasi dapat digunakan untuk mendorong pembangunan masif yang mendatangkan pendapatan daerah. Salah satunya bisa dilakukan Pengembangan kota industri yang terintegrasi di Jawa Barat menjadi program utama pembangunan tersebut. Menurut Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jawa Barat saat ini memiliki kawasan industri yang tersebar di Kota dan Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta (BEKAPUR). Sebagaimana terlansir dalam Kemenperin.go.id, Indonesia memiliki 64 kawasan industri, namun yang menjadi favorit investor adalah kawasan Bekasi dan Karawang. Karena itu, wilayah ini diwacanakan menjadi Kawasan Industri Terpadu. Pengembangan kawasan ini dilakukan untuk mengintegrasikan kemudahan berbisnis dan berinvestasi di Indonesia sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Perindustrian (2018), terdapat sekitar 2.381,97 hektare (ha) lahan yang tengah dikembangkan menjadi sepuluh kawasan industri baru bertaraf nasional dan internasional di wilayah Jawa Barat. Untuk mendukung dan menunjang konektivitas kawasan industri di wilayah tersebut, Pemerintah pusat saat ini tengah membangun enam proyek infrastruktur strategis mulai dari Tol Susun Jakarta-Cikampek, Patimban Deep Port, Bandara Internasional Kertajati, Kereta Api Cepat Jakarta-Bekasi-Cikarang-Bandung, LRT Cawang-Bekasi Timur-Cikarang dan Automated People Mover (monorail), dan Tol Trans Jawa.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) dalam Koran Sindo menuturkan (Februari, 2018), mengatakan prospek properti di kabupaten Bekasi terdongkrak dengan pembangunan infrastruktur yang makin massif sehingga berpotensi untuk terus meroket dalam pengembangan kawasan industri. Kabupaten Bekasi, berpotensi menjadi kawasan industri yang besar di dunia karena memiliki economic base yang kuat dengan tiga kawasan industri besar, yakni Jababeka sekitar 5.000 hektare, Lippo Cikarang 3.000 hektare lebih, dan Delta Mas seluas 3.000 hektare. Pengembangan kawasan industri dilakukan guna menambah angka tenaga kerja aktif dari lulusan sekolah kejuruan dan universitas.

Kota Bekasi, pengembangan industri masih terfokus pada sektor pengembangan perumahan, sentral bisnis, dan rumah toko (ruko) untuk usaha. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) [Kota Bekasi](#), mengatakan, untuk pengembangan sektor industri di Kota Bekasi sudah tidak bisa lagi karena wilayah setempat sudah tak memiliki lahan yang cukup untuk mendirikan pabrik. Untuk pembangunan industri, difokuskan di Medansatria, Bantargebang, dan Bekasi Utara. Meski demikian, iklim investasi di [Kota Bekasi](#) terus merangkak setiap tahun. Bahkan realisasi investasi di Kota Patriot telah menembus Rp 17 triliun pada 2017. Principle Ray White Summarecon Bekasi, mengutarakan, poin penting yang menjadikan pasar properti di Bekasi kian dilirik banyak orang karena perkembangan infrastruktur yang makin jadi daya tariknya.

Perkembangan Kota Bekasi sebenarnya sudah terlihat semenjak masih menjadi bagian dari Kabupaten Bekasi. Indikasinya tampak dari laju pertumbuhan penduduk akibat migrasi dari daerah-daerah lain, serta adanya permukiman yang kian bertambah banyak. Daerah yang berada dalam lingkup megapolitan Jabotabek ini pun terus tumbuh menjadi kota besar. Bahkan dinilai sebagai kota besar urutan keempat yang berada di Provinsi Jawa Barat. Sampai kini, pertumbuhan kota Bekasi lebih menonjol pada sektor properti, khususnya perumahan. Namun demikian, kegiatan ekonominya justru didominasi oleh industri. Ada ratusan industri besar dan sedang yang mayoritas bergerak di sektor

pengolahan, tekstil, serta pembuatan barang dari logam mesin, beroperasi di Kota Bekasi.

Itulah gairah Kota Bekasi, menjadi kota pilihan sebagai kawasan industri dan tempat tinggal kaum urban. Sejumlah fakta pun telah banyak ditulis dan diperbincangkan sehubungan dengan itu. Salah satu kota satelit penyangga Jakarta ini ternyata dinilai cukup menarik oleh banyak kalangan. Lokasinya yang berada di sebelah timur Jakarta berbatasan dengan Jakarta Timur, lalu Kabupaten Bogor di selatan, dan Kota Depok di sebelah barat daya, menjadi sebuah keuntungan tersendiri. Dengan letak lokasi yang demikian, membuat Kota Patriot ini berada di persimpangan dan menjadi titik sejumlah pusat ekonomi.

Kota berpenduduk 2,6 juta jiwa ini memiliki luas wilayah 210,49 km². Dari luas itu, paling tidak separuhnya sudah efektif sebagai kawasan perkotaan. Perkembangan kotanya sekitar 90 persen didominasi kawasan perumahan. Sedangkan kawasan industrinya menempati 4 persen wilayahnya, 3 persen untuk perdagangan, dan sisanya bangunan lain.

Banyak pakar properti dan pengusaha yang memberikan pandangannya tentang Bekasi sebagai salah satu kota dengan potensi terbaik di Jabodetabek. Dari catatan mereka, meski hanya menempati sebagian wilayahnya, namun di Kota Bekasi menarik sebagai lokasi pengembangan perindustrian. Tak ayal, pesatnya sektor industri pun membuat Kota Bekasi menjadi basis industri nasional yang banyak menyerap tenaga kerja. Kontribusi perekonomiannya berada pada level nasional. Kawasan industri Cikarang dan Jababeka saja, sudah menjadi rumah bagi pabrik-pabrik merek ternama, seperti Bridgestone, Honda, Coca-Cola, Danone Unilever, atau juga Panasonic.

Selain industri, banyak investor yang juga memilih Kota Bekasi untuk mengembangkan kawasan hunian. Banyak kawasan hunian terpadu yang dibangun oleh pengembang berskala nasional, seperti Gunas Land, Sumarecon, Agung Sedayu, Lippo, hingga Adhi Karya, dan lainnya. Bahkan, Bekasi belakangan juga marak dengan pembangunan apartemen dengan beragam segmen,

mulai dari pekerja asing hingga karyawan industri. Pertumbuhan industri serta kawasan hunian, sebenarnya telah mengindikasikan potensi kota tersebut. Menurut Walikota Bekasi, visi menjual jasa dan perdagangan sebenarnya telah digariskan sejak tahun 2009. Dengan pembangunan di sektor itu, ia pun menargetkan Kota Bekasi bisa menyerap 50.000 tenaga kerja hingga selama 2018.

Dengan perkembangan yang kian hari terus melaju itu, sudah pasti Kota Bekasi menjadi kota yang padat dan super sibuk. Karena itulah, kini pemerintah setempat sendiri mengebut pembangunan infrastruktur. Tak lain, tujuannya agar pembangunan lebih merata di 12 kecamatan dan 56 kelurahan hingga perekonomian pun bisa semakin hidup di sana. Sejak 2016 sampai sekarang, skala prioritas pembangunan Kota Bekasi adalah infrastruktur serta utilitas. Sebanyak 60 persen APBD dialokasikan untuk penyediaan sarana dan prasarana publik yang bisa langsung menyentuh dan dinikmati masyarakat.

3.1.2. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kondisi Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung triwulan III-2018 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp18.664 miliar dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp13.385 miliar. Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung triwulan III-2018 dibanding triwulan III-2017 (y-on-y) tumbuh sebesar 7,09 persen mengalami peningkatan bila dibandingkan pertumbuhan triwulan II-2018 sebesar 4,50 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha kecuali lapangan usaha Pengadaan Air yang mengalami kontraksi. Pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 12,20 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 13,00 persen.

Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung triwulan III-2018 terhadap triwulan sebelumnya (q-to-q) tumbuh sebesar 2,37 persen, melambat dibanding triwulan II-2018 yang sebesar 3,46 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai

lapangan usaha Jasa Keuangan sebesar 5,64 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran pada komponen Perubahan Inventori sebesar 13,79 persen.

Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan triwulan III-2018 (c-to-c) tumbuh 4,72 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha kecuali lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian serta Pengadaan Air yang mengalami kontraksi masing-masing sebesar 2,91 persen dan 3,96 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan secara c-to-c didorong oleh seluruh komponen kecuali Perubahan Inventori yang berkontraksi sebesar 7,21 persen.

Total PDRB ADHB Pulau Sumatera pada triwulan III-2018 mencapai Rp 835.778 miliar atau sekitar 21,53 persen dari total PDRB 34 Provinsi di Indonesia, sedangkan PDRB ADHK Pulau Sumatera pada triwulan III-2018 mencapai Rp570.382 miliar. Pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera sebesar 3,18 persen (q-to-q), 4,72 persen (y-on-y), dan 4,58 persen (c-to-c). Sementara PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya memberikan kontribusi sebesar 2,23 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera dan 0,48 persen terhadap total PDRB 34 provinsi di Indonesia.

Sementara itu menurut persepsi masyarakat Kondisi Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan III 2018 Menurun. (<https://pangkalpinangkota.bps.go.id/pressrelease/2018/11/06/227/menurut-persepsi-konsumen--kondisi-ekonomi-kondisi-kepulauan-bangka-belitung-triwulan-iii-2018-menurun.html>)

Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Kepulauan Bangka Belitung pada Triwulan III-2018 sebesar 97,03. Ini berarti, pada triwulan III-2018 kondisi ekonomi menurut persepsi konsumen menurun dibandingkan Triwulan II-2018. Menurunnya persepsi kondisi ekonomi konsumen pada Triwulan III 2018 dipengaruhi oleh variabel pembentuk ITK, yaitu penurunan pada Pendapatan Rumah Tangga dengan nilai indeks sebesar 94,27 dan Pengaruh Inflasi terhadap tingkat konsumsi dengan

nilai indek sebesar 96,16. Sementara itu, Volume Konsumsi menunjukkan peningkatan yang tidak terlalu signifikan dengan nilai indeks sebesar 104,72.

Nilai ITK Kepulauan Bangka Belitung pada Triwulan IV-2018 diperkirakan sebesar 93,78. Menurut persepsi konsumen, mereka masih pesimis dengan kondisi ekonomi triwulan yang akan datang. Indeks Pendapatan Mendatang diperkirakan mencapai 101,34. Konsumen optimis jika pendapatannya pada triwulan IV-2018 akan lebih baik dibandingkan triwulan III-2018. Akan tetapi, konsumen belum berencana melakukan pembelian barang tahan lama, berekreasi ataupun menyelenggarakan pesta/hajatan. Nilai Indeks Rencana Pembelian Barang Tahan Lama, Rekreasi dan Pesta/Hajatan berada di bawah 100, yaitu sebesar 80,53.

Total PDRB ADHB Pulau Sumatera pada triwulan III-2018 mencapai Rp835.778 miliar atau sekitar 21,53 persen dari total PDRB 34 Provinsi di Indonesia, sedangkan PDRB ADHK Pulau Sumatera pada triwulan III-2018 mencapai Rp570.382 miliar. Pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera sebesar 3,18 persen (q-to-q), 4,72 persen (y-on-y), dan 4,58 persen (c-to-c). Sementara PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya memberikan kontribusi sebesar 2,23 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera dan 0,48 persen terhadap total PDRB 34 provinsi di Indonesia.

3.2. Industri dan Pariwisata di Lokasi Penelitian

Kajian ini mengkaji tentang Perkembangan Kawasan Industri dalam Peningkatan Kompetensi Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka di bawah ini akan diuraikan kondisi dua daerah yang menjadi lokasi kajian, yaitu Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi terkait dengan kawasan industry dan Kabupaten Pangkal Pinang terkait dengan Kawasan Pariwisata.

3.2.1. Kawasan Industri di Kabupaten dan Kota Bekasi

Bekasi merupakan salah satu pusat industri nasional dimana nilai ekspornya mampu bersaing dengan Batam. Kawasan Industri di Bekasi merupakan kawasan

industri yang potensial mengingat sekitar 2.125 unit pabrik yang berasal dari 25 negara berlokasi di kawasan tersebut.

Karena besarnya nilai dan volume ekspor dari kawasan ini telah muncul wacana pembangunan bandara baru di sekitar Bekasi untuk mengakomodasi arus cargo barang. Akses jalan tol dari Cikarang ke Bandara Sukarno-Hatta sudah terlalu padat sehingga mengganggu kelancaran cargo akibat seringnya terjadi kemacetan. Selain itu Pemda Kabupaten Bekasi juga sudah mulai melakukan studi kelayakan pembangunan pelabuhan di Bekasi Utara, Babelan. Pelabuhan Internasional Bekasi dirancang untuk bisa disandari kapal besar (mother vessel) dengan panjang hingga 300 meter.

Cikarang adalah sebuah kota di Kabupaten Bekasi yang terletak 34 km sebelah timur Jakarta. Cikarang yang dikenal sebagai Kota industri terbesar di Asia Tenggara membuka peluang bagi investor untuk berlomba-lomba menanamkan modalnya di sana.

Saat ini Cikarang telah menjadi salah satu pusat industri nasional yang nilai ekspornya mampu bersaing dengan Batam. Kawasan Industri di Cikarang merupakan kawasan industri yang potensial mengingat sekitar 2.125 unit pabrik dari 25 negara berlokasi di kawasan tersebut.

Tak heran Cikarang saat ini mampu menyumbang sedikitnya sebesar 34,46% Penanaman Modal Asing Nasional, serta 22-45% volume ekspor nasional. Pada 2008 omzet kawasan industri ini mencapai USD 35 miliar dan 70% di antaranya untuk pasar ekspor.

Tercatat tujuh kawasan industri sudah berada di Cikarang, antara lain kawasan industri MM2100, Delta Silicon I, EJIP, BIIE, Jababeka I, Jababeka II, dan Delta Silicon II. Kawasan industri di kota Delta Mas dan Delta Silicon II yang berada di bawah grup Lippo.

Keberadaan kawasan-kawasan industri tersebut secara tidak langsung memantik permintaan akan tempat tinggal yang aman serta strategis bagi ratusan ribu

karyawan di dalamnya. Selain di kawasan Kota Bekasi, berdiri bejubun kondominium atau apartemen dan tempat tinggal lainnya, sekarang sebagian kawasan di Kabupaten Bekasi juga sudah berdiri begitu banyak perumahan dan apartemen. Terbaru, belum lama Group Lippo tengah sukses menggelar *grand launching* Meikarta di MaxxBBox Cikarang, Jalan Boulevard Utara kawasan Lippo Cikarang, tepat di Hari Kemerdekaan Indonesia pada Kamis (17/8/2017). Meskipun proses pendiriannya bermasalah, terutama yang berkenaan dengan penguasaan lahan, yang terbukti berhasil menyeret Bupati Bekasi Neneng Hasanah dan beberapa yang lainnya masuk penjara, pembangunan kawasan Meikarta tetap saja berjalan.

Diresmikannya Meikarta ini diharapkan akan menjadi solusi untuk mengurangi beban kota Jakarta dalam banyak aspek, seperti kepadatan lalu lintas, pergerakan manusia, tata ruang, dan sebagai pusat ekonomi baru. Lahirnya Meikarta diharapkan mampu mengurangi beban lalu lintas transportasi Jakarta dan sekitarnya.

Konsep kota baru ini bertujuan agar ke depannya kegiatan bisa dialihkan dari Jakarta ke Meikarta. Masyarakat tidak lagi harus menempuh jarak terlalu jauh karena di Meikarta sudah lengkap fasilitasnya. Kota baru itu pasti akan menurunkan beban Jabodetabek. Sudah saatnya mobilitas Jakarta berpindah ke Meikarta.

Selain Jakarta, Meikarta juga berpotensi mengurangi beban Bandung, karena Meikarta dilewati lintasan rel kereta cepat Jakarta-Bandung, kereta layang LRT dan MRT, pelabuhan laut dalam Patimban, bandara Internasional Kertajati dan toll Jakarta – Cikampek elevated. Pembangunan kota modern baru berskala internasional Meikarta dengan investasi Rp 278 triliun ini pun bakal menjadi kota raksasa modern dan terlengkap di Asia Tenggara dan akan menyerupai Shenzhen Tiongkok.

Selain Meikarta, terdapat beberapa kawasan industri yang telah terlebih dulu hadir, yaitu Kawasan Industri MM2100.



MM2100 Industrial Town adalah kawasan industri terintegrasi yang dikembangkan oleh PT. Megalopolis Manunggal Industrial Development (MMID), didirikan pada tahun 1990 oleh dua perusahaan: Marubeni Corporation Jepang dan Manunggal Group Indonesia. Dengan lebih dari 170 manufaktur dan perusahaan pendukung, MM2100 Industrial Town adalah salah satu kawasan industri nilai terbaik di Indonesia.

MM2100 Industrial Town melakukan pengembangan wilayah seluas 805 ha dan dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu Tahap I: 240 ha dan Tahap II: 120 ha Sold Out serta Tahap III: 445 ha.

Berikutnya Kawasan Industri JABABEKA. Kawasan ini merupakan kawasan eko-industri modern pertama di Indonesia yang dikembangkan bersama-sama dengan ProLH GTZ di bawah program kerjasama teknis yang dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia dan Republik Jerman. Proyek ini mencakup 1.570 hektar dan berisi lebih dari 1.400 perusahaan lokal dan multinasional dari 29 negara, seperti Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Inggris, Yang lain Belanda, Australia, Korea, Singapura, Taiwan, Malaysia, dan masih banyak lagi.

Kawasan ini menawarkan solusi pembangunan industri yang komprehensif dan bermanfaat untuk hampir semua jenis perusahaan. Salah satu yang termasuk di dalamnya adalah tanah dan bangunan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pabrik. Pabrik yang dirancang secara estetis serta dapat digunakan untuk berbagai

keperluan membuat unit-unit ini menjadi pilihan bagi para wirausahawan dan juga para perusahaan besar. Fasilitas seperti bangunan pabrik, bangunan three-in-one, bangunan pendukung, gedung R & B, bangunan Hom & Bizz, gudang modern dan bangunan industri yang dapat diubah sesuai kebutuhan. Semua bangunan menawarkan fleksibilitas dan pemanfaatan ruang yang maksimal.

Terletak 35km dari pusat bisnis Jakarta, 55km dari pelabuhan Tanjung Priok dan 65km dari Bandara Internasional Soekarno Hatta, Kota Jababeka - Cikarang mudah diakses melalui jalan tol. Sebuah infrastruktur yang sangat efisien dan komprehensif mendukung berbagai fasilitas dan fitur dalam zona perkebunan.



Selanjutnya East Jakarta Industrial Park. Kawasan ini terletak di dua kecamatan yaitu Kecamatan Cikarang Selatan dan Kecamatan Cikarang Utara. Berdasar pada data terhimpun dari berbagai sumber sekunder mayoritas industri yang berlokasi di East Jakarta Industrial Park adalah industri elektronik. Salah satu industri elektronik besar yang ada di kawasan ini adalah grup Sanyo.

Terdapat pula Kawasan Industri Hyundai. Kawasan ini adalah kawasan industri hasil kerjasama antara PT. Hyundai Inti Development dengan PT. Lippo Cikarang. PT. Hyundai Inti sendiri adalah perusahaan bermodal asing (Hyundai Corporate) yang bertujuan untuk menciptakan kawasan industri berteknologi tinggi dan berinfrastruktur lengkap dalam rangka untuk mendukung perusahaan-perusahaan asal Korea. Perusahaan-perusahaan Korea tersebut mendirikan pabrik dan berbasis di wilayah ini untuk memperluas jangkauan bisnis dengan pasarnya di wilayah Asia Tenggara. Kawasan ini berdiri di lahan seluas 200 Ha dan mulai pembangunan pada tahun 1991.

Dan masih banyak kawasan-kawasan yang lain di Bekasi dalam skala yang lebih kecil.



3.2.2. Kawasan Pariwisata di Pangkal Pinang

Berbeda dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi yang banyak dihuni Kawasan industri, Kabupaten Pangkal Pinang justru banyak dihuni oleh kawasan pariwisata. Salah satunya adalah Pantai Pasir Padi yang berjarak 7 km dari Kota Pangkalpinang, Pantai Pasir Padi ini menghadap ke arah Laut Cina Selatan dan memiliki ombak laut yang tenang. Tak heran jika banyak wisatawan yang datang memilih untuk berenang atau sekadar berjemur. Pantai Pasir Padi Pantai Indah Kota Madya Pangkal Pinang. Ada yang unik ketika para wisatawan melihat pantai yang semakin surut itu. Ternyata surutnya air pantai membuat wisatawan bisa berada hampir di bagian dalam bibir pantai. Indah sekali mungkin itu yang keluar

dari kata para wisatawan yang berkunjung dipantai pasir padi seperti sedang berada di satu pulau kecil, pinggir pantai. Jangankan wisatawan, saat surut mobil juga bisa masuk dan berjalan di bibir pantai. Banyak objek wisata menarik yang menjadi tujuan tour favorit wisatawan yang berkunjung ke kota ini.

Sebagai kota utama di Bangka Belitung, Pangkalpinang bisa Anda nikmati dengan melakukan city tour. Tidak dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk sekedar berkeliling mengetahui seluk-beluk kota yang sedang berkembang ini. Setelah tiba di Bandara Depati Amir, Anda bisa langsung meluncur ke pusat kota atau berkeliling sejenak melewati kompleks perkantoran pemerintah provinsi Bangka Belitung.

Sebagai gerbang utama Kepulauan Bangka Belitung, banyak tempat shopping yang bisa Anda pilih untuk mencari barang-barang khas dari daerah ini. Anda dapat berbelanja di pasar modern Bangka Trade Center (BTC), yang cantik dan bersih. Sedangkan untuk souvenir shop Anda tak perlu khawatir, karena tokok-toko souvenir dan oleh-oleh khas Bangka Belitung hampir semuanya tersedia di sepanjang kawasan strategis kota.

Kerajinan Kain Cual atau dikenal juga sebagai batik cual, adalah kain khas Bangka Belitung. Museum Timah yang terletak kota Pangkalpinang ini adalah satu-satunya museum timah terbesar di Indonesia. Mesum Timah Indonesia ini terletak persis di Jantung kota, tepatnya di Jalan Jenderal Achmad Yani No. 17, Pangkalpinang. Museum ini menyimpan beragam koleksi besar benda-benda terkait tambang timah dan merupakan satu-satunya museum pertambangan di Asia. Tempat wisata bangunan museum ini adalah bangunan bersejarah, karena pernah digunakan sebagai tempat Perundingan Roem-Royen.

Tai fu sui adalah minuman khas Bangka yang sangat populer khususnya di wilayah kota Pangkalpinang. Oleh masyarakat Bangka, minuman ini sering disebut 'fu sui'. Sebetulnya Fu Sui merupakan minuman yang diolah dengan bahan utama kacang kedelai. Sekilas minuman ini hampir sama dengan susu

kedelai yang biasa di jajakan di pulau Jawa. Hanya saja Tai fu sui di Bangka punya cita rasa yang khas.

Kuliner khas Bangka yang satu ini bisa anda temukan dengan mudah di seputar alun-alun kota Pangkalpinang. Para penggemar tai fu sui biasanya menyebut aktifitas meminum fu sui dengan istilah 'Musoi'. Nah, Musoi akan terasa semakin beda jika dilakukan beramai-ramai dengan teman atau keluarga sembari ngobrol santai plus ditemani makan otak-otak dan aneka jajanan ringan khas Bangka lainnya.

Tai Fu Sui (susu kedelai) adalah minuman khas bergizi, terbuat dari kacang kedelai murni. Tai biasanya dibuat oleh masyarakat keturunan Cina namun ada juga masyarakat Melayu. Kuliner khas Bangka yang satu ini biasanya dijual pada pagi hari dan juga pada malam hari. Sekarang Tai Fu Sui banyak dikreasikan oleh masyarakat dengan berbagai rasa terutama rasa buah-buahan. Berikut resep bahan yang diperlukan untuk membuat Tai Fu Sui: Kacang Kedelai Air Dan beginilah cara membuat minuman khas Bangka Tai Fu Sui Bersihkan kacang kedelai dari kulitnya dan dicuci bersih. Rendam kedelai beberapa saat kemudian blender kedelai sampai halus. Saring Selanjutnya rebus dengan api sedang bersama air Setelah mendidih diangkat. Tai Fu Sui dapat disajikan. Namun jika ingin mengkreasikan cita rasa buah-buahan bisa dimasukan buah-buahan yang telah dipotong sesuai selera dan masukan ke air yang mendidih tersebut sampai masak. Bisa ditambah gula. Dapat dihidangkan panas atau dingin.

Selain yang disebut di atas, Pangkal Pinang masih memiliki tempat wisata lain berupa kuliner makanan otak otak Bangka. Ada dua macam yakni otak otak daging ikan berwarna putih dan warna coklat yang terdiri dari kulit dan daging ikan yang masih segar jadi antara daging dan kulit ikan tenggiri dipisahkan sehingga warna coklat itu berasal dari warna kulit ikan tenggiri. Otak otak Bangka dimakan menggunakan sambal atau saus, ada tiga macam disajikan sambal biasanya saus sambal asam, saus sambal biasa dan saus sambal terasi dengan jeruk nipis yang hanya terdapat di Bangka dan biasanya para travelling dan wisatawan

lebih suka menggunakan sambal tauco yang sangat menggugah selera, otak otak bangka kecil mungil tapi menggigit rasa ikannya, namun proses pembuatan otak otak bangka jauh berbeda dengan empek empek karena otak otak bangka di bungkus dengan daun pisang kemudian dibakar sehingga rasa ikannya masih terasa karena tidak dilakukan dengan proses penggorengan menggunakan minyak goreng, otak otak bangka kecil mungil tapi menggigit rasa ikannya.

Selain pantai dan makanan, Pangkal Pinang juga memiliki destinasi wisata lainnya. Museum Timah menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Bangka Belitung, khususnya masyarakat Pangkalpinang merupakan satu-satunya museum yang ada di Indonesia, bahkan di Asia. Seperti diketahui, Bangka Belitung memiliki banyak obyek wisata berupa pantai yang menjadi favorite para wisatawan. Namun hal tersebut tidak lantas menjadikan museum ini sepi pengunjung. Justru Museum Timah ini merupakan objek wisata favorit selain berbagai pantai yang terdapat di Pangkalpinang.

Dahulu bangunan museum ini merupakan tempat tinggal para karyawan Bangka Tin Winning (BTW). Pernah pula digunakan sebagai tempat diadakannya Perjanjian Roem-Royen. Sebuah perjanjian antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 7 Mei 1949. Pada waktu itu delegasi Indonesia diwakili oleh Mr. Moh. Roem, sedangkan delegasi Belanda diwakili oleh H.J. Van Royen. Hasil perjanjian tersebut hingga kini masih tersimpan dengan rapi di museum ini sebagai bukti sejarah Indonesia.

Guna mendukung sektor pariwisata religi keberadaan Masjid Jamik, yang terletak di jalan Masjid Jamik, merupakan salah satu masjid terbesar dan tertua di Pangkal Pinang. Masjid Jamik dibangun pada tanggal 3 Syawal 1355 H atau bertepatan dengan 18 Desember 1936 M yang dibuktikan dari tulisan yang masih dapat dilihat pada meja putih terbuat dari marmer, yang letaknya bergeser ke barat pekarangan depan masjid sekarang.

Masjid dibangun oleh masyarakat Kampung Dalam Pangkalpinang yang merupakan masyarakat asli Kampung Tuatunu yang pindah karena perbedaan

paham dan khilafiah. Salah satu keunikan masjid ini adalah antara tetangga depan (berbentuk setengah lingkaran) dengan atapnya dihiasi oleh tiang penyangga (ukuran kecil) berjumlah 5 tiang, bisa diartikan sebagai Rukun Islam dan antara tembok depan dengan atapnya dihiasi oleh tiang penyangga kecil sebanyak 6 buah (3 sebelah kanan dan 3 sebelah kiri), dapat diartikan Rukun Iman. Memiliki empat tiang utama sesuai jumlah Khalifatul Rasyidin, lima pintu masuk 3 di depan dan 1 di samping kiri dan 1 kanan serta terdiri atas 3 undakan (tingkatan) dengan satu kubah dan empat menara. Masjid Jamik adalah Benda Cagar Budaya Kota Pangkalpinang.

Selain Masjid Jamik, Kelenteng Kwan Tie Miaw merupakan salah satu kelenteng tertua yang ada di Pulau Bangka, dan ini juga termasuk destinasi wisata di Pangkal Pinang. Kelenteng ini terletak di Jalan Mayor Muhidin, Pangkalpinang. Dulunya bernama kelenteng Kwan Tie Bio. Kelenteng ini diperkirakan dibuat pada tahun 1841 Masehi (dari aksara cina pada sebuah Lonceng besi di kelenteng). Pembangunannya sendiri dilakukan secara gotong royong oleh berbagai kelompok Kongsi penambangan timah yang ada di Pangkalpinang, dan diresmikan pada tahun 1846.

Pada Kelenteng tertua di Pangkalpinang ini terdapat hiasan Buah Labu (Gourd) di puncak atap kelenteng dan adanya lambang Patkwa (Pakua) di depan kelenteng yang di tengahnya ada lingkaran hitam putih (Ying dan Yang), Patkwa (Pakua) melambangkan keberuntungan, rejeki atau kebahagiaan. Nama kelenteng sudah dua kali mengalami perubahan, pada masa Orde Baru kelenteng ini bernama Amal Bhakti. Pada tahun 1986 bagian depan kelenteng terkena pelebaran jalan sehingga pekarangan depan, pintu serta tembok depan mundur beberapa meter, bagian altar Kuan Tie tetap utuh dan bagian depan dibangun menjadi dua lantai. Pada Tanggal 22 Februari 1998 terjadi kebakaran yang menghancurkan seluruh bangunan kelenteng kecuali pada bagian kiri bangunan, sejak itu dilakukanlah pemugaran kembali dipimpin oleh Jamal seorang ahli dalam kelenteng dan pembuatan patung dan rehabilitasi selesai seperti bentuk sekarang serta diresmikan pada tanggal 5 Agustus 1999 dengan nama kelenteng Kwan Tie Miao.

Kawasan Kelenteng Kwan Tie Miaw ini sekarang ditambah dengan lokasi Gang Singapur dan Pasar Mambo sedang dikondisikan sebagai salah satu objek dan daya tarik wisata Kota Pangkalpinang yaitu wisata budaya, wisata belanja dan wisata kuliner. Lokasi ini diupayakan menjadi China Town (untuk mengingatkan kepada wajah kota lama Pangkalpinang yang sangat dipengaruhi oleh rumah rumah dan kelenteng Cina) dan dijadikan juga sebagai pusat upacara peringatan hari Raya Imlek, puncak hari raya Cap Go Meh, kegiatan Sembahyang Rebut dan kegiatan Pot Ngin Bun. Kegiatan Pot Ngin Bun merupakan satu satunya ritual yang ada di kelenteng Kwan Tie Miaw. Kegiatan ini dilakukan untuk menolak bala dan segala wabah penyakit yang mewabah di Masyarakat seperti wabah Beriberi yang mewabah di Bangka sekitar tahun 1850-1860.

Terdapat juga GPIB Maranatha. Gereja ini awalnya bernama Kerkeraad der Protestansche Gemeente to Pangkalpinang. Dibangun pada masa pemerintahan Residen J.E. Eddie pada tahun 1927, bersamaan dengan pembangunan menara air di Bukit Mangkol. Setelah masa kemerdekaan, melalui Indische Kerk (GPI), nama gereja diubah menjadi Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB) Maranatha Pangkalpinang. Pemerintah Belanda menempatkan seorang pendeta pertama kali bernama J.N. Beiger untuk melayani dan mengurus jemaat GPIB Maranatha Pangkalpinang.

Bangunan gereja memiliki ciri unik dan menarik karena terdapat menara jam yang besar. Di lingkungan gereja dibangun pula Pastori (rumah pendeta). Bangunan terbuat dari beton dengan atap berbentuk limas, dinding dari bata yang dilapisi batu granit. Dinding bagian depan berbentuk segitiga di atasnya terdapat Salib. Bangunan terdiri dari satu bangunan inti dan dua bangunan pendukung pada bagian kanan dan belakang. Pada bangunan tengah (ruang utama/inti), atapnya terdapat menara yang di atasnya terdapat Salib.

Terdapat pula beberapa wisata budaya. Sebagai bagian dari rentang dan rumpun tanah Melayu, Pangkal Pinang memiliki beragam adat istiadat dan budaya.

Keanekaragaman etnis dari berbagai nusantara membentuk budaya yang unik dan menarik, serta kesenian tradisional yang terus berkembang pesat.

Nganggung, merupakan tradisi gotong royong masyarakat Kota Pangkalpinang dengan membawa makanan lengkap diatas dulang kuningan yang ditutup dengan tudung saji, Tiap pintu rumah (keluarga) membawa satu dulang yang terbuat dari Kuningan, berisi makanan sesuai dengan status dan kemampuan keluarga tersebut.

Tradisi Nganggung sering juga disebut dengan adat Sepintu Sedulang. Tradisi ini biasanya dilakukan pada upacara upacara keagamaan, seperti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Mauludan, Nisfu Sya'ban, dan pada kegiatan Muharram. Kegiatan Ngganggung biasanyan dilakukan di Masjid dan di Kota Pangkalpinang sering dilaksanakan Nganggung Akbar di Rumah Dinas Walikota setelah dilaksanakan Pawai Taaruf.

BAB IV

KEMITRAAN KAWASAN INDUSTRI DAN SMK

4.1. Kebijakan Pemerintah

Jajaran Kementerian Perindustrian telah berkomitmen membangun kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini sekaligus untuk mendorong pertumbuhan industri nasional yang berkelanjutan. Wujud komitmen ini ditunjukkan melalui dikeluarkannya Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri dan penandatanganan bersama Nota Kesepahaman (MoU) lima menteri tentang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri. Kelima menteri tersebut adalah Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Badan Usaha Milik Negara. Penandatanganan MoU tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia.

Menurut informan dari sektor Industri, dalam menghadapi era industri 4.0 yang melibatkan unsur digital dalam setiap rantai nilai proses manufakturnya, para pekerja dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kerja sama dan dukungan dari industri menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas atau mutu pendidikan kejuruan dan vokasi sehingga mampu beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja. Di lokasi penelitian, sektor industri terlihat telah mulai melakukan perannya untuk memberikan masukan terhadap kurikulum pendidikan sesuai dengan perkembangan teknologi serta menyediakan fasilitas praktek dan pemagangan bagi siswa/mahasiswa dan guru/dosen sehingga baik peserta didik maupun tenaga pendidik dapat mengikuti perkembangan teknologi industri terkini, namun masih minim dan terbatas. Belum semua SMK dan jurusan

di SMK merasakan manfaat dari peran sector industry tersebut. Contohnya adalah sector broadcasting, masih sangat minim mendapatkan dukungan dari sector industry terkait.

Informan sektor industri menyampaikan bahwa peran industri untuk ikutserta dalam pengembangan pendidikan vokasi berbasis kompetensi, merupakan investasi non materi yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi industri melalui tersedianya tenaga-tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja, sehingga dapat mengurangi biaya dan resiko produksi, disamping meningkatkan daya saing industri. Namun hal ini belum terwujud dengan baik. Kenyataannya banyak lulusan SMK belum siap pakai dan sinergitas kolaborasi pihak industry dan dalam pengembangannya masih minim.

Informan dari pemerintah menjelaskan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2018 mencapai 7 juta orang dari 131,01 juta angkatan kerja Indonesia. Angka tersebut setara dengan 5,34 persen. Angka pengangguran paling banyak merupakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dibandingkan tingkat pendidikan lainnya, pengangguran dari SMK pada Agustus 2018 tercatat sebesar 11,24 persen. Angka tersebut meningkat dari data yang dihimpun BPS pada Februari 2018 lalu, yang sebesar 8,92 persen. Di lokasi penelitian, juga ditemukan data bahwa banyak lulusan SMK yang harus menunggu masa kerja, dengan interval masa tunggu 1 – 3 tahun. Selain itu belum 100% lulusan SMK terserap oleh lapangan kerja di tempat masing-masing, dan ada juga yang bekerja belum sesuai vokasinya.

Padahal, telah ditandatangani MOU sebagaimana diuraikan di atas dengan tujuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam rangka mengembangkan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri. Upaya ini juga dilakukan untuk menghasilkan calon tenaga kerja industri manufaktur yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan kebutuhan industry. Ruang lingkup MoU tersebut meliputi upaya untuk membangun pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang link

and match dengan industri, restrukturisasi program keahlian dan kurikulum pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri, serta pembangunan infrastruktur kompetensi bidang industri. Selanjutnya, sebagai fasilitasi industri dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan dan/atau pemagangan industri bagi siswa/mahasiswa dan guru/dosen, fasilitasi industri untuk penyediaan workshop/teaching factory dan instruktur dari industri, peningkatan kompetensi guru/dosen melalui pendidikan, pelatihan dan pemagangan industri, serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan kejuruan dan vokasi.

Kerjasama yang dilakukan oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) adalah sebuah strategi pembelajaran dan bisnis yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Kerjasama dilakukan selain karena tuntutan kurikulum juga sebagai upaya pengembangan keterampilan peserta didik SMK dalam bentuk kerja nyata industri yang diharapkan juga dapat memberikan keuntungan bagi industri untuk memanfaatkan mereka sebagai tenaga kerja bantu pada level operasional dan juga industry. Pola kerjasama bisa dilakukan secara berkesinambungan, dan secara teknis sekolah yang harus berinisiatif untuk menginformasikan kepihak industri mengenai jadwal dan waktu, sehingga antara industry dan sekolah secara bersama sama membuat komitmen dengan industri MoU. Sebagai panduan Pola kerjasama ini akan dilengkapi dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang lebih detail.

Pola kerjasama ini harus dilakukan dengan inisiatif awal dari sekolah dengan pola jemput bola, mendatangi Industri untuk mencari kebutuhan kompetensi yang bisa mendorong kemajuan Industri dari sisi kemampuan sumberdaya manusia minimal untuk tingkat pelaksana (operator) industri, yang pada akhirnya industri akan tumbuh dan berkembang melalui penambahan kompetensi, dan sekolah bisa menjamin pola pelatihan, peralatan yang tersedia dan para pengajar memang memiliki kemampuan. Untuk memberikan kepercayaan kepada industri, pola ini akan dibuat secara detail dan terinci dalam *Guide Line* pelatihan, dan akan dilindungi dengan MOU yang lebih jelas antara pihak sekolah dengan DUDI.

Proses pelaksanaan akan ditangani secara professional oleh unit pelaksana teknis produksi dan training di bawah bidang kerjasama dan pelayanan industri disetiap Sekolah Kejuruan (SMK).

Prinsip kerjasama industri antara sekolah dengan dunia kerja pada akhirnya mempunyai tujuan untuk mempercepat waktu penyesuaian bagi lulusan Sekolah Kejuruan dalam memasuki dunia kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu sekolah menengah kejuruan. Pendidikan kejuruan mampu menyita perhatian berbagai pihak, terutama *stakeholders* pendidikan, dikarena prinsip pendidikan kejuruan mempengaruhi perilaku pelanggan pendidikan.

Perhatian yang besar terhadap pendidikan kejuruan tentu saja terkait dengan prinsip-prinsip pendidikan kejuruan, seperti yang diidentifikasi oleh Barlow (Murniati dan Usman 2009:20), yaitu:

1. Pendidikan kejuruan adalah suatu perhatian rasional tenaga kerja, pendidikan industri, pertanian dan bantuan pemerintah, kebutuhan ekonomi merupakan suatu kerangka nasional dari pendidikan kejuruan;
2. Pendidikan kejuruan memelihara pertahanan umum dan memajukan kesejahteraan umum;
3. Pendidikan kejuruan mempersiapkan remaja dan dewasa, merupakan suatu tanggung jawab sekolah pemerintah, demokratisasi pendidikan di mana pemerintah memperlihatkan industri yang baik untuk kebutuhan pendidikan kejuruan pada industri pendidikan sekolah pemerintah;
4. Pendidikan kejuruan memerlukan suatu pendidikan dasar

5. Pendidikan kejuruan direncanakan dan dipimpin dalam kerjasama yang erat dengan pengusaha dan industri;
6. Pendidikan kejuruan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang bernilai dalam pasar tenaga kerja;
7. Pendidikan kejuruan memberikan pendidikan lanjutan untuk anak remaja dan dewasa.

4.2. Proses dan Tahapan Kerjasama yang Dilakukan Sekolah dengan DUDI

Dalam penyelenggara pendidikan, sekolah kejuruan menjalin kerjasama baik anggota internal maupun eksternal sekolah, kerjasama yang dijalin bersifat formal dan informal. Rohiat (2010:67) mengemukakan “esensi hubungan sekolah dan masyarakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan industri. Dalam arti sebenarnya, hubungan sekolah dan masyarakat sudah disentralisasikan sejak lama”.

Hubungan kerjasama dengan anggota eksternal dilakukan dengan DUDI, bersifat kemitraan dalam kegiatan prakerin. Prakerin merupakan kegiatan yang dulunya disebut dengan Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Menurut Sidi (Jayuz 2013. <http://hisyamjayuz.blogspot.com/2013/12/>), kegiatan prakerin adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian industrial, yang memadukan secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dan program perusahaan yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional.

Hubungan kerjasama dengan Pemda dan instansi terkait telah dilakukan dengan baik, seperti pemberian rekomendasi, melakukan kegiatan bersama, ndust dukungan dana untuk pengadaan fasilitas, dukungan industri dalam pembentukan berbagai diklat sekolah, memberika isentif kepada guru, dan memberikan gaji

guru kontrak. Hubungan kerjasama dengan majelis sekolah dan orang tua siswa pada dasarnya cukup mendukung, seperti melakukan promosi sekolah secara bersama, menyetujui kegiatan sekolah.

Hubungan kerjasama dengan komite sekolah berlangsung sangat baik, di mana komite sekolah tetap membantu dan mendukung, bahkan selalu memonitor kegiatan sekolah. Dalam Lampiran II Kepmendiknas Nomor 044 Tahun 2002 (Engkoswara dan Komariah 2011:297), komite sekolah didefinisikan sebagai “badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah”.

Untuk proses kesepakatan antara sekolah dengan perusahaan dalam menjalin kerjasama langkah-langkah yang dilakukan sekolah ialah pertama, sekolah mengkonfirmasi via telepon terlebih dahulu kepada perusahaan yang ingin diajak kerjasama di dalam rapat sekolah tadi, jika perusahaan memberikan sinyal menyetujui untuk melihat promosi dan presentasi sekolah, maka sekolah akan mengirimkan proposal serta surat pemberitahuan dari sekolah. Jika perusahaan atau industri mengirimkan surat balasan konfirmasi, sekolah baru akan industri ke perusahaan untuk mempresentasikan materi promosi sekolah yang sudah disiapkan. Perusahaan atau industri yang sudah menyetujui ada penandatanganan perjanjian kerjasama berupa MoU (*Memorandum of Understanding*) antara sekolah dengan perusahaan.

Sedangkan Langkah-langkah yang telah dijelaskan secara konkret sebagai langkah persiapan untuk menjalin kerjasama antara SMK dengan DUDI dijelaskan oleh Raharjo (dalam Isbianti, 2009:44-45) adalah sebagai berikut:

1. Sekolah mengkaji berbagai industri dan lembaga yang potensial yang ada di sekitar wilayahnya yang antara lain meliputi: Jenis dunia usaha; Aktivitas proses produksi yang meliputi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau lembaga tersebut; Kualifikasi tenaga kerja yang

meliputi jabatan-jabatan tenaga kerja yang ada, tugas-tugas yang dikerjakan, serta keahlian/ keterampilan apa saja yang mungkin diperoleh di perusahaan tersebut; Fasilitas praktek atau fasilitas produksi yang tersedia; Daya industri atau kemungkinan jumlah siswa yang bisa diterima untuk pelatihan; Kualifikasi lembaga, apakah tergolong perusahaan besar, menengah, atau kecil.

2. Melakukan pengkajian terhadap semua ketrampilan yang sesuai dan dapat diperoleh di setiap industri. Dalam hal ini, pada bagian atau divisi dan sub bagian di industri apa sajakah ketrampilan yang sesuai dapat diperoleh peserta PSG untuk masing-masing program studi.
3. Sekolah melalui majelis sekolah atau komite sekolah merintis kerjasama dengan industri atau perusahaan yang sesuai dengan standar keahlian atau ketrampilan tiap-tiap program studi. Dalam hal ini sekolah membuat kerja sama dengan DUDI secara tertulis tentang pelaksanaan PSG atau biasa disebut dengan Memorandum of Understanding (MoU) yang memuat: Hak dan kewajiban DUDI dalam melaksanakan PSG; Hak dan kewajiban sekolah dalam melaksanakan PSG; Penyusunan atau sinkronisasi kurikulum PSG atau bahan ajar; Mekanisme dan prosedur pelaksanaan PSG; Pembiayaan; Pengawasan dan pengendalian mutu PSG; Uji kompetensi; Seleksi siswa; Pemasaran tamatan; Hal-hal lain yang dianggap penting.

4.3. Kemitraan Industri dan SMK di Kota dan Kabupaten Bekasi

Keberadaan dunia SMK tidak lepas dari keberadaan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Musyawarah Kepala Sekolah (MKKS) SMK Kota Bekasi mengusulkan adanya wisata edukasi industri yaitu menjadikan kawasan industri menjadi lokasi wisata edukasi yang disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Dengan program tersebut, siswa SMK nantinya bisa mendapatkan *soft skill* tambahan terkait keahlian atau jurusan yang diambilnya. Salah seorang informan dari SMK Kabupaten Bekasi menyatakan sangat setuju mengenai rencana wisata

edukasi industri bagi SMK, karena selain menambah wawasan, siswa juga mendapatkan gambaran nyata mengenai dunia industri dan kebutuhan akan SDM atau tenaga kerjanya.

Bentuk kerjasama yang dibuat oleh sekolah dengan DUDI baik di Bekasi (maupun di Pangkajene Pinrang) antara lain sinkronisasi kurikulum, program pemagangan/prakerin, kerjasama program pelatihan dan kerjasama program penyaluran lulusan. Kerjasama yang dijalankan sekolah merupakan hal utama dan menjadi program pokok sekolah di bidang kehumasan yang bertujuan untuk menyalurkan peserta didik ke dalam dunia industri yang sesuai dengan bidang keahliannya. Hasil penelitian sesuai dengan teori Abuzar H (2011) SMK dengan dunia usaha melalui link and match sebagai bentuk kemitraan dapat memberikan manfaat :

1. Peserta didik secara langsung dapat melihat bagaimana peranan teknologi dalam dunia usaha sehingga setelah lulus kelak tidak canggung lagi berinteraksi dengan proses teknologi di dunia industri
2. Memotivasi peserta didik SMK untuk berkreasi lebih bagus lagi dalam menemukan inovasi-inovasi baru dan melihat secara langsung di dunia industri
3. Mampu meningkatkan mutu lulusan SMK karena dunia usaha yang paling diutamakan adalah faktor disiplin agar dapat secara terus menerus bertahan, misalnya hal kecil mengindikasikan bahwa mutu telah mulai bersemi disekolah dengan komitmen terhadap disiplin waktu dan belajar, etos kerja, budaya berkompetisi dan berprestasi
4. Lebih mudah mendesain kurikulum yang berbasis kompetensi karena langsung memenuhi tuntutan dunia usaha/industri

5. Bentuk rekrutmen tenaga kerja tidak akan sulita lagi artinya strakeholders SMK dapat merekomendasikan siapa saja peserta didik yang berprestasi untuk jadi tenaga kerja.

Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Wayong (2010) kemitraan antara lembaga pendidikan dengan dunia usaha/indsutri merupakan kunci pokok keberhasilan Pendidikan Sistem Ganda (SPG) pada sekolah kejuruan, dimana penyelenggaraan pendidikan dirancang, dilaksanakan dan dievaluasi bersama, sehingga relevansi kompetensi lulusan terhadap tuntutan pasar kerja meningkat. Indikator relevansi terkait dengan kemitraan antara sekolah dengan DUDI adalah kesesuaian antara bidang keahlian dan jenis pekerjaan serta keterserapan di dunia kerja. Berdasarkan analisis penulis. Pelaksanaan kerjasama SMK dengan dunia usaha/industri sangat baik dan saling menguntungkan,sangat pentign untuk menunjang tercapainya program sekolah khususnya.

Hasil penelitian SMK di Bekasi (dan Pangkal Pinang) membuat perencanaan untuk menjalin kemitraaan dengan dunia usaha/industri dengan menggunakan strategi :

1. Sekolah proaktif menjalin komunikasi dengan dunia usaha/dunia industri dalam sinkronisasi kurikulum
2. Sekolah mengajukan penwaran proposal ke industri terkait potensi sekolah (penempatan tamatan, OJT guru)
3. Sekolah aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan promosi sekolah
4. Memanfaatkan peran-peran prakerin, pendanaan sekolah, beasiswa dan outsourcing penempatan tamatan ke indusrti
5. Dunia usaha/industri yang bekerjasama dituangkan dalam bentuk MoU

Informasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), menjelaskan bahwa telah dibuka program pemagangan nasional di Kawasan Industri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tercatat, ada sebanyak 1.019 siswa SMK/SMA yang mengikuti program ini. Mereka ditempatkan pada 132 perusahaan di kawasan industri untuk menimba ilmu sebelum masuk ke dunia kerja. Ribuan peserta magang itu mengikuti program bertajuk "Indonesia Berkompeten" untuk mempercepat peningkatan kompetensi dan keahlian. Program magang ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah. Pemerintah pusat membantu para siswa sekolah di Bekasi sesuai kebutuhan pasar kerja dengan tujuan agar para pelajar tidak sulit dalam mencari perusahaan yang mau menerima peserta magang.

Program magang juga dilakukan sebagai solusi untuk meningkatkan persaingan angkatan kerja. Telah terjadi ketimpangan antara jumlah tenaga kerja yang ada dengan ketersediaan lapangan kerja. Pasar kerja yang aktif terus didorong sehingga ada perimbangan antara sisi supply tenaga kerja dengan demand lapangan kerja. Pelajar SMK yang ikut program ini diberikan honor berupa uang saku, uang makan sebesar 80 persen dari upah minimum kabupaten (UMK) Kabupaten Bekasi. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 tahun 2016, yang mengatur perusahaan wajib memberi uang saku pada peserta magang dengan perhitungan 60-80 persen dari upah minimum. Program pemagangan ini akan dilakukan setiap tahun dengan penambahan jumlah peserta dan perusahaan yang lebih banyak lagi. Sementara itu, informasi lain dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi, dijelaskan bahwa program pemagangan ini dapat menekan angka pengangguran karena berpeluang akan direkrut menjadi karyawan usai melaksanakan program magang.

4.4. Kemitraan Industri dan SMK di Pangkal Pinang

Kemitraan industri dengan SMK di Pangkal Pinang sudah berjalan dalam bentuk berbagai macam program. Salah satu yang pernah sukses di tahun 2017 adalah kemitraan dalam program *Job Fair*. Saat itu, SMKN 3 Pangkal Pinang menjadi

tuan rumah dalam acara *Job Fair* yang didukung oleh kurang lebih 30 perusahaan dengan 231 lowongan pekerjaan ditawarkan. Selain job fair, kegiatan tersebut juga ditunjang dengan seminar, yaitu tentang trik menghadapi interview saat melamar pekerjaan. Narasumber berasal dari pemerintah dan pelaku usaha.



Tema kegiatan tersebut adalah ‘Bulan rekrutmen SMK 2017’ (*job matching*). Kegiatan tersebut berlaku untuk seluruh masyarakat siapapun boleh mengikutinya. Informan dari SMKN 3 Pangkalpinang Sukinda menyebutkan, kegiatan diharapkan memberikan dampak yang baik terhadap para lulusan sekolah, khususnya SMK. Selain itu tidak hanya melaksanakan kegiatan, kemudian dibiarkan, tetapi pihaknya akan mengawasi semua proses yang ditetapkan perusahaan.

SMKN 3 Pangkalpinang dan pihak industri juga telah melaksanakan kegiatan “Pengenalan Pemahaman Konsep Technopark” pada bulan Agustus 2018. Dalam proses pendidikan di SMK Negeri 3 Pangkalpinang, keterlibatan pihak industri dalam proses pembelajaran telah banyak dilakukan, karena perkembangan teknologi maupun proses dalam produksi/jasa yang membutuhkan kehadiran industri di SMK. Penerapan *Teaching Factory* di SMK Negeri 3 Pangkalpinang telah mendorong mekanisme kerja sama antar sekolah dan industri yang saling menguntungkan, sehingga SMK berusaha terus menerus selalu mengikuti

perkembangan industri secara otomatis (teknologi transfer, manajerial, pengembangan kurikulum, prakerin, dan sebagainya).

Informan dari pemerintah daerah dan SMK Negeri 3 Pangkal Pinang menjelaskan bahwa kemitraan dengan dunia industri dan instansi yang relevan untuk bekerja sama dalam *Teaching Factory* di SMK Negeri 3 Pangkalpinang telah dilakukan walau masih harus terus ditingkatkan kualitas kemitaraannya. Technopark menjadi “*Think-Thank*” SMK Negeri 3 Pangkalpinang dalam pengembangan menghadapi perkembangan industri yang pesat. Technopark juga telah mempromosikan potensi daerah yang relevan untuk pengembangan ekonomi daerah dan sekaligus mempermudah komunikasi dengan dunia industri.

Informan dari SMK dan industry menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama program *Teaching Factory* dan *Technopark* di SMK adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMK Pangkalpinang yang relevan dengan kebutuhan industri, sehingga berdampak kepada penguatan daya saing industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kompetensi yang dihantarkan secara integratif melalui penerapan *Teaching Factory* adalah kompetensi yang “*comprehensive*” meliputi keahlian di ranah psikomotorik, afektif/sikap dan kemampuan berpikir/mental khususnya “*Higher-Order Thinking Skills*” (HOTS) yang mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah (“*critical thinking/evaluation*” dan “*problem solving*”). Sehingga pendidikan di SMK akan menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten dari sisi keterampilan (hardskill), namun juga produktif dan bersikap baik (produktif dan tahan banting).

4.5. Pembukaan Jurusan Vokasi di Kawasan Industri

Konsep pendidikan vokasi harus sepenuhnya berbasis kompetensi dengan keterlibatan yang intensif dari industri, mulai dari identifikasi program studi, penyusunan kurikulum sesuai kebutuhan industri, praktek kerja dan pemagangan industri, hingga penempatan dengan ikatan kerja pada perusahaan industri. Menurut informan dari kemendikbud, SMK dapat mengadopsi lebih kurang 80-90 persen konsep pendidikan dual system dari Jerman dengan pembelajaran

menggunakan block system, yaitu dalam setiap semester dua bulan pembelajaran teori dan praktek di kampus, dan tiga bulan magang di perusahaan industri. Pendidikan vokasi merupakan salah satu dari tiga kegiatan pendidikan ketenagakerjaan yang dilakukan kementerian, yaitu pemagangan melalui Balai Diklat di Kemenaker maupun di Kemenperin, pembangunan politeknik atau akademi komunitas, serta kerjasama industri dan SMK melalui sistem klaster. Karena pembangunan industri yang utama adalah membangun manusianya. Penguatan kompetensi SDM melalui pendidikan vokasi sangat penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia dan memberikan penguatan daya tahan ekonomi domestik agar tidak terpengaruh oleh perlambatan ekonomi dunia. Dijelaskan lebih lanjut oleh informan, bahwa pemerintah sedang menyusun standar kompetensi yang jelas untuk mendorong kualitas lulusan pendidikan vokasi agar bisa bersaing di tingkat regional maupun global dalam jangka panjang.

Semangat positif dari MOU yang melibatkan 5 kementerian tersebut masih perlu diturunkan dalam implementasinya di semua level jajaran di lapangan. Informan dari pemerintah, industry dan SMK, semua mengatakan diperlukan komitmen yang kuat dari lima menteri yang telah menandatangani MoU, dari tingkat menteri sampai jajaran di unit terbawah di lapangan, agar terealisasi secara konkret untuk mewujudkan link and match dalam penerapan pendidikan vokasi dengan dunia industri.

4.6. Kemitraan Kawasan Industri dengan SMK

Model kebijakan kemitraan pendidikan kejuruan berbasis dunia kerja diharapkan dapat mewujudkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap kreatif, dan inovatif. Oleh karena itu, penyelenggaraan praktek industri dalam kerangka kemitraan berbasis dunia kerja perlu ditingkatkan efektivitasnya sehingga birokrasi lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat, lebih adaptif terhadap perubahan-perubahan dan memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Islamy (2002); Dunn (2000); dan

Thoha (2002) bahwa birokrasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan tersebut harus benar-benar memerhatikan tuntutan-tuntutan masyarakat yang terkena efek dari kebijakan.

Disamping itu direkomendasikan beberapa hal yang berkenaan dengan upaya perbaikan kebijakan yang diharapkan dilakukan oleh SMK, DUDI, pemerintah daerah, dan direktorat pembinaan SMK Depdiknas RI, sebagai berikut :

1. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) :

- a. Perlu menyusun kurikulum terpadu antara SMK dengan Dunia kerja dengan melibatkan multy stakeholders.
- b. Perlu meningkatkan pengalaman dan wawasan guru dengan melalui program kunjungan industri, dialog dunia kerja, mendatangkan guru tamu, magang guru dan diklat kompetensi berjenjang,
- c. Perlu peningkatan kualitas/profesionalisme guru dengan mengadakan diklat metodologi pelajaran teknik, desiminasi, seminar, dan lokakarya, workshop karya ilmiah atau mengadakan in house training,
- d. Perlu dialokasikan anggaran untuk pelatihan pembuatan modul dan pembuatan modul terpadu (bahan ajar) untuk bidang studi normatif, adaptif, dan produktif,
- e. Perlu melakukan inovasi pembelajaran,
- f. Tim kelompok kerja praktik industri perlu melibatkan semua satkholders sebagai anggota tim,
- g. perlu adanya stantadar dunia kerja khususnya melihat aspek sumber daya peralatan dan sumber daya manusia pada perusahaan/dunia kerja dan menyesuaikan relevansi dengan standar kompetensi lulusan.

5. DUDI (Dunia Kerja)

- a. Standar kompetensi industri (dunia kerja) sangat diperlukan sebagai acuan dalam pengembangan kurikulum di sekolah dan meningkatkan pembelajaran di sekolah dengan program praktik industri. Untuk itu, diharapkan dunia usaha industri (dunia kerja) dapat menyusun standar kompetensi industri (dunia kerja) yang nantinya dapat digunakan oleh sekolah dalam pengembangan kurikulum,
- b. Sebagai tindak lanjut dari pemberian sertifikat praktik industri dan sertifikat uji kompetensi tersebut diharapkan dunia usaha industri (dunia kerja) lebih konsisten. Dengan demikian, dalam melakukan penerimaan karyawan agar lebih memprioritaskan lulusan SMK yang telah memiliki sertifikat praktik industri dan uji kompetensi dari dunia usaha industri (dunia kerja) tersebut sebagai pihak yang berkompeten mengeluarkan kedua sertifikat tersebut.

6. Pemerintah Daerah

Sebagai konsekuensi dilaksanakannya otonomi daerah dan sebagai wujud pelaksanaan kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana amanah UU No. 22 Tahun 1999 (revisi UU No. 32 Tahun 2004) tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Daerah maka pengelolaan pendidikan kejuruan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha industri maka perlu:

- a. melakukan evaluasi kebijakan kemitraan pendidikan kejuruan,
- b. Penataan kembali strategi implementasi kebijakan kemitraan dalam rangka pendidikan sistem ganda (PSG) khususnya dalam penyelenggaraan praktik industri sekolah dan dunia usaha industri (dunia kerja),

- c. perlu memiliki standar pelaksana praktik industri, baik yang berkaitan dengan kesiapan industri (dunia kerja), sekolah, guru, dan faktor penunjang pembelajaran lainnya,
- d. majelis sekolah dilebur dalam dewan pendidikan sehingga tidak terjadi duplikasi peran dan fungsi majelis sekolah dengan dewan pendidikan yang telah memiliki infrastruktur perundang-undangan kelembagaan
- e. perlu dibuat secara rinci isi naskah kerjasama (MOU) dan dibuat sesuai situasi dan kondisi dunia usaha industri (dunia kerja) dan standar kompetensi program studi,
- f. Penelusuran tamatan atau lulusan sangat penting dilakukan oleh sekolah apalagi bagi sekolah menengah kejuruan (SMK) sebagai indikator keberhasilannya melakukan pelayanan pendidikan Untuk mengoptimalkan penelusuran tamatan ini perlu keterlibatan multy stakeholders, di antaranya unsur sekolah, dunia usaha industri (dunia kerja), bidang pendidikan menengah dinas pendidikan, dan bidang penempatan ketenagakerjaan kantor tenaga kerja dengan mengoptimalkan penanganan lulusan diperlukan adanya Job Placement Center (JPC),
- g. perlu adanya perencanaan pendidikan dengan pendekatan berbasis dunia kerja atau ketenagakerjaan yang berorientasi pada pengembangan potensi lokal yang mempunyai daya jual (marketable),⁸ perlu untuk memperoleh sumber pendapatan baru guna mendukung penyediaan dana tersebut yang melibatkan stakeholders (orang tua, masyarakat, dan dunia usaha industri) melalui kebijakan dengan peraturan daerah (perda) sumbangan atau retribusi pendidikan atau memasukkan dalam perda sistem pendidikan
- h. hendaknya pemerintah daerah memberi penghargaan atau kemudahan kepada dunia usaha industri (dunia kerja) dalam mengembangkan kegiatan usahanya, misalnya memberi kemudahan dalam perpanjangan izin usaha, tetapi di balik itu pihak perusahaan juga harus memberi jaminan untuk mendukung program pengembangan pendidikan dan peningkatan mutu

lulusan sebagai persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh dunia usaha industri (dunia kerja) ketika mendapat kemudahan dari pemerintah daerah.

4. Direktorat Pembinaan SMK Depdiknas RI

- a. perlu dilakukan evaluasi kebijakan sebagai dasar untuk melakukan revisi terhadap Kepmendikbud tersebut atau dengan menetapkan peraturan pemerintah atau keputusan bersama menteri pendidikan nasional bersama menteri tenaga kerja, dan menteri dalam negeri yang mengatur tentang kemitraan pendidikan pada umumnya dan pendidikan kejuruan pada khususnya.
- b. perlu adanya kebijakan pendidikan berupa PP atau kepmendiknas dengan melibatkan multy stakeholders (mendiknas, mendagri, dan menaker), 3) perlu pemerintah dan pemerintah daerah melakukan sebagai berikut :
- c. perubahan paradigma pembangunan pendidikan dengan menyiapkan lulusan bukan hanya memasuki dunia kerja formal tetapi dunia kerja informal sesuai potensi lokal marketabl,
- d. mengembangkan model pembelajaran terpadu berbasis kewirausahaan (menambah jam belajar kewriausahaan) sehingga siswa dapat meleak ekonomi,

- e. mendorong perkembangan sektor informal dalam rangka mengembangkan potensi lokal marketable dan menyediakan bantuan modal usaha bagi lulusan SMK yang berminat membuka usaha disektor informal, dan
- f. membangun SMK Kecil sesuai potensi lokal di daerah pedesaan, pedalaman, pantai dan perbatasan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja informal dan SMK terpadu rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja formal dan informal daerah perkotaan serta membangun SMA pada daerah perkotaan dalam rangka mempersiapkan peserta didik memasuki perguruan tinggi.

Keberadaan dunia SMK tidak lepas dari keberadaan DUDI. Musyawarah Kepala Sekolah (MKS) SMK Kota Bekasi mengusulkan adanya wisata edukasi industri yaitu menjadikan kawasan industri menjadi lokasi wisata edukasi yang disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Dengan program tersebut, siswa SMK nantinya bisa mendapatkan soft skill tambahan terkait keahlian atau jurusan yang diambilnya. Salah seorang informan dari SMK Kabupaten Bekasi menyatakan sangat setuju mengenai rencana wisata edukasi industri bagi SMK, karena selain menambah wawasan, siswa juga mendapatkan gambaran nyata mengenai dunia industri dan kebutuhan akan SDM atau tenaga kerjanya –nya.

Infomasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), menjelaskan bahwa telah dibuka program pemagangan nasional di Kawasan Industri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tercatat, ada sebanyak 1.019 siswa SMK/SMA yang mengikuti program ini. Mereka ditempatkan pada 132 perusahaan di kawasan industri untuk menimba ilmu sebelum masuk ke dunia kerja. Ribuan

peserta magang itu mengikuti program bertajuk "Indonesia Berkompeten" untuk mempercepat peningkatan kompetensi dan keahlian. Program magang ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah. Pemerintah pusat membantu para siswa sekolah di Bekasi sesuai kebutuhan pasar kerja dengan tujuan agar para pelajar tidak sulit dalam mencari perusahaan yang mau menerima peserta magang.

Program pemagangan juga dilakukan sebagai solusi untuk meningkatkan persaingan angkatan kerja. Telah terjadi ketimpangan antara jumlah tenaga kerja yang ada dengan ketersediaan lapangan kerja. Pasar kerja yang aktif terus didorong sehingga ada perimbangan antara sisi supply tenaga kerja dengan demand lapangan kerja. Pelajar SMK yang ikut program ini diberikan honor berupa uang saku, uang makan sebesar 80 persen dari upah minimum kabupaten (UMK) Kabupaten Bekasi. Hal ini selaras dengan Peraturan Menaker Nomor 36 tahun 2016, yang mengatur perusahaan wajib memberi uang saku pada peserta magang dengan perhitungan 60-80 persen dari upah minimum. Program pemagangan ini akan dilakukan setiap tahun dengan penambahan jumlah peserta dan perusahaan yang lebih banyak lagi. Sementara itu, informasi lain dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi, dijelaskan bahwa program pemagangan ini dapat menekan angka pengangguran karena berpeluang akan direkrut menjadi karyawan usai melaksanakan program magang.

Dengan adanya jalinan kemitraan antara Sekolah dengan Industri akan didapati dua faktor, yaitu faktor positif dan faktor negatif. Kedua faktor tersebut akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik pihak sekolah sebagai pelaksana kerjasama yaitu sekolah dan industri. Pihak sekolah akan terbantuan dalam peningkatan mutu pendidikan, pelaksanaan praktek kerja di industri, penyaluran tamatan, mengikuti perkembangan di dunia industri. Pihak industri memberikan masukan berupa saran dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian program pendidikan sekolah menengah kejuruan serta mempersiapkan pengalaman kerja lulusan. Menurut Soewandito dalam Wena (1997:54) ada manfaat positif yang diperoleh kedua pihak yaitu :

1. Relevansi program pendidikan
2. Kecendrungan teknologi baru yang digunakan industri
3. Mendapatkan pengetahuan mengenai teknik dan metode yang diterapkan industri
4. Mendapatkan pengalaman industri baik bagi siswa maupun staf pengajar
5. Menciptakan afiliasi kerja.

Dampak positif lainnya, bagi sekolah, dapat menekan biaya pendidikan dengan adanya bantuan yang diberikan dunia usaha. Siswa juga akan jauh lebih terampil dan mendapatkan pengalaman kerja yang sebenarnya. Sekolah mampu menyesuaikan program-program yang sesuai kebutuhan dunia usaha yang semakin berkembang. Sekolah tidak terlalu bergantung pada negara dalam anggaran pendidikan, dengan bantuan dunia usaha dapat meningkatkan kualitas pendidikan berjalan lebih cepat. Bagi dunia usaha, dapat mempermudah dalam pencarian tenaga kerja yang terampil dan berdedikasi tinggi.

Sementara dampak negatif hanya sedikit terutama bagi dunia usaha yaitu proses pembimbingan yang akan berpengaruh pada proses produksi di perusahaan tersebut, karena waktu yang digunakan akan tersita dengan bimbingan yang dilakukan.

Hubungan dan kerjasama kemitraan dilakukan dengan industri lokal antara SMK di wilayah Bekasi dengan industri yang ada di daerah tersebut dan juga industri luar daerah. Hubungan kemitraan perlu dilakukan sesuai dengan keahlian antara lain berupa:

1. Penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri yang linier dengan kompetensi kejuruan yang ada di sekolah.

2. Merencanakan program pengadaan alat praktek sesuai dengan standard yang digunakan industri.
3. Berpartisipasid alam meningkatkan kesempatan kerja bagi lulusan yang berasal dari daerah setempat/lokal.
4. Bagian dari uji kompetensi asesor atau verifikator eksternal.

BAB V

PENINGKATAN KOMPETENSI PADA SMK

Terkait dengan peningkatan kompetensi peserta didik di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka dari hasil kajian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan Teori Karakteristik Pendidikan Kejuruan yang ditawarkan oleh Djojonegoro (1998) dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1. Jurusan Administrasi Perkantoran

1. Pendidikan kejuruan diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja. Kebanyakan siswa memilih sekolah di SMK karena dalam dirinya ada keinginan kuat untuk bekerja selepas lulus SMK. Data yang ada menunjukkan bahwa bahwa siswa lulusan SMK yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi hanya berkisar antara 1-10% saja. Dengan kenyataan ini, maka seluruh SMK dan juga tenaga pengajar di SMK sudah semestinya menciptakan suasana dunia pekerjaan di sekolah. Dunia pekerjaan yang dimaksud adalah siswa dikondisikan sebagai pekerja pada berbagai jenjang pekerjaan atau sebagai *owner* dari suatu bidang pekerjaan. Pembiasaan siswa terhadap situasi demikian selama pembelajaran di sekolah berlaku untuk seluruh mata pelajaran merupakan suatu keniscayaan. Pembiasaan suasana kerja harus diciptakan bukan hanya oleh guru produktif saja, namun juga guru adaptif atau normatif, sehingga iklim di SMK lebih bersifat konvergen sangat berbeda dengan kondisi di SMA yang paralel yaitu antar mapel tidak begitu saling menguatkan. Temuan kajian, kurikulum administrasi perkantoran yang ada saat ini sebenarnya sudah disiapkan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Hanya saja ketidakseimbangan antara lowongan pekerjaan dengan kuantitas lulusan SMK atau angkatan kerja yang begitu banyak menjadikan tetap tingginya angka pengangguran lulusan SMK dibanding dengan lulusan lainnya.

Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Februari 2019 sebanyak 6,82 juta orang atau menurun 50.000 orang dibandingkan dengan Februari 2018 yang sebesar 6,87 juta orang. Jumlah pengangguran yang setara dengan 5,01 persen dari jumlah angkatan kerja sebanyak 136,18 juta orang, paling tinggi masih dihuni lulusan SMK.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurut pendidikan, tidak banyak berubah bahwa TPT paling tinggi masih dari SMK, lalu dari diploma I, II, dan III, lalu di susul SMA. Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan masih dipegang oleh lulusan SMK sebesar 8,63 persen Berikutnya lulusan diploma I/II/III sebesar 6,89%, lulusan SMA sebesar 6,78 persen lulusan Universitas sebesar 6,24 persen. Kemudian lulusan SMP sebesar 5,04 persen dan lulusan SD 2,65 persen.

2. Pendidikan kejuruan didasarkan atas *demand-driven* (kebutuhan dunia kerja). Secara umum kebutuhan dunia kerja pada abad ke-21 meliputi kreatifitas, berfikir tingkat tinggi, kolaborasi dan komunikasi. Pertama, siswa sulit membiasakan diri kreatif manakala guru kurang menstimulasi kreatifitas. Pembelajaran klasikal hanya akan membawa siswa kepada masa lampau, sedangkan siswa disekolahkan oleh orang tuanya agar bisa hidup mandiri. Stimulasi untuk merangsang kreatifitas siswa bisa berupa pembelajaran yang berubah sesuai dengan situasi, waktu, dan tentunya berbasis konstruktivis. Kedua, setelah siswa keluar sekolah tentu mereka tidak akan ditanya apa ini, apa itu, definisi, pengertian atau penjelasan. Ketika siswa keluar dari sekolah mereka akan langsung dihadapkan pada kondisi berfikir di ranah analisis, sintesis atau evaluasi, dan praksis. Dengan demikian merupakan keniscayaan bagi guru untuk membiasakan agar siswa bisa berfikir tingkat tinggi. Ketiga, dunia saat ini memasuki era konsep di mana persaingan sulit dimenangkan tanpa berkongsi atau berkolaborasi. Untuk mempersiapkan siswa hidup mandiri setelah lulus sekolah sangat bijak jika selama tiga tahun sekolah terbiasa bekerja sama dengan rekannya, iklim kolaborasi lebih dikedepankan bila dibanding

dengan iklim persaingan. Keempat, stimulasi siswa untuk berkomunikasi dalam berbagai media perlu diarahkan. Komunikasi lisan melalui presentasi, komunikasi tulisan melalui medsos atau blogger harus sudah menjadi perhatian bagi seluruh guru mapel untuk mendesain keterampilan siswa agar bisa asertif berkomunikasi dengan baik dan benar. Temuan kajian, jurusan administrasi perkantoran sudah sesuai dengan *demand-driven*, dikarenakan keterampilan jurusan ini masih terus dibutuhkan di semua bidang industry.

3. Fokus isi pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Fokus isi pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Pertama, penguasaan pengetahuan terkait dengan masalah keadministrasian dan peralatan perkantoran dan bahan serta komponennya lainnya merupakan syarat mutlak siswa bisa bekerja. Selanjutnya siswa wajib memahami prinsip kerja peralatan dan bahan yang biasa digunakan di dunia kerja. Kedua, siswa dilatih untuk mengoperasikan peralatan sesuai SOP. Pada keterampilan ini siswa juga bisa melakukan setting, perbaikan ringan atau *troubleshooting* ketika muncul masalah pada efisiensi penggunaan peralatan. Variasi peralatan tidak akan menjadi masalah besar ketika konsep dasarnya sudah dikuasai secara utuh utuh oleh siswa, misalnya dari peralatan analog kepada sistem digital. Ketiga, sikap merupakan bagian penting dalam menunjang keterampilan. Sikap siswa merupakan manifestasi dari karakter yang di bangun dari kebiasaan. Sikap teliti, disiplin, jujur dan sebagainya merupakan karakter dasar yang perlu dibangun. Harus ada kegiatan penumbuhan karakter yang sistematis kelas, sekolah atau pelibatan masyarakat. Hasil temuan, isi kurikulum dan silabus pembelajarn di jurusan ini sudah sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang mencakup semua aspek pembelajaran siswa dan sesuai kebutuhan dunia kerja

4. Penilaian yang sesungguhnya terhadap kesuksesan siswa harus pada *hands-on* atau performa dalam dunia kerja. Penilaian di SMK sebaiknya penilaian otentik berbasis pada produk yang dihasilkan selama siswa belajar di kelas bengkel atau lab. penilaian yang disesuaikan dengan model pembelajaran yang di hasilkan. Hasil temuan di lapangan, proses penilaian capaian kompetensi siswa sudah mengacu pada SOP tapi masih dominan pada aspek kognitif, belum maksimal pada aspek afektif atau ketrampilan kerja yang harusnya dimiliki oleh setiap siswa yang siap kerja
5. Hubungan yang erat dengan dunia kerja merupakan kunci sukses pendidikan kejuruan. Hubungan antara DUDI dengan SMK merupakan keniscayaan yang mutlak. Sejatinya SMK hadir karena permintaan dari DUDI akan kebutuhan tenaga kerjanya. Pada saat ini kejaran target pemerintah antara rasion SMA : SMK sebesar 30%: 70 % berdampak pada melencengnya kekhasan SMK. Hasil temuan penelitian, hubungan dunia kerja dengan program pendidikan di SMK, diwujudkan dalam bentuk kerjasama magang atau studi lapangan. Namun, pada saat magang, ketrampilan jurusan kurang mendapat perhatian. Di beberapa tempat ditemukan bahwa siswa magang diberikan tugas yang sangat teknis seperti mengetik, mencatat dan lain-lain. Siswa belum maksimal dilatih untuk tugas administrasi perkantoran yang lebih mahir.
6. Pendidikan kejuruan yang baik adalah responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi. Pertumbuhan dan perkembangan SMK yang baik adalah perkembangan dengan kriteria yang ditinjau dari sisi penggunaan perkembangan teknologi yang digunakan sekolah saat ini. Sekolah konvensional tidak akan dapat meluluskan siswa yang siap pakai dan siap bertarung dengan para ekspatriat yang datang menyerbu Indonesia atau siap bersaing di luar negeri. Kemajuan sekolah dalam penggunaan teknologi dapat dengan sederhana dilihat dari pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi terpadu, perencanaan, begitu juga dalam pembelajaran dan evaluasi.

Jurusan ini sudah terlihat responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi. Kurikulum pendidikan informasi teknologi sudah diberikan. Dalam praktek kerja, siswa juga dilatih menggunakan atau mengakses semua kemajuan teknologi terkini. Namun, fasilitas dan sarana pembelajaran yang mendukung untuk penggunaan teknologi terbaru, masih kurang atau sangat terbatas. Contoh terbatasnya kapasitas wifi di sekolah, jumlah computer dengan spesifikasi terkini. Ruang laboratorium campur dengan jurusan lain

7. Pendidikan kejuruan lebih ditekankan pada *learning by doing* dan *hands-on experience*. Pendidikan kejuruan lebih ditekankan pada *learning by doing* dan *hands-on experience*. Pembelajaran di SMK seperti diketahui antara teori, praktik dan *link and match* di DUDI dalam perbandingan 1:2:4. Implementasi dari konsep rasio demikian akan mudah diterap. Temuan kajian, metode pembelajaran yang menekankan *learning by doing* dan *hands-on experience* sudah mulai diterapkan namun di beberapa SMK masih terlihat seadanya saja. Metode ini perlu didukung oleh media pembelajaran dan fasilitas pembelajaran yang sangat lengkap. Kenyataannya, ada SMK yang masih terbatas daya dukungnya, ada juga SMK yang berlebih daya dukungnya tapi belum dimanfaatkan secara optimal dan ada yang seimbang antara daya dukung dan metode pembejarannya.
8. Pendidikan kejuruan memerlukan fasilitas yang mutakhir untuk praktik. Pengadaan sarana dan prasarana di sekolah kejuruan perlu memperhatikan DUDI mana yang menjadi mitra, kelengkapan dan kemutakhiran sarana dan prasarana haruslah berada dia atas sarana dan prasarana DUDI. Temuan kajian, situasinya sama dengan penjelasan di poin 7 di atas.
9. Pendidikan kejuruan memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar daripada pendidikan umum Pendidikan kejuruan memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar daripada pendidikan umum. Pendidikan di SMK secara umum pada saat ini tahun 2018 rata rata

memerlukan biaya sekitar 6 juta tiap siswa per tahun. Pemerintah saat ini baru bisa membantu melalui BOS atau BPMU sebesar 1400 K/siswa/tahun dengan demikian biaya pokok tersebut harus di tanggung oleh Yayasan atau Komite sekolah. Kesalahan besar pada umumnya sekolah adalah pengelolaan uang BOS atau BPMU yang masuk ke sekolah kemudian masuk ke yayasan kemudian dikelola oleh yayasan. Konsep yang benar adalah bahwa pengelolaan BOS dan BPMU adalah oleh Kepala Sekolah. Temuan kajian, untuk SMKN, sumber anggaran dari APBN dan APBD dan dari Siswa. Ada SMKN yang mampu mengembangkan sumber dana dengan baik sehingga bisa asset fasilitas pembelajaran bisa dilengkapi dan semua program dan kegiatan sekolah dapat didanai secara operasional

SMK Swasta mendapatkan sumber dana dari siswa, bantuan APBN/APBD dan pihak swasta atau Ngo. SMK Swasta yang sumber dananya besar, terlihat sangat maju. Tapi SMK swasta yang sumber dananya terbatas, terlihat berkembang seadanya. Belum ada pemerataan standar mutu dan dukungan sumber dana dari para stakeholder untuk peningkatan mutu lulusan SMKN dan SMKSwasta

No	Aspek	Temuan
1	Pendidikan kejuruan diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja	Kurikulum Administrasi Perkantoran sudah disiapkan sesuai kebutuhan lapangan kerja
2	Pendidikan kejuruan didasarkan atas <i>demand-driven</i> (kebutuhan dunia kerja)	Jurusan Administrasi Perkantoran sesuai <i>demand-driven</i> , dikarenakan ketrampilan jurusan ini dibutuhkan di semua bidang industry
3	Fokus isi pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang	Isi Kurikulum dan silabus pembelajarn di jurusan ini sudah sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang mencakup semua aspek

	dibutuhkan oleh dunia kerja	pembelajaran siswa dan sesuai kebutuhan dunia kerja
4	Penilaian yang sesungguhnya terhadap kesuksesan siswa harus pada <i>hands-on</i> atau performa dalam dunia kerja	Proses penilaian capaian kompetensi siswa sudah mengacu pada SOP tapi masih dominan pada aspek kognitif, belum maksimal pada aspek afektif atau ketrampilan kerja yang harusnya dimiliki oleh setiap siswa yang siap kerja
5	Hubungan yang erat dengan dunia kerja merupakan kunci sukses pendidikan kejuruan	Hubungan dunia kerja dengan program pendidikan di SMK, diwujudkan dalam bentuk kerjasama magang atau studi lapangan. Namun, pada saat magang, ketrampilan jurusan kurang mendapat perhatian. Di beberapa tempat ditemukan bahwa siswa magang diberikan tugas yang sangat teknis seperti mengetik, mencatat dan lain-lain. Siswa belum maksimal dilatih untuk tugas administrasi perkantoran yang lebih mahir.
6	Pendidikan kejuruan yang baik adalah responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi	Jurusan ini sudah terlihat responsive dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi. Kurikulum pendidikan Informasi Teknologi sudah diberikan. Dalam praktek kerja, siswa juga dilatih menggunakan atau mengakses semua kemajuan teknologi terkini. Namun, fasilitas dan sarana pembelajaran yang mendukung untuk penggunaan teknologi terbaru, masih kurang atau sangat

		<p>terbatas. Contoh ; terbatasnya kapasitas wifi di sekolah, jumlah computer dengan spesifikasi terkini.</p> <p>Ruang laboratorium campur dengan jurusan lain</p>
7	<p>Pendidikan kejuruan lebih ditekankan pada “<i>learning by doing</i>” dan “<i>hands-on experience</i>”</p>	<p>Metode pembelajaran yang menekankan “<i>learning by doing</i>” dan “<i>hands-on experience</i>” sudah mulai diterapkan namun di beberapa SMK masih terlihat seadanya saja. Metode ini perlu didukung oleh media pembelajaran dan fasilitas pembelajaran yang sangat lengkap. Kenyataannya, ada SMK yang masih terbatas daya dukungnya, ada juga SMK yang berlebih daya dukungnya tapi belum dimanfaatkan secara optimal dan ada yang seimbang antara daya dukung dan metode pembejarannya.</p>
8	<p>Pendidikan kejuruan memerlukan fasilitas yang mutakhir untuk praktik</p>	<p>Situasinya sama dengan penjelasa di point ‘g’ di atas</p>
9	<p>Pendidikan kejuruan memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar daripada pendidikan umum Pendidikan kejuruan memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar</p>	<p>Untuk SMKN, sumber anggaran dari APBN dan APBD dan dari Siswa. Ada SMKN yang mampu mengembangkan sumber dana dengan baik sehingga bisa asset fasilitas pembelajaran bisa dilengkapi dan semua program dan kegiatan sekolah dapat didanai secara</p>

	<p>daripada pendidikan umum</p>	<p>operasional</p> <p>SMK Swasta mendapatkan sumber dana dari siswa, bantuan APBN/APBD dan pihak swasta atau Ngo. SMK Swasta yang sumber dananya besar, terlihat sangat maju. Tapi SMK swasta yang sumber dananya terbatas, terlihat berkembang seadanya. Belum ada pemerataan standar mutu dan dukungan sumber dana dari para stakeholder untuk peningkatan mutu lulusan SMKN dan SMKSwasta</p>
--	---------------------------------	--

5.2. Jurusan Pariwisata

1. Pendidikan kejuruan diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja. Untuk menciptakan suatu suasana belajar yang mirip dengan dunia kerja dan dunia industri, diperlukan banyak perlengkapan, sarana dan prasarana. Ketersediaannya bengkel yang lengkap dengan alat dan bahannya akan memberikan pengalaman belajar yang hampir sama dengan di lapangan sehingga ketika peserta didik berinteraksi langsung dengan dunia industri, telah memiliki kemandirian dan keterampilan kerja sesuai yang diharapkan. Untuk membuat suatu replica sesuai lingkungan kerja, maka diperlukan biaya yang besar sehingga kami yakin bahwa tidak semua sekolah kejuruan dapat melakukan hal tersebut karena masalah pendanaan. Oleh karena itu, kerjasama dengan industri sangat diperlukan untuk mewujudkan hal ini. Misalnya menerima peserta didik. Temuan kajian, Kurikulum Pariwisata sudah disiapkan sesuai kebutuhan lapangan kerja setempat.

2. Pendidikan kejuruan didasarkan atas *demand-driven* (kebutuhan dunia kerja). Jurusan Pariwisata sesuai *demand-driven*, dikarenakan keterampilan jurusan ini dibutuhkan di kawasan pariwisata setempat. Sarana Prasarana belajar mengajar dan praktikum di SMK harus berstandar dan selalu mengikuti perkembangan teknologi sehingga bermanfaat bagi peserta didik. Prasarana dan sarana pendidikan adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolok ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih. Manajemen prasarana dan sarana sangat diperlukan dalam menunjang tujuan pendidikan yang sekaligus menunjang pembangunan nasional, oleh karena itu diperlukan pengetahuan dan pemahaman konseptual yang jelas agar dalam implementasinya tidak salah arah. Hampir di setiap kota tersedia tempat pariwisata, hotel, restaurant, dll, sehingga jurusan ini sudah sesuai kebutuhan dunia usaha.

Temuan kajian, Jurusan Pariwisata sesuai *demand-driven*, dikarenakan ketrampilan jurusan ini dibutuhkan di kawasan pariwisata setempat. Hampir di setiap kota tersedia tempat pariwisata, hotel, restaurant, dll, sehingga jurusan ini sudah sesuai kebutuhan dunia usaha.

3. Fokus isi pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Menurut *Brooks&Broks* , 2001 dalam John, 2008 dalam Dedy: 2010 bahwa dalam pandangan konstruktivis, guru bukan sekedar memberi informasi ke pikiran anak, akan tetapi guru harus mendorong anak untuk mengeksplorasi dunia mereka, menemukan pengetahuan, merenung dan berfikir secara kritis. Dalam kegiatan belajar mengajar, seorang guru merupakan fasilitator serta harus senantiasa memberi bimbingan motivasi kepada anak untuk selalu menjadi orang yang baik dalam hal ini mencakup tiga hal pokok yaitu, baik dalam pendidikan yaitu menguasai pengetahuan, keterampilan(*skill*), baik dalam kehidupan social yaitu

senantiasa berfikir maju, jujur, berdisiplin tinggi, serta baik terhadap sang maha pencipta yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga segala sesuatu yang ia lakukan senantiasa berlandaskan pada etika dan agama yang akan memlahirkan satu perbuatan/tindakan/sikap yang baik dan benar.

Temuan kajian, isi kurikulum dan silabus pembelajarn di jurusan ini sudah sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang mencakup semua aspek pembelajaran siswa dan sesuai kebutuhan dunia perkembangan pariwisata.

4. Penilaian yang sesungguhnya terhadap kesuksesan siswa harus pada *hands-on* atau performa dalam dunia kerja. Kualifikasi tenaga pendidikan kejuruan merupakan salah satu hal yang fundamental untuk memperoleh kualitas sesuai dengan yang diharapkan. Para tenaga pendidik kejuruan harus menguasai dan memahami konsep Pedagogik Kejuruan). Selain itu, mereka juga harus memiliki pengalaman mengajar dan pengetahuan tentang dunia kerja serta memiliki keahlian di bidangnya. Dengan memahami dari konsep Pedagogik Kejuruan para Guru (mampu mendesain strategi pembelajaran berlandaskan kurikulum yang telah disempurnakan bersama-sama pemerintah dan industry. Kemampuan Pedagogik bukan hanya suatu konsep yang diterapkan secara teoritis tetapi juga menggunakan dan mengembangkannya melalui pembelajaran yang dilakukan di bengkel/ lab. Sehingga para peserta didik tetap dikendalikan dengan konsep Pedagogik yang benar sesuai dengan semangat dan jiwa dari suatu jenis pekerjaan. Sehingga dalam proses belajar mengajar, peserta didik seakan merasa bahwa mereka berada dalam lingkungan industry yang nyata.

Temuan kajian, proses penilaian capaian kompetensi siswa sudah mengacu pada SOP tapi masih dominan pada aspek kognitif, belum maksimal pada aspek afektif atau ketrampilan kerja yang harusnya dimiliki oleh setiap siswa yang siap kerja. Beberapa hotel dan restaurant mengeluhkan bahwa lulusan SMK jurusan ini, skill-

nya belum pada tingkat mahir sehingga pihak usaha masih harus banyak membimbing lagi.

5. Hubungan yang erat dengan dunia kerja merupakan kunci sukses pendidikan kejuruan. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah bagian dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan mempersiapkan tenaga yang memiliki keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan persyaratan lapangan kerja dan mampu mengembangkan potensi dirinya dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dalam proses pendidikan kejuruan perlu ditanamkan pada peserta didik pentingnya penguasaan pengetahuan dan teknologi, keterampilan bekerja, sikap mandiri, efektif dan efisien dan pentingnya keinginan sukses dalam kariernya sepanjang hayat. Oleh karena itu, arah pengembangan pendidikan kejuruan diorientasikan pada permintaan pasar kerja. Orientasi berdasarkan permintaan pasar dapat dilakukan dengan pengembangan kurikulum yang mempertimbangan perkembangan dunia industri.

Temuan kajian, hubungan dunia kerja dengan program pendidikan di SMK, diwujudkan dalam bentuk kerjasama magang atau studi lapangan di beberapa tempat pariwisata. Namun, pada saat magang, ketrampilan jurusan kurang mendapat perhatian. Di beberapa tempat ditemukan bahwa siswa magang diberikan tugas administratif, belum sesuai kejuruannya. Siswa belum maksimal dilatih untuk tugas kejuruan pariwisata yang lebih mahir. Beberapa tempat magang, tidak mau beresiko mengalami kerugian jika memberikan job yang besar kepada siswa magang.

6. Pendidikan kejuruan yang baik adalah responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi. *Work-Based Learning (WBL)* adalah bentuk pembelajaran kontekstual dimana proses pembelajaran dipusatkan pada tempat kerja dan meliputi program yang terencana dari pelatihan formal dan mentoring, dan pencarian pengalaman kerja yang mendapatkan gaji. *WBL* secara ekspresif menggabungkan antara pengetahuan teori dengan

pengetahuan praktik, *WBL* percaya bahwa tempat kerja menawarkan kesempatan yang banyak untuk belajar seperti di ruang kelas. Sistem magang merupakan salah satu bentuk *WBL*. Dalam sistem ini peserta didik belajar dengan seorang ahli atau maestro melalui pengamatan dan imitasi perilaku dan cara kerjanya dengan intens sehingga bisa mendapatkan pengalaman spesifik.

Temuan kajian, jurusan ini sudah terlihat responsive dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi. Kurikulum pendidikan Informasi Teknologi sudah diberikan. Dalam praktek kerja, siswa juga dilatih menggunakan atau mengakses semua kemajuan teknologi terkini. Namun, fasilitas dan sarana pembelajaran yang mendukung untuk penggunaan teknologi terbaru, masih kurang atau sangat terbatas. Contoh ; terbatasnya kapasitas wifi di sekolah, jumlah computer dengan spesifikasi terkini, aplikasi-aplikasi android, dll. Akses pariwisata online sudah banyak dikembangkan oleh dunia usaha pariwisata, namun beberapa siswa dan tempat pariwisata belum menyiapkan sumber daya dukungnya.

7. Pendidikan kejuruan lebih ditekankan pada “*learning by doing*” dan “*hands-on experience*”. Pembukaan dan penutupan suatu SMK pada dasarnya sangat tergantung pada tuntutan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di wilayah atau daerah setempat. Pembukaan institusi SMK baru sangat dimungkinkan jika terdapat tuntutan kebutuhan sumber daya manusia yang terkait dengan peran dan fungsi SMK. Sebagaimana yang dikemukakan Djojonegoro (1998), bahwa “Secara teoritik pendidikan kejuruan sangat dipentingkan karena lebih dari 80 persen tenaga kerja di lapangan kerja adalah tenaga kerja tingkat menengah ke bawah dan sisanya kurang dari 20 persen bekerja pada lapisan atas. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan kejuruan jelas merupakan hal penting”. Jadi apabila program keahlian tertentu dibutuhkan oleh industri, maka perlu dibuka program keahlian baru dan jika lulusan dari program keahlian tersebut sudah tidak dibutuhkan oleh masyarakat industry maka program keahlian tersebut perlu ditutup dahulu

untuk menghemat biaya operasional, dan jika di suatu saat dibutuhkan lagi oleh masyarakat, maka program keahlian tersebut bisa dibuka kembali.

Temuan kajian, metode pembelajaran yang menekankan “*learning by doing*” dan “*hands-on experience*” sudah mulai diterapkan namun di beberapa SMK masih terlihat seadanya saja. Metode ini perlu didukung oleh media pembelajaran dan fasilitas pembelajaran yang sangat lengkap. Kenyataannya, ada SMK yang masih terbatas daya dukungnya, ada juga SMK yang berlebih daya dukungnya tapi belum dimanfaatkan secara optimal dan ada yang seimbang antara daya dukung dan metode.

8. Pendidikan kejuruan memerlukan fasilitas yang mutakhir untuk praktik. Sebesar-besarnya anggaran yang ada tentu tidak dapat memenuhi semua perkembangan kebutuhan sarana prasarana SMK yang mengikuti pertumbuhan jumlah peserta didik SMKnya. Untuk mempercepat penetrasi pemerataan ke setiap SMK yang muncul, perlu inovasi bagaimana dapat menciptakan sarana prasarana yang murah. Karena pemerintah belum sepenuhnya mampu memberikan fasilitas yang lengkap sesuai yang ada di dunia industri, maka kerjasama antara dunia industri dan dunia SMK menjadi salah satu jawaban, dimana terdapat sharing resources untuk beberapa keperluan yang selama ini berjalan masing-masing. Sehingga ada efisiensi biaya produksi dan pemasaran yang “cukup sangat signifikan sekali”. Oleh karena itu harus ada kerjasama “seluas-luasnya, kepada semua institusi terkait, DUDI untuk bersama-sama menciptakan perekonomian Indonesia yang lebih baik, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui Pengembangan Industri berbasis SMK. Hal ini dapat saling membantu antara pendidikan dengan kebutuhan dunia industri. Temuan kajian, situasinya sama dengan penjabaran di point 7 di atas.

9. Pendidikan kejuruan memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar daripada pendidikan umum Pendidikan kejuruan memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar daripada pendidikan umum. Guru merupakan salah satu pelaku dalam kegiatan sekolah. Oleh karena itu, ia dituntut untuk mengenal tempat bekerjanya itu. Pemahaman tentang apa yang terjadi sekolah akan banyak membantu mereka memperlancar tugasnya sebagai pengelola langsung proses belajar mengajar. Tenaga pendidik dan laboran di SMK harus benar-benar mempunyai keahlian baik teori maupun praktek serta selalu dapat mengikuti perkembangan pendidikan serta teknologi dan merupakan tenaga perdidik yang bersertifikat. menggunakan guru outsourcing yang benar benar menguasai seluk beluk pekerjaan, alat, bahan dan lingkungan dunia industri akan memberikan pemahaman konsep terhadap peserta didik tentang apa yang akan mereka lakukan ketika sampai di industri sehingga peserta didik betul betul telah siap bekerja. Hal ini akan memberikan penghematan terhadap industri karena dapat mengurangi biaya dan tenaga dalam melakukan training terhadap tenaga kerja baru.

Temuan kajian, Untuk SMKN, sumber anggaran dari APBN dan APBD dan dari Siswa. Ada SMKN yang mampu mengembangkan sumber dana dengan baik sehingga bisa asset fasilitas pembelajaran bisa dilengkapi dan semua program dan kegiatan sekolah dapat didanai secara operasional. SMK Swasta mendapatkan sumber dana dari siswa, bantuan APBN/APBD dan pihak swasta atau Ngo. SMK Swasta yang sumber dananya besar, terlihat sangat maju. Tapi SMK swasta yang sumber dananya terbatas, terlihat berkembang seadanya. Belum ada pemerataan standar mutu dan dukungan sumber dana dari para stakeholder untuk peningkatan mutu lulusan SMKN dan SMKSwasta

No	Aspek	Temuan
1	Pendidikan kejuruan diarahkan untuk mempersiapkan peserta	Kurikulum Pariwisata sudah disiapkan sesuai kebutuhan lapangan kerja

	didik memasuki lapangan kerja	setempat.
2	Pendidikan kejuruan didasarkan atas <i>demand-driven</i> (kebutuhan dunia kerja)	Jurusan Pariwisata sesuai <i>demand-driven</i> , dikarenakan ketrampilan jurusan ini dibutuhkan di kawasan pariwisata setempat. Hampir di setiap kota tersedia tempat pariwisata, hotel, restaurant, dll, sehingga jurusan ini sudah sesuai kebutuhan dunia usaha.
3	Fokus isi pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh dunia kerja	Isi Kurikulum dan silabus pembelajarn di jurusan ini sudah sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang mencakup semua aspek pembelajaran siswa dan sesuai kebutuhan dunia perkembangan pariwisata
4	Penilaian yang sesungguhnya terhadap kesuksesan siswa harus pada <i>hands-on</i> atau performa dalam dunia kerja	Proses penilaian capaian kompetensi siswa sudah mengacu pada SOP tapi masih dominan pada aspek kognitif, belum maksimal pada aspek afektif atau ketrampilan kerja yang harusnya dimiliki oleh setiap siswa yang siap kerja. Beberapa hotel dan restaurant mengeluhkan bahwa lulusan SMK jurusan ini, skill-nya belum pada tingkat mahir sehingga pihak usaha masih harus banyak membimbing lagi.
5	Hubungan yang erat dengan dunia kerja merupakan kunci sukses pendidikan kejuruan	Hubungan dunia kerja dengan program pendidikan di SMK, diwujudkan dalam bentuk kerjasama magang atau studi lapangan di beberapa tempat pariwisata.

		<p>Namun, pada saat magang, ketrampilan jurusan kurang mendapat perhatian. Di beberapa tempat ditemukan bahwa siswa magang diberikan tugas administrative, belum sesuai kejuruannya. Siswa belum maksimal dilatih untuk tugas kejuruan pariwisata yang lebih mahir. Beberapa tempat magang, tidak mau beresiko mengalami kerugian jika memberikan job yang besar kepada siswa magang.</p>
6	<p>Pendidikan kejuruan yang baik adalah responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi</p>	<p>Jurusan ini sudah terlihat responsive dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi. Kurikulum pendidikan Informasi Teknologi sudah diberikan. Dalam praktek kerja, siswa juga dilatih menggunakan atau menakses semua kemajuan teknologi terkini. Namun, fasilitas dan sarana pembelajaran yang mendukung untuk penggunaan teknologi terbaru, masih kurang atau sangat terbatas. Contoh ; terbatasnya kapasitas wifi di sekolah, jumlah computer dengan spesifikasi terkini, aplikasi-aplikasi android, dll</p> <p>Akses pariwisata online sudah banyak dikembangkan oleh dunia usaha pariwisata, namun beberapa siswa dan tempat pariwisata belum menyiapkan sumber daya dukungnya.</p>

7	Pendidikan kejuruan lebih ditekankan pada “ <i>learning by doing</i> ” dan “ <i>hands-on experience</i> ”	Metode pembelajaran yang menekankan “ <i>learning by doing</i> ” dan “ <i>hands-on experience</i> ” sudah mulai diterapkan namun di beberapa SMK masih terlihat seadanya saja. Metode ini perlu didukung oleh media pembelajaran dan fasilitas pembelajaran yang sangat lengkap. Kenyataannya, ada SMK yang masih terbatas daya dukungnya, ada juga SMK yang berlebih daya dukungnya tapi belum dimanfaatkan secara optimal dan ada yang seimbang antara daya dukung dan metode pembejarannya.
8	Pendidikan kejuruan memerlukan fasilitas yang mutakhir untuk praktik	Situasinya sama dengan penjelasa di point 7 di atas
9	Pendidikan kejuruan memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar daripada pendidikan umum Pendidikan kejuruan memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar daripada pendidikan umum	Untuk SMKN, sumber anggaran dari APBN dan APBD dan dari Siswa. Ada SMKN yang mampu mengembangkan sumber dana dengan baik sehingga bisa asset fasilitas pembelajaran bisa dilengkapi dan semua program dan kegiatan sekolah dapat didanai secara operasional SMK Swasta mendapatkan sumber dana dari siswa, bantuan APBN/APBD dan pihak swasta atau Ngo. SMK Swasta yang sumber dananya besar, terlihat sangat maju. Tapi SMK swasta yang

		sumber dananya terbatas, terlihat berkembang seadanya. Belum ada pemerataan standar mutu dan dukungan sumber dana dari para stakeholder untuk peningkatan mutu lulusan SMKN dan SMKSwasta
--	--	---

5.3. Jurusan Broadcasting

1. Pendidikan kejuruan diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja. Untuk menciptakan suatu suasana belajar yang mirip dengan dunia kerja dan dunia industri, diperlukan banyak perlengkapan, sarana dan prasarana. Ketersediaannya bengkel yang lengkap dengan alat dan bahannya akan memberikan pengalaman belajar yang hampir sama dengan di lapangan sehingga ketika peserta didik berinteraksi langsung dengan dunia industri, telah memiliki kemandirian dan keterampilan kerja sesuai yang diharapkan. Untuk membuat suatu replica sesuai lingkungan kerja, maka diperlukan biaya yang besar sehingga kami yakin bahwa tidak semua sekolah kejuruan dapat melakukan hal tersebut karena masalah pendanaan. Oleh karena itu, kerjasama dengan industri sangat diperlukan untuk mewujudkan hal ini. Misalnya menerima peserta didik. Kurikulum Broadcasting sudah disiapkan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Namun terbatasnya lahan kerja untuk kejuruan Broadcasting menjadi tantangan tersendiri. Jurusan ini masih banyak berorientasi pada ketrampilan yang terkait dengan dunia pertelevisian.
2. Pendidikan kejuruan didasarkan atas *demand-driven* (kebutuhan dunia kerja). Jurusan Pariwisata sesuai *demand-driven*, dikarenakan ketrampilan jurusan ini dibutuhkan di kawasan pariwisata setempat. Sarana Prasarana belajar mengajar dan praktikum di SMK harus

berstandar dan selalu mengikuti perkembangan teknologi sehingga bermanfaat bagi peserta didik. Prasarana dan sarana pendidikan adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolok ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih. Manajemen prasarana dan sarana sangat diperlukan dalam menunjang tujuan pendidikan yang sekaligus menunjang pembangunan nasional, oleh karena itu diperlukan pengetahuan dan pemahaman konseptual yang jelas agar dalam implementasinya tidak salah arah. Jurusan Broadcasting belum optimal sesuai *demand-driven*, dikarenakan keterampilan jurusan ini belum banyak dibutuhkan di kawasan industri setempat. Terbatasnya dunia industri pertelevisian, radio dan sejenisnya, membuat jurusan ini mengajarkan kepada siswa ketrampilan broadcasting yang lebih sederhana tapi bisa bekerja di event-event acara tertentu seperti pernikahan, panggung dan event lainnya. Keterampilan yang banyak diajarkan juga menyesuaikan kebutuhan tersebut, contoh ketrampilan fotografer, lighting, MC, dll. Padahal kurikulum kejuruan broadcasting sangat luas.

3. Fokus isi pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Menurut *Brooks&Broks*, 2001 (Dedy, 2010) bahwa dalam pandangan konstruktivis, guru bukan sekedar memberi informasi ke pikiran anak, akan tetapi guru harus mendorong anak untuk mengeksplorasi dunia mereka, menemukan pengetahuan, merenung dan berfikir secara kritis. Dalam kegiatan belajar mengajar, seorang guru merupakan fasilitator serta harus senantiasa memberi bimbingan motivasi kepada anak untuk selalu menjadi orang yang baik dalam hal ini mencakup tiga hal pokok yaitu, baik dalam pendidikan yaitu menguasai pengetahuan, keterampilan (*skill*), baik dalam kehidupan social yaitu senantiasa berfikir maju, jujur, berdisiplin tinggi, serta baik

terhadap sang maha pencipta yaitu beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa sehingga segala sesuatu yang ia lakukan senantiasa berlandaskan pada etika dan dan agama yang akan memlahirkan satu perbuatan/tindakan/ sikap yang baik dan benar. Isi Kurikulum dan silabus pembelajarn di jurusan ini sudah sesuai tapi terbatas dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang mencakup semua aspek pembelajaran siswa dan sesuai kebutuhan dunia usaha terkait di sekitar kawasan Sekolah.

4. Penilaian yang sesungguhnya terhadap kesuksesan siswa harus pada *hands-on* atau performa dalam dunia kerja. Kualifikasi tenaga pendidikan kejuruan merupakan salah satu hal yang fundamental untuk memperoleh kualitas sesuai dengan yang diharapkan. Para tenaga pendidik kejuruan harus menguasai dan memahami konsep Pedagogik Kejuruan). Selain itu, mereka juga harus memiliki pengalaman mengajar dan pengetahuan tentang dunia kerja serta memiliki keahlian di bidangnya. Dengan memahami dari konsep Pedagogik Kejuruan para Guru (mampu mendesain strategi pembelajaran berlandaskan kurikulum yang telah disempurnakan bersama-sama pemerintah dan industri. Kemampuan Pedagogik bukan hanya suatu konsep yang diterapkan secara teoritis tetapi juga menggunakan dan mengembangkannya melalui pembelajaran yang dilakukan di bengkel/ lab. Sehingga para peserta didik tetap dikendalikan dengan konsep Pedagogik yang benar sesuai dengan semangat dan jiwa dari suatu jenis pekerjaan. Sehingga dalam proses belajar mengajar, peserta didik seakan merasa bahwa mereka berada dalam lingkungan industry yang nyata. Proses penilaian capaian kompetensi siswa sudah mengacu pada SOP tapi masih dominan pada aspek kognitif, belum maksimal pada aspek afektif atau ketrampilan kerja yang harusnya dimiliki oleh setiap siswa yang siap kerja.

5. Hubungan yang erat dengan dunia kerja merupakan kunci sukses pendidikan kejuruan. SMK adalah bagian dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan mempersiapkan tenaga yang memiliki keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan kebutuhan persyaratan lapangan kerja dan mampu mengembangkan potensi dirinya dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dalam proses pendidikan kejuruan perlu ditanamkan pada peserta didik pentingnya penguasaan pengetahuan dan teknologi, keterampilan bekerja, sikap mandiri, efektif dan efisien dan pentingnya keinginan sukses dalam kariernya sepanjang hayat. Oleh karena itu, arah pengembangan pendidikan kejuruan diorientasikan pada permintaan pasar kerja. Orientasi berdasarkan permintaan pasar dapat dilakukan dengan pengembangan kurikulum yang mempertimbangan perkembangan dunia industri. Hubungan dunia kerja dengan program pendidikan di SMK, diwujudkan dalam bentuk kerjasama magang atau studi lapangan di beberapa tempat pariwisata. Namun, pada saat magang, ketrampilan jurusan kurang mendapat perhatian. Di beberapa tempat ditemukan bahwa siswa magang diberikan tugas administrative, belum sesuai kejurumannya. Siswa belum maksimal dilatih untuk tugas kejuruan ini yang lebih mahir. Beberapa tempat magang, tidak mau beresiko mengalami kerugian jika memberikan job yang besar kepada siswa magang.
6. Pendidikan kejuruan yang baik adalah responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi. *Work-Based Learning (WBL)* adalah bentuk pembelajaran kontekstual di mana proses pembelajaran dipusatkan pada tempat kerja dan meliputi program yang terencana dari pelatihan formal dan mentoring, dan pencarian pengalaman kerja yang mendapatkan gaji. *WBL* secara ekspresif menggabungkan antara pengetahuan teori dengan pengetahuan praktik, *WBL* percaya bahwa tempat kerja menawarkan kesempatan yang banyak untuk belajar

seperti di ruang kelas. Sistem magang merupakan salah satu bentuk WBL. Dalam sistem ini peserta didik belajar dengan seorang ahli atau maestro melalui pengamatan dan imitasi perilaku dan cara kerjanya dengan intens sehingga bisa mendapatkan pengalaman spesifik. Jurusan ini sudah terlihat responsive dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi. Kurikulum pendidikan Informasi Teknologi sudah diberikan. Dalam praktek kerja, siswa juga dilatih menggunakan atau menakses semua kemajuan teknologi terkini. Namun, fasilitas dan sarana pembelajaran yang mendukung untuk penggunaan teknologi terbaru, masih kurang atau sangat terbatas. Contoh ; terbatasnya kapasitas wifi di sekolah, jumlah computer dengan spesifikasi terkini, aplikasi-aplikasi android, dll.

7. Pendidikan kejuruan lebih ditekankan pada “*learning by doing*” dan “*hands-on experience*”. Pembukaan dan penutupan suatu SMK pada dasarnya sangat tergantung pada tuntutan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di wilayah atau daerah setempat. Pembukaan institusi SMK baru sangat dimungkinkan jika terdapat tuntutan kebutuhan sumber daya manusia yang terkait dengan peran dan fungsi SMK. Sebagaimana yang dikemukakan Djojonegoro (1998), bahwa : “Secara teoritik pendidikan kejuruan sangat dipentingkan karena lebih dari 80 % tenaga kerja di lapangan kerja adalah tenaga kerja tingkat menengah ke bawah dan sisanya kurang dari 20 % bekerja pada lapisan atas. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan kejuruan jelas merupakan hal penting”. Jadi apabila program keahlian tertentu dibutuhkan oleh industri, maka perlu dibuka program keahlian baru dan jika lulusan dari program keahlian tersebut sudah tidak dibutuhkan oleh masyarakat industry maka program keahlian tesebut perlu ditutup dahulu untuk menghemat biaya operasional, dan jika di suatu saat dibutuhkan lagi oleh masyarakat, maka program keahlian tersebut bisa dibuka kembali. Metode pembelajaran yang menekankan *learning by*

doing dan *hands-on experience* sudah mulai diterapkan namun di beberapa SMK masih terlihat seadanya saja. Metode ini perlu didukung oleh media pembelajaran dan fasilitas pembelajaran yang sangat lengkap. Kenyataannya, ada SMK yang masih terbatas daya dukungnya, ada juga SMK yang berlebih daya dukungnya tapi belum dimanfaatkan secara optimal dan ada yang seimbang antara daya dukung dan metode pembelajarannya.

8. Pendidikan kejuruan memerlukan fasilitas yang mutakhir untuk praktik. Sebesar-besarnya anggaran yang ada tentu tidak dapat memenuhi semua perkembangan kebutuhan sarana prasarana SMK yang mengikuti pertumbuhan jumlah peserta didik SMKnya. Untuk mempercepat penetrasi pemerataan ke setiap SMK yang muncul, perlu inovasi bagaimana dapat menciptakan sarana prasarana yang murah. Karena pemerintah belum sepenuhnya mampu memberikan fasilitas yang lengkap sesuai yang ada di dunia industri, maka kerjasama antara dunia industri dan dunia SMK menjadi salah satu jawaban, dimana terdapat *sharing resources* untuk beberapa keperluan yang selama ini berjalan masing-masing. Sehingga ada efisiensi biaya produksi dan pemasaran yang “cukup sangat signifikan sekali”. Oleh karena itu harus ada kerjasama “seluas-luasnya, kepada semua institusi terkait, Dunia Usaha dan Dunia Industri untuk bersama-sama menciptakan perekonomian Indonesia yang lebih baik, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui Pengembangan Industri berbasis SMK. Hal ini dapat saling membantu antara pendidikan dengan kebutuhan dunia industri.
9. Pendidikan kejuruan memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar daripada pendidikan umum. Pendidikan kejuruan memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar daripada pendidikan umum. SMKN, sumber anggaran dari APBN dan APBD dan dari Siswa. Ada SMKN yang mampu mengembangkan sumber

dana dengan baik sehingga bisa asset fasilitas pembelajaran bisa dilengkapi dan semua program dan kegiatan sekolah dapat didanai secara operasional. SMK Swasta mendapatkan sumber dana dari siswa, bantuan APBN/APBD dan pihak swasta atau Ngo. SMK Swasta yang sumber dananya besar, terlihat sangat maju. Tapi SMK swasta yang sumber dananya terbatas, terlihat berkembang seadanya. Belum ada pemerataan standar mutu dan dukungan sumber dana dari para stakeholder untuk peningkatan mutu lulusan SMKN dan SMKSwasta.

Guru merupakan salah satu pelaku dalam kegiatan sekolah. Oleh karena itu, ia dituntut untuk mengenal tempat bekerjanya itu. Pemahaman tentang apa yang terjadi sekolah akan banyak membantu mereka memperlancar tugasnya sebagai pengelola langsung proses belajar mengajar. Tenaga pendidik dan laboran di SMK harus benar – benar mempunyai keahlian baik teori maupun praktek serta selalu dapat mengikuti perkembangan pendidikan serta teknologi dan merupakan tenaga perdidik yang bersertifikat. menggunakan guru outsourcing yang benar benar menguasai seluk beluk pekerjaan, alat, bahan dan lingkungan dunia industri akan memberikan pemahaman konsep terhadap peserta didik tentang apa yang akan mereka lakukan ketika sampai di industri sehingga peserta didik betul betul telah siap bekerja. Hal ini akan memberikan penghematan terhadap industri karena dapat mengurangi biaya dan tenaga dalam melakukan training terhadap tenaga kerja baru.

No	Aspek	Temuan
1	Pendidikan kejuruan diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja	Kurikulum Broadcasting sudah disiapkan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Namun terbatasnya lahan kerja untuk kejuruan Broadcasting menjadi tantangan tersendiri. Jurusan ini masih banyak berorientasi pada ketrampilan yang terkait dengan dunia pertelevisian.

2	Pendidikan kejuruan didasarkan atas <i>demand-driven</i> (kebutuhan dunia kerja)	Jurusan Broadcasting belum optimal sesuai <i>demand-driven</i> , dikarenakan ketrampilan jurusan ini belum banyak dibutuhkan di kawasan industri setempat. Terbatasnya dunia industry pertelevisian, radio dan sejenisnya, membuat jurusan ini mengajarkan kepada siswa ketrampilan broadcasting yang lebih sederhana tapi bisa bekerja di event-event acara tertentu seperti pernikahan, panggung dan event lainnya. Ketrampilan yang banyak diajarkan juga menyesuaikan kebutuhan tersebut, contoh ketrampilan fotografer, lighting, MC, dll. Padahal kurikulum kejuruan broadcasting sangat luas.
3	Fokus isi pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh dunia kerja	Isi Kurikulum dan silabus pembelajarn di jurusan ini sudah sesuai tapi terbatas dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang mencakup semua aspek pembelajaran siswa dan sesuai kebutuhan dunia usaha terkait di sekitar kawasan Sekolah
4	Penilaian yang sesungguhnya terhadap kesuksesan siswa harus pada <i>hands-on</i> atau performa dalam dunia kerja	Proses penilaian capaian kompetensi siswa sudah mengacu pada SOP tapi masih dominan pada aspek kognitif, belum maksimal pada aspek afektif atau ketrampilan kerja yang harusnya dimiliki oleh setiap siswa yang siap kerja.
5	Hubungan yang erat dengan dunia kerja merupakan	Hubungan dunia kerja dengan program pendidikan di SMK, diwujudkan dalam

	kunci sukses pendidikan kejuruan	bentuk kerjasama magang atau studi lapangan di beberapa tempat pariwisata. Namun, pada saat magang, ketrampilan jurusan kurang mendapat perhatian. Di beberapa tempat ditemukan bahwa siswa magang diberikan tugas administrative, belum sesuai kejuruannya. Siswa belum maksimal dilatih untuk tugas kejuruan ini yang lebih mahir. Beberapa tempat magang, tidak mau beresiko mengalami kerugian jika memberikan job yang besar kepada siswa magang.
6	Pendidikan kejuruan yang baik adalah responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi	Jurusan ini sudah terlihat responsive dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi. Kurikulum pendidikan Informasi Teknologi sudah diberikan. Dalam praktek kerja, siswa juga dilatih menggunakan atau menakses semua kemajuan teknologi terkini. Namun, fasilitas dan sarana pembelajaran yang mendukung untuk penggunaan teknologi terbaru, masih kurang atau sangat terbatas. Contoh ; terbatasnya kapasitas wifi di sekolah, jumlah computer dengan spesifikasi terkini, aplikasi-aplikasi android, dll
7	Pendidikan kejuruan lebih ditekankan pada “ <i>learning by doing</i> ” dan “ <i>hands-on experience</i> ”	Metode pembelajaran yang menekankan “ <i>learning by doing</i> ” dan “ <i>hands-on experience</i> ” sudah mulai diterapkan namun di beberapa SMK masih terlihat seadanya saja. Metode ini perlu didukung oleh media pembelajaran dan fasilitas pembelajaran yang sangat lengkap. Kenyataannya, ada SMK

		yang masih terbatas daya dukungnya, ada juga SMK yang berlebih daya dukungnya tapi belum dimanfaatkan secara optimal dan ada yang seimbang antara daya dukung dan metode pembejarannya.
8	Pendidikan kejuruan memerlukan fasilitas yang mutakhir untuk praktik	Situasinya sama dengan penjelasa di point '7' di atas
9	Pendidikan kejuruan memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar daripada pendidikan umum Pendidikan kejuruan memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar daripada pendidikan umum	Untuk SMKN, sumber anggaran dari APBN dan APBD dan dari Siswa. Ada SMKN yang mampu mengembangkan sumber dana dengan baik sehingga bisa asset fasilitas pembelajaran bisa dilengkapi dan semua program dan kegiatan sekolah dapat didanai secara operasional SMK Swasta mendapatkan sumber dana dari siswa, bantuan APBN/APBD dan pihak swasta atau Ngo. SMK Swasta yang sumber dananya besar, terlihat sangat maju. Tapi SMK swasta yang sumber dananya terbatas, terlihat berkembang seadanya. Belum ada pemerataan standar mutu dan dukungan sumber dana dari para stakeholder untuk peningkatan mutu lulusan SMKN dan SMKSwasta

5.4. Model Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Kejuruan Berbasis Kebutuhan

Tujuan dan isi pendidikan kejuruan senantiasa dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berubah dengan pesat, sekaligus juga harus berperan aktif dalam menentukan arah perubahan masyarakat dalam bidang kejuruannya tersebut. Pendidikan kejuruan berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat, melalui dua institusi sosial. Pertama, institusi sosial yang berupa struktur pekerjaan dengan organisasi, pembagian peran atau tugas, dan perilaku yang berkaitan dengan pemilihan, perolehan dan pematapan karir. Kedua, institusi sosial berupa pendidikan dengan fungsi gandanya sebagai media pelestarian budaya sekaligus sebagai media terjadinya perubahan sosial.

Mohammad Ali (2009) mengemukakan bahwa sekurang-kurangnya ada tiga dimensi pokok yang menjadi tantangan bagi SMK secara regional maupun nasional. Pertama, implementasi program pendidikan harus berfokus pada pendayagunaan potensi sumber daya local, dengan mengoptimalkan kerjasama secara intensif dengan institusi pasangan. Kedua, pelaksanaan kurikulum berdasarkan pendekatan yang fleksibel sesuai dengan kecenderungan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kompetensi yang diperoleh peserta didik sebelum dan sesudah mengikuti pendidikan memiliki adaptasi yang tinggi.

Program pendidikan belajar tuntas dengan melibatkan peran aktif dan partisipatif para pemangku kepentingan pendidikan, termasuk optimalisasi peran pemerintah daerah untuk merumuskan pemetaan kompetensi ketenagakerjaan di daerahnya sebagai input bagi SMK dalam penyelenggaraan diklat berkelanjutan. Pendayagunaan potensi sumber daya local, dengan pelaksanaan kurikulum serta kerjasama dari pemerintah daerah harus seiring sejalan dalam rangka membuka peluang lebar pengembangan SMK sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat dan dunia industri. Untuk mencari solusi dari tantangan tersebut di atas, SMK sebagai salah satu lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan

kejuruan harus mampu memberikan layanan pendidikan terbaik kepada peserta didik walaupun kondisi fasilitasnya sangat beragam. Seperti diketahui, bahwa investasi dan pembiayaan operasional terbesar yang dilakukan oleh pemerintah dalam pendidikan kejuruan adalah pada sistem SMK. Pembukaan dan penutupan suatu SMK pada dasarnya sangat tergantung pada tuntutan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di wilayah atau daerah setempat. Pembukaan institusi SMK baru sangat dimungkinkan jika terdapat tuntutan kebutuhan sumber daya manusia yang terkait dengan peran dan fungsi SMK. Sebagaimana yang dikemukakan Djojonegoro (1998), bahwa : “Secara teoritik pendidikan kejuruan sangat dipentingkan karena lebih dari 80 % tenaga kerja di lapangan kerja adalah tenaga kerja tingkat menengah ke bawah dan sisanya kurang dari 20 % bekerja pada lapisan atas.

Oleh karena itu, pengembangan pendidikan kejuruan jelas merupakan hal penting”. Penutupan suatu institusi SMK hanya dimungkinkan jika secara hukum tidak dapat dipertahankan atau karena adanya tuntutan masyarakat yang sama sekali tidak dapat dipertahankan atau dihindari. Namun pada dasarnya, tidak ada alasan untuk menutup SMK selama institusi tersebut masih dapat menjalankan peran dan fungsi serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. pengembangan (pembukaan) program keahlian SMK harus *Link and Match* dengan kebutuhan pasar kerja. link and match pada dasarnya adalah *supply-demand* dalam arti luas, yaitu dunia pendidikan sebagai penyiapan SDM, dan individu, masyarakat, serta dunia kerja sebagai pihak yang membutuhkan. Ada empat aspek kebutuhan yang perlu diantisipasi oleh pendidikan, yaitu:

1. kebutuhan pribadi atau individu.
2. kebutuhan keluarga.
3. kebutuhan masyarakat/bangsa, dan
4. kebutuhan dunia kerja atau dunia usaha. Untuk menciptakan link and mach antara pendidikan dan dunia kerja/ usaha/industri, diperlukan usaha-usaha secara reciprocal antara kedua pihak.

Dunia kerja/usaha/industri dituntut untuk lebih membuka diri terhadap pendidikan, baik dalam arti sikap maupun tindakan nyata termasuk menjadi menjadi tempat magang dan praktek lapangan bagi para peserta didik. Di pihak lain, dunia pendidikan dituntut untuk melakukan konsolidasi mulai tahap perencanaan sampai implementasi dan evaluasinya sehingga kebijakan ini mempunyai arti yang maksimal, sesuai dengan tujuannya. Adapun strategi dasar implementasi untuk SMK dalam *link and match* adalah :

1. Menggiatkan kunjungan lapangan dan praktek lapangan sebagai bagian integral kurikulum
2. Meningkatkan program magang di dunia usaha/industri
3. Meningkatkan jumlah dan mutu sarana, prasarana, dan tenaga
4. Meningkatkan daya tarik SMK sebagai pilihan yang mempunyai prospek yang baik untuk masa depan. Kegiatan kunjungan ke industri akan memberikan informasi mengenai perkembangan industri, tenaga kerja yang sangat dibutuhkan dan yang kurang dibutuhkan saat ini.

Jadi apabila program keahlian tertentu dibutuhkan oleh industri, maka perlu dibuka program keahlian baru dan jika lulusan dari program keahlian tersebut sudah tidak dibutuhkan oleh masyarakat industri maka program keahlian tersebut perlu ditutup dahulu untuk menghemat biaya operasional, dan jika di suatu saat dibutuhkan lagi oleh masyarakat, maka program keahlian tersebut bisa dibuka kembali.

5.5. Hambatan

1. Masih lemahnya implementasi kurikulum. Penerapan kurikulum 2013 secara cukup masif pada tahun 2014 berdampingan dengan masih diterapkannya kurikulum 2006, menimbulkan beberapa masalah. Kurikulum 2013 dinilai sebagian pihak belum cukup dikaji dan belum mengalami uji coba yang memadai untuk diterapkan secara demikian masif. Masalah bertambah karena keterbatasan materi ajar serta masih rendahnya pemahaman pendidik, kepala sekolah, dan orang tua. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kurikulum 2013.
2. Masih lemahnya system penilaian pendidikan. Sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan terpercaya belum sepenuhnya terbangun. Hal ini antara lain dapat dilihat dengan belum adanya: (i) keandalan dan kesahihan sistem ujian nasional; (ii) minimnya upaya untuk memperkuat lembaga penilaian pendidikan yang independen; (iii) belum direviunya peran, struktur dan sumber daya pusat penilaian pendidikan; (iv) belum dimanfaatkannya hasil pemantauan capaian belajar siswa sebagai informasi peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan; serta (v) terbatasnya kemampuan pendidik dalam memberikan penilaian formatif.

3. Masih lamanya masa tunggu lulusan SMK untuk masuk ke dunia kerja. Minimnya keselarasan antara dunia kerja dengan kualitas lulusan SMK merupakan salah satu faktor yang mendorong masih rendahnya penyerapan lulusan SMK pada dunia kerja pada tahun kelulusan yaitu setiap bulan agustus. Merupakan penyebab masih tingginya pengangguran terbuka dan rata-rata bagi lulusan SMK.
4. Terjadi benturan Kebijakan Pusat dengan Kebijakan Daerah. SMK sudah menghasilkan produk dari Edotel dan Chatering, namun ketika diperiksa oleh Bepeka terdapat temuan, pemakaian barang negara yang menghasilkan uang sehingga para pengajar jadi ciut nyalinya untuk memproduksi lagi. Dan Edotel ditutup dari tamu luar, chatering tidak lagi menerima pesanan. Ini mematikan kreativitas sekolah dalam mengikuti perkembangan industri. Sementara dari Pemerintah selalu memotivasi agar SMK selalu produktif dan sesuai dengan pasar (SMK Pangkal Pinang).
5. Dinas Pendidikan kurang pengawasan pada mutu pembelajaran SMK khususnya laboratorium, sebagian besar laboratorium SMK yang dikunjungi dalam kondisi seadanya/tidak layak.
6. SMK yang belum lama berdiri sangat kekurangan guru yang berpengalaman praktek sesuai dengan bidang studinya.

7. Terdapat Perusahaan TV/Kalangan industri audio visual tidak mau mempekerjakan lulusan SMK.

Berdasarkan hasil temuan penelitian bahwa sebagian lulusan SMK yang telah bekerja di industri kurang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan sarana prasana yang ada di industri serta belum sesuai dengan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dudi, sehingga tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi di industri yang selaras dengan bidangnya, bahkan kurang tepat dalam mengoperasikan sarana dan prasarana sesuai keahlian yang dibutuhkan.

Alternatif pengendalian program kemitraan yang dapat dilakukan adalah dengan mempekerjakan peserta didik di perusahaan atau industri yang ada di sekitarnya. Sekolah harus mampu menyiapkan lulusan yang berdayaguna dan mampu bersaing, mengadakan praktik kerja industri sebagai tahap pembekalan peserta didik tentang dunia kerja yang sesungguhnya melalui cara:

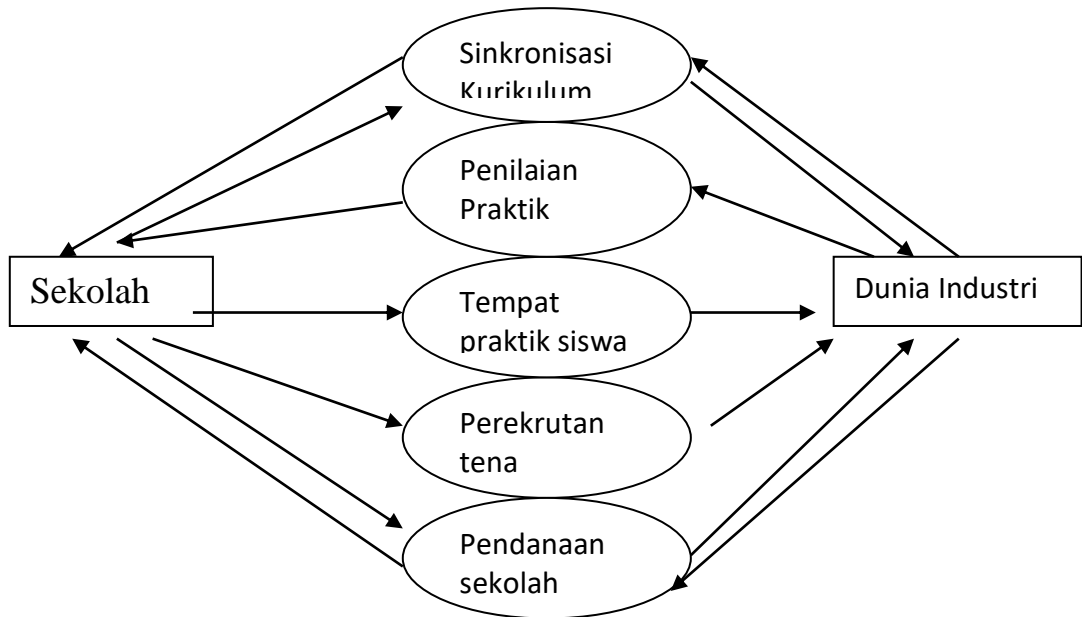
1. Program pelatihan yaitu membekali siswa peserta didik yang akan melaksanakan prakerin/pemagangan sebelum mereka magang di perusahaan nanti dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat membuat peserta didik tertib dan bernilai baik ketika memasuki dunia industri. Salah satunya melalui workshop/pelatihan secara internal di sekolah, melakukan kerjasama dengan komite, kerjasama dengan LPTK/ instansi lain yang relevan serta dunia industri.
2. Program pemagangan dilakukan selama 2 bulan untuk melaksanakan praktek kerja industri (prakerin). Melalui kerjasama tersebut diharapkan peserta didik berkesempatan belajar dan memperoleh pengalaman praktik kerja yang sesungguhnya.

5.6. Model yang Ditawarkan

Berdasarkan hasil temuan penelitian, ada beberapa aspek yang terkait dengan kegiatan-kegiatan antara sekolah dengan DUDI.

1. Sinkronisasi kurikulum, sekolah dengan pengguna harus saling bersinergi terutama dalam hal materi pembelajaran sehingga antara yang menyiapkan tenaga kerja (sekolah) terjalin kerjasama yang saling menguntungkan, saling memberi dan menerima
2. Prakerin atau magang, dunia usaha maupun dunia industri agar memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik maupun guru untuk praktik kerja atau magang agar pelaku pendidikan di sekolah bisa merasakan secara langsung pekerjaan di dunia industri sehingga guru dapat menyiapkan peserta didiknya agar mampu bersaing
3. Memiliki etos kerja untuk bersaing memasuki dunia kerja
4. Perekrutan tenaga kerja, sudah saatnya pengguna kerja merekrut tenaga kerja dari sumbernya (Sekolah) sehingga mengurangi terjadinya percaloan yang merugikan tenaga kerja
5. Pendanaan prakerin/perekrutan, sekolah perlu mengalokasikan dana untuk pemasaran tenaga kerja karena tugas sekolah kejuruan tidak cukup hanya sampai meluluskan peserta didiknya saja namun sampai dengan memasarkan tamatannya ataupun melakukan penelusuran tamatan (tracery sistem)
6. Model atau bentuk kemitraan antara dunia industri dengan sekolah kejuruan dalam menjalin kemitraan dapat dilihat dalam gambar;

Gambar Bentuk Kemitraan SMK dengan Dunia Usaha dan Industri



BAB VI

PEDOMAN PENINGKATAN KOMPETENSI SMK DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS DAN KAWASAN EKONOMI INDUSTRI

6.1. Pendahuluan

Dunia pendidikan memiliki peran sentral dalam perkembangan kemajuan negara Indonesia. Seiring dengan berbagai perkembangan jaman, dunia pendidikan di Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan dan kekurangan. Hal ini dapat diukur dari kurang atau rendahnya kompetensi lulusan berbagai keahlian di sekolah, terutama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan dunia kerja. Hasil penelitian yang kami lakukan, menunjukkan perkembangan dunia pendidikan selalu lebih lambat dari perkembangan dunia industri. Kondisi tersebut, dikhawatirkan lulusan SMK mengalami kesulitan dalam menyesuaikan dengan lapangan kerja dan industri.

Gambaran tentang kualitas lulusan pendidikan kejuruan merupakan suatu ukuran ganda, yaitu kualitas menurut ukuran sekolah (*in-school succes standarts*) dan kualitas menurut ukuran masyarakat (*out-of school succes standarts*). Kriteria pertama meliputi aspek keberhasilan peserta didik dalam memenuhi tuntutan kurikulum yang telah diorientasikan pada tuntutan dunia kerja. Sedangkan kriteria kedua meliputi keberhasilan peserta didik yang tertampilkan pada kemampuan untuk kerja sesuai dengan standart hasil belajar nasional ataupun internasional setelah mereka berada di lapangan kerja sebenarnya.

Upaya untuk mencapai kualitas pendidikan kejuruan yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industry (DUDI), perlu dibarengi dengan kurikulum yang rancang dan dikembangkan dengan prinsip kesesuaian dengan kebutuhan *stakeholders*. Kurikulum pendidikan kejuruan secara spesifik memiliki karakter yang mengarah pada pembentukan kecakapan peserta didik berkaitan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan tertentu. Kecakapan tersebut telah di akomodasi dalam kurikulum SMK yang meliputi kelompok mata pelajaran normatif, adaptif, dan produktif.

Sinergi antara dunia pendidikan dengan dunia industri serta *stakeholders* di masyarakat sangat dibutuhkan. Pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan di sekolah perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan harapan pendidikan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik dari sisi pengetahuan maupun penyelesaian masalah kontekstual yang dihadapi sehari-hari.

Selama ini pembelajaran belum bisa memenuhi semua tuntutan masyarakat, terutama bidang keterampilan hidup sesuai kondisi lokal hidup peserta didik. Materi pembelajaran seringkali tidak sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Konsekuensinya, setelah lulus sekolah peserta didik tidak bisa langsung menerapkan teori yang didapatkan dari sekolah.

Fenomena yang terjadi, antara dunia pendidikan dan perkembangan masyarakat tidak sesuai dan terjadi kesenjangan yang cukup signifikan. Kebutuhan masyarakat belum bisa diwujudkan sepenuhnya oleh lembaga pendidikan. Di antara indikator masalah ini adalah lulusan lembaga pendidikan belum siap pakai karena hanya menguasai teori, sementara miskin keterampilan. Dunia industri pun akhirnya meninggalkan sekolah karena tidak ada *linkage*. Selain itu juga disebabkan materi pembelajaran tidak sesuai potensi daerah di mana peserta didik bertempat tinggal. Materi pembelajaran dan konteks kehidupan peserta didik tidak padu, sehingga tidak terjadi transfer pembelajaran dalam kehidupan peserta didik. Mengacu pada indikasi tersebut, maka peluang kerja bagi lulusan SMK pada dasarnya belum begitu menggembirakan.

Sesuai dengan tujuan pendidikan SMK, yaitu membekali peserta didik dengan keterampilan tertentu untuk memasuki dunia kerja atau dunia usaha, maka pengembangan SMK harus selalu mengacu pada kebutuhan pasar kerja. Namun pengembangan SMK bukan sekedar pada memperbesar jumlah unit SMK dan jumlah siswa, tetapi bagaimana keberadaan SMK jika dikaitkan dengan potensi wilayah daerah. Sudah menjadi masalah klasik bagi dunia pendidikan SMK di Indonesia pada umumnya, bahwa *link and match* antara output pendidikan SMK

dengan DUDI sebagai pengguna output pendidikan SMK belum tercapai. Di antara kebutuhan tersebut, kebutuhan atau tuntutan dunia kerja/usaha/industri, dirasakan amat mendesak, maka prioritas *link and match* diberikan pada pemenuhan kebutuhan dunia kerja. Salah satu masalahnya terletak pada kualitas lulusan SMK yang belum selesai dengan standart kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri.

6.2. Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan

6.2.1. Muatan Kurikulum Mengandung Unsur Moral dalam Teori dan Praktek

Lulusan SMK dituntut tidak hanya memiliki *hard skill*, tetapi juga *soft skill*. *Hard skill* dapat dibentuk pada diri siswa melalui masing-masing bidang keahlian sesuai dengan jurusan yang diambilnya di SMK. Sementara *soft skill* merupakan keterampilan kepribadian yang terbentuk karena penanaman nilai-nilai kebajikan, moral atau dalam bahasa agama disebut dengan akhlak. Dalam bahasa kebijakan di era Pemerintah Jokowi sering disebutnya juga dengan “Pendidikan Karakter”, yang telah diwacanakan sebagai solusi untuk membentuk kepribadian yang baik pada diri siswa.

Tujuan pendidikan karakter selaras dengan tujuan pendidikan nasional seperti tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, yang menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Sementara isi Pendidikan Karakter adalah nilai dan keterampilan yang diberikan oleh pendidik dalam rangka membentuk karakter peserta didik. Isi Pendidikan Karakter berupa nilai-nilai yang perlu disampaikan oleh pendidik untuk membentuk karakter siswa adalah:

1. Tata tertib siswa di sekolah,
2. Tata tertib siswa di kelas,
3. Nilai-nilai kesopanan,
4. Nilai-nilai kebangsaan,
5. Nilai-nilai kejujuran,
6. Nilai-nilai kesabaran,
7. Nilai-nilai kemandirian.

Penguasaan *soft skill* sangat penting dalam perkembangan usia siswa. *Soft skill* lah yang akan membimbing lebih jauh karakter siswa ketika yang bersangkutan sudah masuk ke dalam DUDI. Ketika seseorang sudah memasuki dunia kerja, menguasai *hard skill* cenderung statis, terkecuali akan beradaptasi dengan kemunculan inovasi-inovasi baru terkait dengan perkembangan yang terkait dengan *hard skill*. Namun terkait dengan *soft skill* akan bersentuhan dan bersinggungan langsung dalam kehidupan sehari-hari di DUDI. Siswa akan bersentuhan dengan beragam manusia dengan segala tabiatnya, baik yang buruk, baik, maupun yang pertengahan (*muqtashid*), yang jujur maupun tidak jujur, yang sopan maupun tidak sopan, yang berintegritas maupun yang tanpa integritas. Menghadapi realitas ini, maka menjadi penting melakukan penguatan *soft skill* atau pendidikan karakter.

Materi pendidikan karakter mencakup pengertian, langkah-langkah, dan manfaat pendidikan karakter. Sebagai contoh untuk nilai-nilai kesopanan, maka cakupan materinya adalah pengertian kesopanan, langkah-langkah menjadi sopan, dan manfaat kesopanan.

Dalam rangka pembentukan karakter siswa yang tidak hanya memiliki *hard skill*, tapi juga *soft skill*, perlu adanya pengembangan metode pembelajaran yang mampu:

1. Memberikan teladan untuk memberikan kesan keyakinan peserta didik.
2. Mengklarifikasi nilai karakter/kepribadian yang harus dimiliki kepada peserta didik.
3. Mengidentifikasi dan membangun minat serta pengalaman peserta didik.
4. Memberikan peserta didik untuk belajar kelompok bersama, diskusi, bermain peran, atau yang lainnya.
5. Bercerita, bernyanyi, atau bermain bersama murid dalam rangka penanaman nilai.

Selain itu perlu juga merekonstruksi kurikulum yang mampu melahirkan lulusan SMK yang bukan saja menguasai *hard skill*, tapi juga *soft skill*. Caranya bukan dengan mendikotomi secara ekstrim kurikulum yang terkait dengan *hard skill* dan *soft skill*, tapi kurikulum yang mampu mengintegrasikan *hard skill* dan *soft skill* secara bersamaan. Dalam kurikulum ini penting menuangkan hal yang bersikap *soft skill* ke dalam hal yang berkenaan dengan *hard skill*.

Kurikulum yang mampu mengintegrasikan *hard skill* dan *soft skill* juga harus tergambar secara tegas dalam setiap mata pelajaran. Mata pelajaran setidaknya harus menyangkut mata pelajaran *soft skill* yang bersifat normatif, menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai secara konstruktif. Adapun pengembangan metode pembelajaran yang dapat dilakukan oleh pendidik adalah:

1. Memberikan keteladanan kepada siswa dengan pribadi yang baik,
2. Mengingatkan peserta agar selalu ingat bahwa mereka adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dilakukan untuk membangun pengertian yang mendalam bahwa manusia hidup di dunia ini dengan aturan Tuhan dan tidak boleh hidup dengan seenaknya,
3. Memusatkan kebutuhan peserta didik akan nilai-nilai kehidupan dan apa-apa yang dibutuhkan sebagai lulusan SMK, dan

4. Membangun motivasi yang kuat pada diri siswa.

Selain itu, tentu saja dibutuhkan mata pelajaran produktif, yang terdiri dari mata pelajaran teori dan praktik. Oleh karena itu, pendidik harus dapat memilah dalam memberikan metode penyampaian kepribadian pada siswa. Adapun metode yang dapat dilakukan oleh guru adalah:

1. Memberikan teladan yang baik pada peserta didik,
2. Mengklarifikasi karakter/kepribadian apa sajakah yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah memiliki keahlian dalam mata pelajaran produktif,
3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memecahkan masalah yang diberikan,
4. Memberikan kepada para siswa untuk berlatih dan kerja tim selama melaksanakan praktik,
5. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menarik kesimpulan atas pelajaran yang telah diberikan,
6. Menasihati siswa agar bekerja sesuai dengan prosedur yang ada, dan
7. Menasihati siswa untuk mengunpulkan tugas tepat pada waktunya.

Sementara yang semestinya dilakukan oleh siswa adalah:

1. Mentaati peraturan yang ada. Peraturan tersebut adalah peraturan tata tertib siswa di sekolah, tata tertib siswa di kelas, tata tertib siswa di luar sekolah, serta tata tertib lain yang dibuat oleh sekolah.
2. Mendengarkan dan mengamalkan pesan moral yang disampaikan oleh guru.
3. Berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang baik.
4. Membawa buku saku siswa setiap hari.

Sementara yang seharusnya dilakukan oleh pihak sekolah adalah:

1. Memberlakukan norma-norma di sekolah.
2. Memberikan kearifan-kearifan local kepada siswa lewat kegiatan intra dan ekstrakurikuler.
3. Mengadakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan karakter siswa secara berkala, seperti:
 - a. Kegiatan keagamaan untuk meningkatkan akhlak yang mulia;
 - b. kegiatan out bond untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kerja tim;
 - c. kegiatan latihan kepemimpinan untuk meningkatkan rasa kedisiplinan, kepemimpinan, serta jiwa mandiri.
4. Mengadakan pelatihan terhadap guru-guru dalam pelaksanaan pendidikan karakter. Pelatihan tersebut berisi tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan karakter;
5. Melakukan pengontrolan terhadap perkembangan pemberian nilai-nilai karakter/kepribadian.
6. mewajibkan penggunaan baju batik pada salah satu hari untuk guru dan siswa.
7. mewajibkan siswa untuk menyanyikan lagu kebangsaan pada jam pertama pelajaran akan dimulai.
8. membuat buku saku siswa yang berisi norma-norma dan kearifan lokal, serta lembar point hukuman terhadap pelanggaran dan point hadiah untuk tindak kebaikan.

Untuk membentuk karakter siswa yang bukan hanya mumpuni dalam hard skill dan soft skill, perlu juga mendapat penopang dari pihak sekolah. Beberapa hal yang penting untuk dilakukan oleh pihak sekolah:

1. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga luar sekolah dalam upaya peningkatan karakter siswa, seperti:
 - a. Lembaga kepolisian atau militer untuk membina kedisiplinan siswa dan pemahaman bela Negara;
 - b. Organisasi kemasyarakatan yang bersifat agamis untuk pembinaan akhlak mulia; dan
 - c. Lembaga Trainer/Motivator untuk membina rasa semangat dan percaya diri.
2. Melakukan supervisi terhadap guru terkait dengan hasil dari pelaksanaan pendidikan karakter secara terus-menerus dan berkesinambungan.
3. Melakukan pengontrolan terhadap buku saku siswa.
4. Menjalin hubungan yang baik dengan orang tua siswa

6.2.2. Kesesuaian Kurikulum dengan Regulasi dan Kebutuhan DUDI

Substansi dari pendidikan kejuruan harus menampilkan karakteristik pendidikan kejuruan yang tercermin dalam aspek-aspek yang erat dengan perencanaan kurikulum, yaitu :

1. Orientasi (*Orientation*)

Kurikulum pendidikan kejuruan telah berorientasi pada proses dan hasil atau lulusan. Keberhasilan utama kurikulum pendidikan kejuruan tidak hanya diukur dengan keberhasilan pendidikan peserta didik di sekolah saja, tetapi juga dengan hasil prestasi kerja dalam dunia kerja. Finch dan Crunkilton (1984 : 12) mengemukakan bahwa: Kurikulum pendidikan kejuruan berorientasi terhadap proses (pengalaman dan aktivitas dalam lingkungan sekolah) dan hasil (pengaruh pengalaman dan aktivitas tersebut pada peserta didik).

2. Dasar kebenaran/Justifikasi (*Justification*)

Pengembangan program pendidikan kejuruan perlu adanya alasan atau justifikasi yang jelas. Justifikasi untuk program pendidikan kejuruan adalah adanya kebutuhan nyata tenaga kerja di lapangan kerja atau di dunia usaha dan industri. Dasar kebenaran/justifikasi pendidikan kejuruan menurut Finch dan Crunkilton (1984: 12), meluas hingga lingkungan sekolah dan masyarakat. Ketika kurikulum berorientasi pada peserta didik, maka dukungan bagi kurikulum tersebut berasal dari peluang kerja yang tersedia bagi para lulusan.

3. Fokus

Fokus kurikulum dalam pendidikan kejuruan tidak terlepas pada pengembangan pengetahuan mengenai suatu bidang tertentu, tetapi harus secara simultan mempersiapkan peserta didik yang produktif. Finch dan Crunkilton (1984: 13) mengemukakan bahwa: Kurikulum pendidikan kejuruan berhubungan langsung dengan membantu siswa untuk mengembangkan suatu tingkat pengetahuan, keahlian, sikap dan nilai yang luas. Setiap aspek tersebut akhirnya bertambah dalam beberapa kemampuan kerja lulusan. Lingkungan belajar pendidikan kejuruan mengupayakan di dalam mengembangkan pengetahuan peserta didik, keahlian meniru, sikap dan nilai serta penggabungan aspek-aspek tersebut dan aplikasinya bagi lingkungan kerja yang sebenarnya.

Seluruh kemampuan tersebut di atas, dapat dikuasai oleh peserta didik melalui pengalaman belajar yang diberikan, yaitu berupa rangsangan yang diaplikasikan baik pada situasi kerja yang tersimulasi lewat proses belajar mengajar di sekolah maupun situasi kerja yang sebenarnya pada dunia usaha atau industri (pembelajaran di dunia kerja). Dari hasil belajar atau kemampuan yang telah dikuasai diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan diri peserta didik, sehingga mereka mampu bekerja sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan industri.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dirancang untuk menyiapkan peserta didik atau lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan mampu mengembangkan sikap profesional di bidang kejuruan. Lulusan pendidikan kejuruan, diharapkan menjadi

individu yang produktif yang mampu bekerja menjadi tenaga kerja menengah dan memiliki kesiapan untuk menghadapi persaingan kerja. Kehadiran SMK ini didambakan masyarakat khususnya masyarakat yang berkecimpung langsung dalam dunia kerja. Dengan catatan, bahwa lulusan pendidikan kejuruan memang mempunyai kualifikasi sebagai (calon) tenaga kerja yang memiliki keterampilan vokasional tertentu sesuai dengan bidang keahliannya.

Gambaran tentang kualitas lulusan pendidikan kejuruan yang disarikan dari Finch dan Crunkilton (1979), bahwa : “Kualitas pendidikan kejuruan menerapkan ukuran ganda, yaitu kualitas menurut ukuran sekolah atau in-school success standards dan kualitas menurut ukuran masyarakat atau out-of school success standards”. Kriteria pertama meliputi aspek keberhasilan peserta didik dalam memenuhi tuntutan kurikuler yang telah diorientasikan pada tuntutan dunia kerja, sedangkan kriteria kedua, meliputi keberhasilan peserta didik yang tertampilkan pada kemampuan unjuk kerja sesuai dengan standar kompetensi nasional ataupun internasional setelah mereka berada di lapangan kerja yang sebenarnya.

Upaya untuk mencapai kualitas lulusan pendidikan kejuruan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja tersebut, perlu didasari dengan kurikulum yang dirancang dan dikembangkan dengan prinsip kesesuaian dengan kebutuhan stakeholders. Kurikulum pendidikan kejuruan secara spesifik memiliki karakter yang mengarah kepada pembentukan kecakapan lulusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan tertentu. Kecakapan tersebut telah diakomodasi dalam kurikulum SMK yang meliputi kelompok Normatif, Adaptif dan kelompok Produktif.

Kurikulum yang diimplementasikan di SMK saat ini, khusus untuk kelompok produktif masih menggunakan kurikulum tahun 2004, sedangkan untuk kelompok normatif dan adaptif sudah menggunakan model pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 2006. Pada tataran implementasi kurikulum ini menuntut kreativitas guru di dalam memberikan pengalaman belajar yang dapat meningkatkan kompetensi peserta didik, karena betapapun baiknya kurikulum yang telah direncanakan pada akhirnya berhasil atau tidaknya sangat tergantung

pada sentuhan aktivitas dan kreativitas guru sebagai ujung tombak implementasi suatu kurikulum.

Pendidikan dan pelatihan di SMK; khususnya pada program produktif yang sesuai dengan bidang keahlian, secara ideal dituntut untuk menerapkan pendekatan pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik di dalam penguasaan kompetensi atau kemampuan kerja sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan industri. Pendekatan pembelajaran tersebut terdiri dari: Pelatihan Berbasis Kompetensi (*Competency Based Training*), Pelatihan Berbasis Produksi (*Production Based Training*) dan Pelatihan Berbasis Industri. Dengan menerapkan pendekatan pembelajaran ini diharapkan mampu memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik di dalam penguasaan seluruh kompetensi yang harus dikuasai sesuai Standar Kompetensi Nasional, sehingga mereka mampu mengikuti uji level pada setiap akhir semester untuk Kelas X dan XI serta uji kompetensi untuk kelas XII yang dilaksanakan oleh pihak industri sebagai inatitusi pasangan.

4. Sertifikasi profesi.

Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas capaian kompetensi pada kualifikasi tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi yang berwenang. Siswa lulusan SMK bisa memiliki lebih dari satu sertifikat kompetensi, tergantung pada program keahlian yang diambilnya di SMK. Misalnya lulusan SMK dengan program keahlian Teknik Mesin, bisa memiliki enam sertifikat untuk kompetensi Teknik Pengelasan, Teknik Fabrikasi Logam, Teknik Pengecoran Logam, Teknik Pemesinan, Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri, dan Teknik Gambar Mesin.

Sertifikat kompetensi untuk siswa SMK diberikan setelah siswa dinyatakan lulus dalam ujian kompetensi keahlian (UKK). UKK adalah bagian dari ujian nasional (UN) untuk peserta didik SMK, yang terdiri atas ujian teori kejuruan dan ujian praktik kejuruan. Setelah siswa lulus UKK, sertifikat kompetensi diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). SMK yang telah dinyatakan sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi

Pihak Pertama (LSP-P1) oleh BNSP juga bisa menyelenggarakan ujian kompetensi keahlian secara mandiri dan menjadi tempat ujian kompetensi bagi SMK lain di sekitarnya.

Salah satu tujuan UKK adalah memfasilitasi kerja sama SMK dengan DUDI untuk melaksanakan ujian kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan DUDI. Dalam pelaksanaan UKK, SMK melibatkan DUDI atau institusi berskala internasional, nasional atau lokal, yang memiliki pekerjaan utama yang relevan dengan kompetensi keahlian siswa yang diujikan. Diharapkan, DUDI tersebut bisa melihat secara langsung dan mengakui kompetensi para siswa SMK sehingga bisa langsung diserap sebagai tenaga kerja oleh DUDI.

6.3. Link and Match Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

6.3.1. Adaptasi Konsep Pembelajaran SMK dengan DUDI

1. Kesesuaian Kurikulum dengan DUDI

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 terkait revitalisasi SMK menyebutkan empat poin yang menjadi fokus melingkupi revitalisasi kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, kerja sama, dan lulusan. Kurikulum untuk jenjang SMK sering dianggap kaku oleh berbagai kalangan yang berdampak sulit untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang siap dipakai oleh dunia usaha dan industri. Dengan revitalisasi ini, dari tiga kurikulum di SMK ada satu kurikulum yang dirancang lebih fleksibel. Artinya, kurikulum ini menyesuaikan dengan kebutuhan industry.

Sebetulnya konsep *link and match* sempat diluncurkan Mendiknas Prof. Wardiman Djojonegoro dalam rangka menjawab kebutuhan dunia Usaha dan Industri baik dalam maupun luar negeri, khususnya dalam negeri. Disamping kurikulum, revitalisasi juga dilakukan dari sisi pendidik dan tenaga kependidikan, terutama guru. Selain ketersediaan, revitalisasi juga menasar pada perbaikan kompetensi guru. Sebagai solusi jangka pendek, pemenuhan kebutuhan guru produktif dilakukan melalui program keahlian ganda.

Revitalisasi yang juga tidak kalah penting adalah berkaitan kerja sama antara SMK dengan DUDI, juga perlu perbaikan kerja sama dengan perguruan tinggi maupun antar-kementerian. Dan yang terakhir adalah revitalisasi kualitas lulusan SMK yang harus melalui uji kompetensi dan sertifikasi yang diakui DUDI. Karena kualitas lulusan SMK akan menentukan apakah SMK bisa merespons kebutuhan DUDI atau tidak.

Salah satu tolok ukur yang dapat digunakan untuk merespons masalah kualitas lulusan SMK adalah melalui Lomba Kreativitas Siswa (LKS). Hal tersebut terlihat lewat fakta bahwa sekolah yang berhasil mengirimkan peserta didiknya ke ajang ini merupakan SMK yang memiliki siswa siswa kreatif dan terbaik di daerahnya. Oleh karena itu, dengan LKS ini diharapkan semakin banyak baik para siswa maupun SMK yang terpacu untuk berkompetisi dan menghasilkan lulusan-lulusan terbaik pula.

2. Konsep Pembelajaran Diasumsikan dengan Kondisi Praktis DUDI

Nampaknya konsep Pembelajaran Teaching Factory ini secara teoritis sudah bisa ikut menjawab kebutuhan DUDI, namun implementasi konsep ini membutuhkan daya dukung yang kuat dan serius, baik dari aspek pengalaman empirik SDM/Guru, kesiapan mental siswa, bahan baku, dan infra struktur/ peralatan pendukung. Beberapa hal yang harus dipahami dalam konsep pembelajaran Teaching Factory ini (TEFA) di antaranya sbb:

a. Orientasi Sistem Pembelajaran Teaching Factory

Pembelajaran yang berorientasi produksi dan bisnis adalah proses penguasaan keahlian atau keterampilan yang dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk atau jasa yang dipesan oleh konsumen. Dalam dunia broadcast televisi diperlukan keahlian yang focus dan spesifik. Artinya siswa dituntut untuk lebih menekuni salah keahlian tertentu disamping keahlian lainnya. misalnya kamera, audio, pencahayaan, penyuntingan/ editing dsb. Keahlian tersebut masing masing memiliki spesifikasi yang berbeda dan khusus, sehingga harus ditekuni secara serius. Selain itu pula memang dalam

dunia broadcast TV fungsi dan jabatan tersebut memiliki posisi dan porsi skill/keahlian yang berbeda, seperti cameraman, lightingman, audioman, editor dsb. Sementara konsep pembelajaram yang sedang berlangsung bisa dikatakan abu abu, sehingga ketika siswa lulus SMK , mereka belum memiliki keahlian atau keterampilan secara khusus sesuai kebutuhan pasar.

b. Penerapan Konsep *Teaching Factory* di SMK/Broadcast

Prinsip dasar teaching factory (TIFA) adalah pengintegrasian pengalaman dunia kerja ke dalam kurikulum sekolah. Semua peralatan dan bahan serta pelaku pendidikan disusun dan dirancang untuk melakukan proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan produk (barang dalam ataupun jasa). TIFA merupakan perpaduan dari pembelajaran berbasis produksi dan pembelajaran kompetensi. Dalam pembelajaran berbasis produksi, siswa terlibat langsung proses produksi, sehingga kompetensinya dibangun berdasar kebutuhan produksi. Dalam teaching factory, sekolah melaksanakan kegiatan produksi atau layanan jasa yang merupakan bagian dari PBM. Dengan demikian sekolah diharuskan memiliki sebuah pabrik, workshop/studio mini atau unit usaha lain untuk kegiatan pembelajaran.

c. Melalui Realisasi Praktek Produksi Program/konten dalam Pembelajaran

- 1) mempersiapkan individu menjadi pekerja;
- 2) mempersiapkan individu untuk terus belajar ke level yang lebih tinggi;
- 3) membantu siswa memilih bidang kerja yang sesuai kemampuannya;
- 4) menunjukkan bahwa 'learning by doing' sangat penting bagi efektivitas pendidikan dan menumbuhkan kreatifitas;
- 5) mendefinisikan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja;
- 6) memperluas cakupan kesempatan rekrutmen bagi siswa;

- 7) memberi kesempatan kepada guru memperluas wawasan instruksional;
- 8) membantu siswa dalam mempersiapkan diri menjadi tenaga kerja, bagaimana menjalin kerjasama dalam dunia kerja yang aktual, dll;
- 9) memberi kesempatan kepada siswa untuk melatih keterampilannya sehingga dapat membuat keputusan tentang karir yang akan dipilihnya;
- 10) memberi kesempatan kepada guru untuk membangun 'jembatan instruksional' antara kelas dengan dunia kerja;
- 11) membuat pembelajaran lebih menarik dan memotivasi siswa belajar.

d. Hal yang diharapkan dalam konsep *Teaching Factory*

- 1) Menyadarkan siswa bahwa dalam penguasaan keterampilan siswa tidak hanya mempraktikkan soft skill dalam pembelajaran, (bekerja dalam tim, melatih kemampuan komunikasi interpersonal dari buku), tetapi juga merealisasikan pengetahuan secara langsung dan latihan bekerja untuk memasuki dunia kerja secara nyata. (Hadlock, Wells, Hall, Clifford, Winowich, dan Burns 2008: 14).
- 2) Sarana pelatihan dan praktik berbasis produksi secara langsung bagi siswa yang berorientasi pada pasar;
- 3) Mengembangkan sikap mandiri dan percaya diri siswa melalui kegiatan produksi;
- 4) Menjalinkan hubungan yang lebih baik dengan dunia usaha dan industri serta masyarakat lain atas terbukanya fasilitas untuk umum dan hasil-hasil

e. Konsep *Teaching Factory* menemukan adanya beberapa faktor yaitu:

- 1) pembelajaran keterampilan murni yang biasa saja tidak cukup;

- 2) Siswa dan Guru melalui pembelajaran yang berbasis produksi, mendapat pengalaman langsung menggandengkan berbagai komponen kompetensi dalam satu ikatan;

6.3.2. Konsep Teaching Factory (TEFA) Memberikan Ruang dan Peluang Bagi Siswa Untuk Lebih Berkreasi

Melalui pembelajaran berbasis team yang melibatkan siswa, guru, para praktisi dan partisipasi industry televisi/media memperkaya proses pendidikan dan memberikan manfaat yang nyata bagi semua pihak termasuk lembaga lembaga penyiaran, khususnya stasiun TV lokal yang menjadi mitra SMK. Kreatifitas dan potensi siswa akan muncul dengan diberikannya kesempatan terjun ke dunia Industri, sehingga akan semakin memahami kebutuhan realistis terhadap dunia industry/usaha. Lembaga pendidikan/SMK termasuk para guru dapat mempertimbangkan persentase dan metode pembelajaran sesuai kebutuhan pasar secara proporsional.

Sangat disadari untuk dapat menopang SMK Jurusan Broadcast/Penyiaran TV membutuhkan fasilitas dan infrastruktur dengan biaya relative cukup mahal dan fasilitas yang digunakan harus adaptable dengan perkembangan teknologi saat ini. Maka agar perkembangan teknologi tetap dapat diikuti para siswa, sekolah SMK melalui Direktorat PSMK harus dapat bersinergi dengan lembaga lembaga penyiaran/stasiun TV lokal/TV nasional setempat agar para siswa dapat melakukan magang tanpa ada kendala. Melalui magang tersebut para siswa disamping dapat memahami dunia kerja sebenarnya, juga mengetahui perkembangan teknologi terbaru melalui station TV tersebut.

6.4. Metode Pembelajaran

Prosser dan Quigley dalam Surya Dharma (2013) menyatakan bahwa esensi dari pendidikan kejuruan adalah mengajarkan kebiasaan berfikir dan bekerja melalui pelatihan yang berulang-ulang. Terdapat tiga kebiasaan yang harus diajarkan yaitu :

1. Kebiasaan beradaptasi dengan lingkungan kerja,
2. Kebiasaan dalam proses pelaksanaan kerja, dan
3. Kebiasaan berfikir (dalam pekerjaan).

Wenrich dan Galloway (1988) mengemukakan bahwa pendidikan kejuruan dapat diartikan sebagai pendidikan yang spesial yang berfungsi menyiapkan peserta didik untuk memasuki pekerjaan tertentu atau pekerjaan keluarga, atau untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Calhoun (1982) menyatakan bahwa pendidikan kejuruan adalah suatu program pendidikan yang menyiapkan individu peserta didik menjadi tenaga kerja profesional, dan juga siap untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Clarke dan Winch (2007) mendefinisikan pendidikan kejuruan sebagai pendidikan yang menyiapkan anak-anak muda dan orang dewasa untuk memasuki lapangan kerja, dimana proses pembelajarannya berkaitan dengan masalah dan praktik. Henry dan Thomson dalam Berg (2002) mendeskripsikan pendidikan kejuruan sebagai berikut, pendidikan kejuruan itu identik dengan belajar “bagaimana untuk bekerja”, pendidikan kejuruan berupaya bagaimana untuk meningkatkan kompetensi teknik dan posisi seseorang di lingkungan melalui penguasaan teknologi dan pendidikan kejuruan berkaitan erat dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu sering dipandang sebagai sesuatu yang memberikan kontribusi yang kuat terhadap ekonomi nasional.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil, siap kerja dan produktif pada bidang tertentu. Pendidikan

kejuruan diselenggarakan dengan membawa “suasana kerja ke bangku sekolah”, sehingga didalam prosesnya peserta didik akan belajar “bagaimana cara bekerja”. Pendidikan kejuruan membekali peserta didik pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman bekerja secara efektif dan efisien, serta kemampuan untuk selalu beradaptasi dan mengantisipasi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi.

Menurut Trilling and Fadel (2011:91) pendidikan kejuruan adalah pemecahan problem, sehingga pertanyaan yang muncul bertujuan untuk menemukan solusi: bagaimana membuat pesawat terbang yang lebih aman? Bagaimana membuat kursi yang lebih ergonomis? Bagaimana menggunakan energi matahari untuk memanaskan air dan menghidupkan listrik? Berbeda dengan pendekatan seorang saintis dimulai dengan pertanyaan: mengapa langit itu biru? Mengapa air bisa mengalir ke atas pucuk pohon? Berdasarkan dua pendekatan tersebut, pendidikan menengah kejuruan bertujuan menemukan berbagai solusi untuk mencapai tujuan kehidupan yang lebih baik.

Pembelajaran dengan replikasi seperti konsep di atas sebenarnya mirip dengan *Teaching Factory* atau *Production Based Training/ Production Based Education and Training/Design Based Training* yang merupakan pembelajaran bentuk rekayasa dan teknologi sebagai strategi perancangan dan penemuan solusi atas problematika kehidupan. Adapun pada konsep sains lebih menekankan metoda penyelidikan dan penemuan untuk menjelaskan gejala-gejala alam. Pekerjaan di abad ke-21 membutuhkan keterampilan dengan kombinasi baru yaitu pemikiran tingkat tinggi dan komunikasi yang kompleks (Trilling dan Fadel, 2009). Pekerjaan dalam abad ke-21 bertumpu pada kemampuan kreativitas.

Dengan definisi tersebut, sangat tidak mungkin apabila pendidikan kejuruan tidak dibekali dengan beban prakteknya yang memadai untuk membekali peserta didik siap kerja. Sistem pendidikan yang sedang berjalan sekarang proporsi untuk teori 40%, sedangkan praktek 60% dirasa masih kurang proporsinya. Apalagi ditambah dengan beban banyaknya jumlah mata pelajaran yang dibebankan kepada peserta didik.

Terkait dengan mempersiapkan peserta didik untuk mampu bekerja pada bidang tertentu maka kurikulum SMK wajib memuat (UU Menurut UU No 20 Tahun 2003) :

1. Pendidikan Agama;
2. Pendidikan kewarganegaraan;
3. Bahasa;
4. Matematika;
5. Ilmu Pengetahuan Alam;
6. Ilmu Pengetahuan Sosial;
7. Seni dan budaya;
8. Pendidikan jasmani dan olah raga;
9. Keterampilan/kejuruan, dan
10. Muatan lokal.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang dimaksud produktif adalah mata pelajaran yang membekali peserta didik dengan kemampuan untuk bekerja yang sesuai dengan tuntutan perkembangan yang terjadi di dunia kerja. Muatan Produktif merupakan muatan pokok/inti yang ada di SMK, karena sangat berperan untuk mendukung kemampuan peserta didik memasuki dunia kerja. Dengan demikian peserta didik banyak memperoleh beban belajar, sementara disisi lain dituntut juga untuk mempunyai kompetensi profesional yang mumpuni sesuai kebutuhan duni usaha/dunia industri. SKKNI juga diharapkan digunakan oleh dunia usaha/dunia industri sebagai acuan untuk rekrutmen dan seleksi, penempatan, penilaian kompetensi dan pengembangan karir lulusan SMK, baik di jalur struktural maupun fungsional. Digunakan untuk merumuskan pola pembagian kerja dan tata hubungan kerja antar posisi atau jabatan, terutama

dengan mempertimbangkan hasil analisis hierarki dan keterkaitan fungsi-fungsi produktif.

Dengan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perlu adanya perubahan proporsi dalam pendidikan kejuruan agar peserta didik memperoleh bekal kompetensi yang cukup untuk terjun ke dunia kerja yang sebenarnya. Pengertian kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kecakapan, mengetahui, berwenang, dan berkuasa memutuskan atau menentukan atas sesuatu. Definisi kompetensi menurut Depdikbud (1994) adalah karakteristik yang dimiliki oleh individu dan digunakan secara tepat dengan cara yang konsisten untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Wardiman Djojonegoro (1996:11) memberikan arti kompetensi sebagai karakteristik dasar yang dimiliki oleh seorang individu yang berhubungan secara kausal dengan standar penilaian yang tereferensi pada performansi yang superior atau pada sebuah pekerjaan.

Menjadi kajian dan perhatian serius bagi semua pihak untuk bisa memperbaiki sistem pendidikan kejuruan performanya menjadi lebih sempurna untuk diadopsi oleh industri. Sehingga tujuan awal dari pendidikan kejuruan agar dapat mencetak tenaga kerja tingkat menengah yang handal dan siap pakai dapat terealisasi. Dari hasil uraian ini ada beberapa yang menjadi pertimbangan dan masukan bagi pendidikan kejuruan, salah satunya merubah prosentasi bobot pembelajaran antara teori dan praktek dari yang awalnya 40% teori dan 60% praktek, perlu ditingkatkan dalam aspek pembelajaran praktek yaitu menjadi 30% dalam bentuk teori dan 70% dalam bentuk proaktek. Pertimbangan ini didasarkan pada betapa besarnya tuntutan pangsa pasar terhadap kebutuhan tenaga kerja siap pakai. Pendidikan kejuruan menjadi omong kosong belaka tatkala bobot praktek yang seharusnya dialami oleh peserta didik tidak terlaksana sesuai dengan porsinya.

6.4.1. Pemahaman TIK Pembelajaran terdiri dari proses belajar mengajar

Teknologi selalu berjalan beriringan dengan kemajuan sebuah peradaban. Teknologi yang di hari kemarin dianggap modern (*sunrise technology*) bukan

tidak mungkin hari ini sudah mulai *obsolete* atau basi (*sunset technology*). Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi parameter kemajuan pendidikan suatu negeri. Pendidikan memberikan kontribusi besar dalam perubahan peradaban suatu bangsa. Bangsa yang besar dan maju akan tampak dari seberapa besar pertumbuhan generasi yang menempuh jenjang pendidikan yang layak. Hal tersebut juga otomatis akan tampak dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan industrinya. Sistem pendidikan yang berjenjang telah berjalan dinamis selama ini mencetuskan sebuah ide dan harapan baru akan adanya perubahan sistem di dunia pendidikan. Sebagai sebuah bangsa, Indonesia pun mengikuti pergerakan dinamis dunia pendidikan guna menjawab tantangan jaman. Oleh karena itu pendidikan kejuruan menjadi sebuah tawaran yang menjanjikan di era pesatnya perkembangan teknologi.

Perkembangan pada dunia kerja ini harus diikuti oleh lembaga pendidikan yang menyiapkan tenaga kerja seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasyah Aliyah Kejuruan (MAK). Pendekatan pengembangan sekolah kejuruan sudah harus mengacu pada *market driven*. Penggunaan pendekatan tersebut memungkinkan terjadinya kesesuaian antara proses pembelajaran di sekolah dengan proses yang terjadi di dunia kerja atau dunia usaha. Sehingga terjadi keselarasan antara penguasaan kompetensi dari lulusan SMK/MAK dengan kebutuhan tenaga kerja. SMK/MAK memiliki tujuan menyiapkan lulusannya untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Ini menunjukkan bahwa SMK/MAK sebagai institusi harus menyiapkan lulusannya secara komprehensif dan inklusif, membantu peserta didik menumbuh-kembangkan capaian hasil pendidikan secara bermakna berdasarkan potensi yang dimilikinya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat dimana mereka hidup kelak setelah menyelesaikan pendidikan.

Tugas SMK/MAK di atas, sesuai dengan tuntutan keterampilan kerja abad 21, yakni keterampilan berfikir tingkat tinggi yang meliputi berfikir kreatif, berfikir kritis dan memecahkan masalah. Adapun untuk membangun kemampuan yang

lainnya yakni keterampilan literasi dan informasi teknologi, keterampilan untuk hidup mandiri sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajarinya, serta kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan organisasi kerja (antara lain komunikasi dan kolaborasi), diperlukan pengalaman belajar kontekstual dalam berbagai bentuk model pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar dari mata pelajaran yang dipelajarinya. Atas dasar itulah pada uraian berikut, selanjutnya akan dibahas tentang model-model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan tujuan dan karakteristik pembelajaran pada pendidikan SMK/MAK.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif-mandiri mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Atas dasar itu maka dikembangkan Standar Proses Pembelajaran di SMK/MAK mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi; merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan pengawasan pembelajaran pada satuan pendidikan SMK/MAK untuk mencapai kompetensi lulusan.

Proses pembelajaran diselenggarakan berbasis aktivitas secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik. Selain itu proses pembelajaran juga harus memberikan ruang untuk berkembangnya keterampilan abad XXI yaitu kreatif, inovatif, berfikir kritis, pemecahan masalah, kolaboratif, dan komunikatif untuk menyongsong era revolusi industri 4.0 dan yang akan datang. Era ini dikenal juga dengan fenomena *disruptive innovation* yang menekankan pada pola ekonomi digital, kecerdasan buatan, *big data*, dan robotik.

6.4.2. Pendidikan kejuruan

Perubahan teknologi tersebut berimplikasi pada penyesuaian penyelenggaraan pembekalan keterampilan vokasional kepada peserta didik dibidang kejuruan, oleh karena itu perlu diperhatikan beberapa prinsip pendidikan kejuruan, antara lain:

1. Pendidikan kejuruan yang prospektif dan berorientasi pada kemajuan masa depan harus dapat dilaksanakan secepat mungkin (*education in short*)
2. Pendidikan kejuruan dalam pengembangannya harus berorientasi kepada jenis-jenis pekerjaan yang langsung dibutuhkan di lapangan kerja
3. Pendidikan kejuruan diatur sedemikian rupa supaya peserta didik dapat keluar masuk lembaga pendidikan secara mudah (*entry exit system*)
4. Pendidikan kejuruan harus disesuaikan dengan permintaan pasar (*demand driven*), bukan pasar yang menyesuaikan dengan pendidikan kejuruan.
5. Pengembangan pendidikan kejuruan harus terbuka sehingga dimungkinkan terjadinya interaksi antar disiplin ilmu serta disiplin teknologi (*cross discipline*)
6. Pendidikan kejuruan harus berani mengembangkan teknologi yang sedang dan akan terus berkembang (*forward technology*). (Ki Supriyoko, 2000)

Untuk mengantisipasi perkembangan tuntutan dunia usaha dan industri tersebut, maka perlu sumber daya manusia yang *hi-tech* yang mampu bersaing dalam dunia kerja. Oleh sebab itu penting membekali peserta didik dengan kemampuan kompetensi dalam bidang teknologi informasi dan komputerisasi di era digital milenial seperti sekarang.

6.5. Kriteria Tempat Magang

Beberapa hal yang mesti menjadi perhatian dalam pemagangan:

1. Perusahaan Industri dan/atau perusahaan kawasan industri memfasilitasi pemagangan industri untuk setiap guru bidang study produktif yang mengawal siswa siswanya untuk pemagangan.
2. Pemagangan Industri dilaksanakan sesuai dengan jenjang kualifikasi dan atau kompetensi yang akan dicapai.
3. Penyelenggara pemagangan adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pemagangan.

Penyelenggara pemagangan (perusahaan) harus memiliki beberapa persyaratan/kriteria :

6.5.1. Program Pemagangan

Program pemagangan disusun oleh Penyelenggara Pemagangan. Program Pemagangan meliputi :

1. Nama Program Pemagangan.
2. Tujuan Program Pemagangan.
3. Kompetensi yang harus ditempuh.
4. Perkiraan Waktu Pemagangan.
5. Persyaratan Peserta Pemagangan.
6. Persyaratan Pembimbing Pemagangan.
7. Kurikulum dan Silabus

Program pemagangan harus mengacu pada

1. Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
2. Standart Kompetensi Kerja Khusus.
3. Standart Kompetensi Kerja Nasional

Program Pemagangan meliputi:

1. Pemberian teori dan praktek di Unit Pelatihan yang dilaksanakan paling banyak 25% dari komposisi Program Pemagangan.
2. Praktek kerja di Unit Produksi Perusahaan dilaksanakan paling sedikit 75% dari komposisi Program Pemagangan.

6.5.2. Sarana dan Prasarana Pemagangan

Sarana dan prasarana ideal yang seharusnya dimiliki di tempat pemagangan meliputi :

1. Ruang teori.
2. Ruang Simulasi / praktek.
3. Kelengkapan Alat keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Buku kegiatan (*log book*) bagi peserta pemagangan.

6.5.3. Pembimbing Pemagangan

Pembimbing pemagangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Karyawan tetap.
2. Sehat jasmani dan rohani.
3. Memiliki kompetensi teknis dalam jabatan yang sesuai dengan program pemagangan.
4. Memiliki kompetensi Metodologi pelatihan.
5. Surat Penunjukan Pembimbing dari manajer Personalia atau di atasnya.
6. Memahami regulasi pemagangan

6.6. Praktek Kerja

Praktek kerja menjadi bagian dari kurikulum pendidikan di SMK dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu sesuai dengan kejuruan/konsentrasi yang dipilih peserta didik. Praktek kerja yang diselenggarakan SMK merupakan entitas penting baik bagi peserta didik, sekolah maupun dunia usaha. Bagi peserta didik, praktek kerja dapat menjadi sebuah medium untuk mempraktekan berbagai teori yang telah diperoleh di bangku sekolah, mengenal etos dan iklim kerja dunia usaha, memperoleh pengalaman dan pengetahuan bekerja sesuai dengan bidang kejuruan/konsentrasi. Bagi pihak sekolah, praktek kerja menjadi sebuah medium untuk membina hubungan baik dengan dunia usaha, mengembangkan program, metode pembelajaran, sarana dan prasarana di sekolah sesuai dengan hasil observasi di tempat kerja, dan meningkatkan kualitas lulusan. Selanjutnya, praktek kerja bagi dunia usaha dapat memberikan manfaat di antaranya menjadi medium untuk mengembangkan hubungan baik dengan *stakeholders* yang akan mencetak calon tenaga kerja, memperoleh gambaran kualitas calon tenaga kerja, membantu kegiatan publisitas tempat kerja untuk mengomunikasikan produk/jasa/kebijakan yang dihasilkan. Manfaat-manfaat tersebut dapat dicapai jika pelaksanaan praktek kerja berjalan ideal.

Mencapai pelaksanaan praktek kerja yang ideal bukan suatu hal yang mudah. Apalagi berdasarkan data di lapangan, ditemukan bahwa saat pelaksanaan praktek kerja, keterampilan jurusan/bidang kejuruan peserta didik kurang mendapatkan perhatian. Hal tersebut terindikasi berdasarkan temuan lapangan di mana peserta didik diberikan tugas yang sangat teknis, bersifat administratif (bukan praktek sesuai dengan kejuruan), dan belum maksimal untuk mengenal pekerjaan yang menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) terkini.

Sebagai upaya mencapai pelaksanaan praktek kerja yang ideal, hasil kajian merekomendasikan bahwa terdapat sebuah upaya yang dapat dilakukan pihak sekolah agar praktek kerja sesuai dengan kompetensi dunia usaha serta peserta didik memperoleh manfaat pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan (*link and match*). Upaya tersebut adalah menyusun rancangan pelaksanaan praktek yang dapat menjadi kerangka acuan bagi siswa, sekolah dan

tempat praktek kerja. Rancangan praktek kerja dapat dituangkan dalam sebuah proposal yang disusun oleh pihak sekolah. Proposal tersebut merupakan deskripsi program praktek kerja yang memuat sejumlah kompetensi dasar yang akan dipelajari peserta didik di tempat praktek kerja. Proposal praktek kerja juga dimaksudkan agar dalam pelaksanaan, penempatan peserta didik tepat sasaran.

Sebelum menyusun proposal praktek kerja, pihak sekolah baiknya memetakan dan menetapkan terlebih dahulu guru pembimbing bagi tiap peserta didik/kelompok peserta didik yang akan melaksanakan praktek kerja. Ini menjadi hal penting karena penyusunan proposal praktek kerja selanjutnya menjadi tanggung jawab tiap guru pembimbing. Jika guru pembimbing sudah ditetapkan, maka langkah selanjutnya yang ditempuh oleh guru pembimbing sebagai representasi pihak sekolah dalam menyusun proposal praktek kerja adalah mengumpulkan data dan informasi tentang tempat pelaksanaan praktek kerja yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Data dan informasi tersebut dapat diperoleh guru pembimbing melalui dua cara, yaitu:

6.6.1. Data primer

Data ini diperoleh dengan melakukan survei langsung tempat kerja dan melaksanakan wawancara dengan perwakilan pegawai di tempat praktek kerja yang ditetapkan sebagai penanggung jawab pengelola praktek kerja bagi peserta didik, mewawancarai peserta didik (jenjang kelas di atas atau yang telah lulus sekolah) yang pernah praktek kerja di tempat praktek kerja yang sama. Observasi dan wawancara dilakukan untuk menghimpun data dan informasi tentang proses kerja/ produksi di tempat kerja, tugas, pokok dan fungsi tempat praktek kerja, mengetahui keunikan/ciri khas tempat praktek kerja, mengetahui butir kegiatan kerja yang telah menjadi kebiasaan atau yang telah resmi ditetapkan oleh institusi untuk dikerjakan oleh peserta praktek kerja, dan memetakan/menarik benang merah keselarasan tempat praktek kerja dengan kejuruan dan kompetensi peserta didik.

6.6.2. Data sekunder

Data ini diperoleh dengan menganalisis bahan pustaka baik secara daring (*online*) ataupun luring (*offline*). Analisis bahan pustaka secara daring misalnya dapat dilakukan dengan mengunjungi situs web resmi (*official website*) tempat praktek kerja, akun media sosial resmi (*official account*) tempat praktek kerja, artikel terkait tempat praktek kerja, dan lain-lain. Sedangkan analisis bahan pustaka secara luring dapat dilakukan dengan membaca buku, leaflet, booklet, produk hukum/kebijakan yang dihasilkan tempat praktek kerja (biasanya jika tempat praktek kerja yang berperan sebagai regulator/instansi pemerintah), artikel terkait tempat kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan praktek kerja. Hal tersebut pun dilakukan tak lain untuk menghimpun data dan informasi tentang proses kerja/produksi di tempat kerja, tugas, pokok dan fungsi tempat praktek kerja, mengetahui keunikan/ciri khas tempat praktek kerja, dan memetakan/ menarik benang merah keselarasan tempat praktek kerja dengan kejuruan dan kompetensi peserta didik.

Saat penyusunan proposal praktek kerja, guru pembimbing bagi tiap peserta didik/kelompok peserta didik yang akan melaksanakan praktek kerja berkoordinasi dengan Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum dan Wakil Kepala Sekolah bidang Hubungan Industri. Hal tersebut sebagai bentuk upaya penyelarasan dalam mengolaborasikan kurikulum pembelajaran dengan praktek kerja. Selain itu, tiap sekolah juga harus memiliki standar dan acuan untuk menyusun proposal praktek kerja. Dengan demikian, meskipun disusun oleh guru pembimbing yang berbeda-beda, tetapi gaya narasi dan sistematika yang digunakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sekolah. Selanjutnya, proposal praktek kerja yang telah disusun ditandatangani Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah bidang Hubungan Industri sebagai bentuk pengesahan.

Berikut adalah contoh format penulisan proposal praktek kerja:

JUDUL PROPOSAL

(Judul, logo sekolah, nama sekolah, program keahlian/kejuruan, kota domisili sekolah dan tahun penyusunan)

LEMBAR PENGESAHAN

(Memuat tanda tangan guru pembimbing sebagai penyusun proposal dan tanda tangan Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah bidang Hubungan Industri sebagai bentuk pengesahan dari pihak sekolah).

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Praktek Kerja
- 1.3 Identitas Guru Pembimbing dan Peserta Didik
- 1.4 Periode Pelaksanaan Praktek Kerja

BAB II PROGRAM PRAKTEK KERJA

- 2.1. Kompetensi Dasar Peserta Didik
- 2.2. Topik Pembelajaran/Pekerjaan yang Dipelajari di Tempat Praktek Kerja
- 2.3. Monitoring Pelaksanaan Praktek Kerja
- 2.4. Indikator Penilaian Praktek Kerja
- 2.5. Rencana Evaluasi Praktek Kerja

BAB III PENUTUP

3.1. Simpulan

3.2. Rekomendasi

LAMPIRAN

Selain penyusunan proposal praktek kerja, ada hal yang juga harus diperhatikan oleh tempat praktek kerja/industri agar pelaksanaan program praktek kerja peserta didik dapat berjalan ideal. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 03/M-IND/PER/1/2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang *link and match* dengan Industri, tempat praktek kerja pun harus memperhatikan beberapa hal agar pelaksanaan praktek kerja mencapai kualitas ideal. Tempat praktek kerja sudah semestinya dapat menempatkan siswa di unit kerja/divisi yang sesuai dengan jenjang kualifikasi dan kompetensi yang akan dicapai, menyediakan instruktur sebagai tenaga pembimbing siswa, dan memberikan sertifikat kepada peserta didik yang telah menyelesaikan praktek kerja.

Selain hal-hal di atas, untuk mengikat instruktur/pembimbing peserta didik di tempat kerja agar lebih fokus memberikan bimbingan dan arahan sesuai dengan proposal yang telah disusun, pihak sekolah juga dapat menganggarkan/memberikan insentif bagi para instruktur di tempat kerja. Pemberian insentif tersebut selain dapat lebih mengikat tanggung jawab tempat praktek kerja, juga menjadi bentuk apresiasi bagi pegawai di tempat kerja yang telah membimbing peserta didik di tengah mengerjakan tugas utama/ kewajiban terhadap institusi. Oleh karena tidak dipungkiri bahwa membimbing peserta praktek kerja, menjadi tugas tambahan bagi pegawai di tempat kerja.

6.7. Pemagangan Pra dan Pasca Kelulusan

6.7.1. Pemagangan Pra Kelulusan

Pemagangan merupakan program tahunan bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung, dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai ketrampilan atau keahlian tertentu.

Penyelenggara pemagangan adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pemagangan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha berbadan hukum, milik perorangan, milik persekutuan, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Ada istilah lainnya bahwa perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan usaha usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Unit Pelatihan adalah satuan unit yang menyelenggarakan Pelatihan di Perusahaan baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) adalah Instansi pemerintah yang berbadan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.

Peserta Pemagangan disyaratkan:

1. Usia paling rendah 17 tahun dan harus melampirkan surat persetujuan dari orang tua/wali.
2. Sehat Jasmani dan rohani.
3. Lulus seleksi.

Yang dimaksud peserta pemagangan ini adalah siswa yang masih duduk di kelas 3 pada Sekolah Menengah Kejuruan.

Penyelenggara Pemagangan harus memiliki:

1. Program Pemagangan.
2. Sarana dan Prasarana.
3. Pembimbing Pemagangan.

Penyelenggara Pemagangan menyusun Program Pemagangan:

1. nama Program Pemagangan
2. tujuan Program Pemagangan
3. kompetensi yang akan ditempuh
4. perkiraan waktu Pemagangan
5. persyaratan peserta Pemagangan
6. persyaratan Pembimbing Pemagangan
7. kurikulum dan silabus

Program Pemagangan mengacu pada:

1. Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI)
2. Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK)
3. Standar Kompetensi Kerja Internasional (SKKI)

Program Pemagangan meliputi:

1. Pemberian teori dan praktek di unit pelatihan Dilaksanakan paling banyak 25% dr komposisi program pemagangan.
2. Praktek kerja di Unit produksi Perusahaan Dilaksanakan paling sedikit 75% dari komposisi program Pemagangan.

Jangka waktu pemagangan dibatasi paling lama 3 bulan. Penyelenggaraan Pemagangan dilaksanakan atas dasar Perjanjian Pemagangan secara tertulis antara peserta pemagangan dengan perusahaan.

Perjanjian pemagangan memuat :

1. Hak dan kewajiban peserta pemagangan
2. Hak dan kewajiban penyelenggara pemagangan
3. Program pemagangan
4. Besarnya uang saku.

Perjanjian pemagangan harus diketahui dan disahkan oleh Dinas Tenaga kerja kabupaten/kota setempat. Pengesahan harus selesai dalam 3 hari. Peserta pemagangan berhak memperoleh :

1. fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti pemagangan.
2. uang saku, yang meliputi biaya transport, uang makan, dan insentif peserta pemagangan
3. perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan dan kematian.
4. Sertifikat.

Peserta pemagangan berkewajiban

1. Mentaati perjanjian pemagangan.
2. Mengikuti pemagangan sampai selesai.
3. Mentaati tata tertib yang berlaku di perusahaan yang menyelenggarakan pemagangan.
4. Menjaga nama baik perusahaan penyelenggara pemagangan

Penyelenggara pemagangan berhak :

1. Memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan.
2. Memberitahukan tata tertib dan perjanjian pemagangan.

Penyelenggara Pemagangan berhak :

1. Membimbing peserta pemagangan sesuai dengan program yang ditetapkan.
2. Memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan perjanjian pemagangan.
3. Menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.
4. Memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja dan kematian kepada peserta pemagangan.
5. Memberi uang saku kepada peserta pemagangan.
6. Mengevaluasi peserta pemagangan.
7. Memberikan sertifikat.

Pada proses pemagangan antara SMK dengan Penyelenggara Pemagangan harus Link & Mach. Program keahlian pada SMK disesuaikan dengan kebutuhan industri. Kurikulum pendidikan pada setiap program keahlian di SMK disusun berbasis kompetensi mengacu pada :

1. SKKNI bidang industry.
2. Standart internasional dan atau
3. Standart khusus.

Penyusunan kurikulum dilakukan dengan melibatkan :

1. Assosiasi industry
2. Perusahaan industri dan atau

3. Perusahaan kawasan industri

SMK harus memiliki guru bidang studi produktif sesuai dengan kebutuhan program keahlian. SMK dapat memanfaatkan karyawan purna bhakti dari perusahaan industri dan atau perusahaan kawasan industri yang memiliki kesesuaian kompetensi sebagai guru bidang study produktif di SMK.

Karyawan purna bhakti harus mendapat pelatihan untuk pelatih (*training for trainer*) bidang kompetensi pedagogik. Pelatihan dapat difasilitasi oleh kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah. Peningkatan kompetensi guru bidang studi produktif dapat dilakukan melalui pemagangan industry. Pemagangan industri difasilitasi oleh perusahaan industri dan atau perusahaan kawasan industri.

Untuk menunjang praktikum pembelajaran berbasis kompetensi, SMK dilengkapi dengan :

1. Teaching factory.
2. Work shop dan / atau
3. Laboratorium.

SMK harus dilengkapi dengan infrastruktur kompetensi, yang pembangunannya difasilitasi oleh kementerian industri. Infrastruktur dimaksud berupa :

1. SKKNI.
2. LSP.
3. TUK.
4. Assesor kompetensi.

SMK menyelenggarakan Sertifikasi melalui uji kompetensi terhadap siswanya. Uji kompetensi dilaksanakan oleh LSP di TUK yang dimiliki oleh SMK atau perusahaan industri dan atau perusahaan kawasan industri.

6.7.2. Program Pemagangan Pasca Kelulusan

Program Pemagangan Pasca kelulusan, keterangannya sama, yang membedakan pihak SMK tidak sepenuhnya mengawal dari mulai mendapatkan sampai selesai Program Pemagangan. Bedanya lagi, dari sisi usia juga syaratnya minimal 18 tahun. Pemagangan Pasca kelulusan bisa juga ke luar negeri. Program Pemagangan keluar negeri penyelenggara langsung ditangani oleh Kementerian Tenaga Kerja .

Pemagangan Pasca kelulusan mengenai uang saku juga lebih besar pendapatannya, karena pihak peserta Pemagangan sudah memenuhi syarat untuk bekerja, sehingga uang lemburpun bisa didapatkan. Uang insentif ditentukan antara 75% - 80% dari UMR.

6.8. Sinergi Sekolah, Pemerintah, Dunia Usaha, dan Asosiasi Profesi

6.8.1. Sinergi Dengan Pemerintah

Sekolah menengah kejuruan (SMK) merupakan jenjang pendidikan menengah kejuruan yang mengutamakan pengembangan keterampilan peserta didik untuk melaksanakan jenis pendidikan tertentu. SMK bertujuan untuk mempersiapkan siswa agar memiliki keterampilan dan siap terjun ke dunia kerja. Penyiapan tenaga kerja harus sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Industri (DU/DI) dan ini harus menjadi pusat perhatian pendidikan kejuruan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dirumuskan kebijakan pengintegrasian aspek yang menumbuhkan jiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha dalam metodologi pendidikan. Lulusan Pendidikan Kejuruan diharapkan mempunyai 5 elemen kompetensi yang sesuai kebutuhan Pemangku Kepentingan :

1. Kebutuhan masyarakat (societal needs)
2. Kebutuhan dunia kerja (industrial needs)
3. Kebutuhan profesional (professional needs)
4. Kebutuhan generasi masa depan (vision)

5. Kebutuhan ilmu pengetahuan (scientific)

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu sinergi dengan pemerintah baik ditingkat pemerintah pusat maupun ditingkat pemerintah daerah yaitu perlu dirumuskan kebijakan mengenai :

1. Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis dengan dunia usaha dan dunia industri untuk peningkatan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
2. Optimalisasi pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk peningkatan dan pengembangan bidang pendidikan.
3. Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis dengan organisasi kemasyarakatan.
4. Membangun mekanisme kemitraan antara Direktorat Pembinaan SMK dan SMK dengan pelaku usaha untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan berkualitas.
5. Mendorong pihak swasta untuk membangun lembaga pendidikan dan pelatihan khususnya yang terkait dengan kebutuhan Sumber daya manusia khususnya yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia.
6. Pemanfaatan potensi yang ada di masyarakat, dunia usaha dan dunia industri untuk peningkatan kualitas pendidikan.
7. Optimalisasi utilitas SMK di luar jam belajar mengajar untuk pemberdayaan masyarakat sekitar SMK:
 - a. Pembangunan karakteristik pendidikan kejuruan model pasar (the market model. Model pasar yakni dimana pemerintah tidak terlibat

dalam proses kualifikasi kejuruan, tapi diberikan kepada dunia usaha atau dunia industri.

- b. Koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud melalui Dirjen Pembinaan SMK dan pemerintah Provinsi serta SKPD yang sesuai dengan jurusan yang ada di SMK, dalam penyaluran siswa magang maupun praktek kerja industry (Prakerin).
- c. Pola Koordinasi intensif antara beberapa kementerian terkait.
- d. Singkronisasi Kurikulum.
- e. Penataan bidang/program keahlian sebagai upaya penyesuaian bidang dan program keahlian yang ada di seluruh SMK agar sesuai dengan potensi wilayah atau kebutuhan pasar kerja.
- f. Sistem diklat yang permeable dan fleksibel menempatkan SMK sebagai bagian integral dari sistem diklat di daerah dan kebijakan penataan kurikulum disesuaikan potensi wilayah/daerah.

6.8.2. Sinergi dengan DUDI

Kerjasama antara SMK dan dunia usaha atau dunia industri sangat diperlukan terkait dengan perkembangan teknologi yang terjadi di industri yang sangat pesat sehingga sekolah akan jauh tertinggal jika tidak menjalin kerjasama dengan industry, sebab pihak sekolah tidak mungkin menyediakan semua peralatan yang sesuai dengan kebutuhan industri dalam proses pembelajaran di sekolah. Di samping itu, kerjasama dengan industri juga akan membantu pihak sekolah dalam menyalurkan lulusannya sebab pihak industri telah mengetahui sejauh mana kompetensi yang dimiliki para lulusan dari sekolah yang telah menjalin kerjasama dengan industri yang bersangkutan.

Kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri dapat dikembangkan sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah. Peranan kerjasama dengan dunia industri akan

menjadi penting artinya karena kerjasama tersebut akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sekolah menengah kejuruan (SMK).

Hubungan kerjasama antara sekolah dan dunia kerja dapat meliputi:

1. Output sekolah menengah kejuruan, yakni penempatan/ penyerapan lulusan kedalam lapangan kerja secara semestinya.
2. Proses pelaksanaan proses belajar mengajar dan evaluasi performasi: pada gilirannya dapat mengarah pada sertifikasi keahlian.
3. Input Instrumental, yang meliputi.
 - a. Pemanfaatan sumber-sumber belajar, misalnya sarana peralatan praktek, bengkel/shop, lahan pertanian (field laboratory), dapur produksi, dsb.
 - b. Penyanggangan bersama dana pendidikan
 - c. “Saling-asah” personil (antara guru/sekolah dan teknisi/ industri)
 - d. Keterlibatan dalam semua aspek pelaksanaan Prakerin, seperti perencanaan dan evaluasi Prakerin, hal ini agar pelaksanaan Prakerin SMK berhasil. Dengan turut terlibat dalam perencanaan dan evaluasi Prakerin DUDI dapat menyeleksi lebih awal calon tenaga kerja yang mereka butuhkan dan memberikan masukan secara langsung tentang pelaksanaan Prakerin.
 - e. Pelatihan Bagi Tenaga Pendidik (guru SMK)

4. Input Siswa.

6.8.3 Pemilihan calon siswa

Kesemuanya pada dasarnya adalah upaya untuk pemutakhiran kemahiran (guru maupun siswa), transformasi teknologi, efisiensi pelaksanaan pendidikan, dan peningkatan efektivitas external (relevansi) sekolah menengah kejuruan. Pada perkembangan prosesnya wakil dunia kerja akan menjadi unsur dalam “Badan Penasehat Sekolah” (Advisory Board).

Untuk mencapai hubungan kerjasama yang erat antara sekolah dengan dunia kerja diperlukan waktu dan tenaga khusus yang menangani hal tersebut. Keberhasilan sekolah dalam membina kerjasama yang baik dengan dunia kerja tidak diperoleh dari satu atau dua kali pendekatan saja, melainkan diperlukan pendekatan yang berulang kali.

Kegiatan validasi kurikulum, praktek kerja industri (prakerin) bagi siswa, program Bimbingan Karier, dan Unit Produksi dapat pula merupakan kegiatan yang akan membuka jalan menuju kerjasama yang lebih luas antara sekolah dan dunia kerja. Penempatan siswa SMK “on the job training di dunia usaha/dunia industri”, secara konseptual SMK dan dunia usaha melakukan perencanaan bersama, dalam arti penempatan siswa SMK memenuhi kriteria akademik dan sinkron dengan “job” yang ada pada dunia usaha/dunia industri. Kegiatan ini akhirnya bermuara pada siswa dapat bekerja pada lini produksi (production line) sehingga segala peraturan yang diberlakukan pada dunia usaha/dunia industri terhadap karyawan juga diberlakukan sama kepada siswa yang melakukan praktik kerja industri (prakerin). Kalau konsep kerjasama ini dapat dilaksanakan secara sistematis dan sistemik, akan terjadi kemitraan sinergik antara dunia usaha/dunia industri mendapatkan tenaga kerja murah”, di sisi lain siswa SMK akan mendapatkan pengalaman kerja langsung tidak lagi bersifat simulasi.

Dalam membangun kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri mesti direalisasikan dalam sebuah Memorandum of Understanding (MOU) dan Standart Operating Procedure (SOP). Prosedur kerjasama untuk kegiatan praktek kerja industri (Prakerin) dimulai pada awal tahun dengan tahap perencanaan dan

persiapan, dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan Prakerin, kemudian tahap evaluasi Prakerin.

6.8.4. Sinergi dengan Asosiasi Profesi

1. Asosiasi profesi, sesuai dengan tugas, wewenang, peran dan fungsinya, perlu menata diri yang mengarah pada eksistensinya sebagai Asosiasi Profesi Dosen dan Guru Vokasi, bersama-sama dengan SMK, pemerintah dan dunia usaha/dunia industri bersinergi melakukan peran dan fungsinya sesuai tugas dan Standarisasi Program Pendidikan Calon Guru dan Program Pendidikan Profesi Guru SMK,
2. Uji Kompetensi Guru dan calon Guru SMK
3. Pembinaan Guru Vokasi Profesional SMK
4. Menghasilkan pemikiran, konsep, model, program yang didasarkan pada penelitian di berbagai aspek pendidikan vokasi baik pada program pendidikan profesi guru, pembinaan guru dan proses pendidikan di SMK.
5. Merangsang munculnya keunggulan kompetitif yang dinamis melalui pendidikan dan pelatihan yang memiliki akar yang kuat dan landasan yang benar-benar visioner dan missioner.

Wewenangnya, yaitu, melaksanakan kerjasama kolaborasi yang sinergi ini yakni antara SMK, pemerintah pusat, dimana empat kementerian terkait secara teknis, Kemendikbud; Kemenristekdikti; Kemenperin dan Kemennaker, BNSP dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan satuan kerja perangkat daerah yang terkait), asosiasi profesi dan dunia usaha/dunia industri harus berujung pada dihasilkannya “Lulusan SMK yang Terstandar” sebagai manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan kawasan industri yang berlangsung sangat cepat belum seiring dan diikuti peningkatan kompetensi di lingkup SMK. Banyak keterbatasan yang masih dialami SMK, seperti pengalaman guru, kelengkapan laboratorium, ruang laboratorium masih bersama-sama, kurikulum belum sesuai dengan perkembangan industri, benturan kebijakan daerah dengan pusat, perusahaan audio visual lebih memilih lulusan S1 daripada SMK broadcasting, pemakaian barang negara menjadi temuan BPK.

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan mengenai pengelolaan SMK dan dunia industri dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan kemitraan di SMK dengan DUDI dilakukan untuk mengelola potensi sekolah berupa: Pembentukan/pembagian kelompok kerja yang menanganai pelaksanaan kerjasama dengan DUDI; Sekolah harus proaktif menjalin komunikasi dengan DUDI dalam mempromosikan sekolah; Sekolah mengajukan penawaran proposal ke DUDI terkait dengan kerjasama sekolah yang meliputi sinkronisasi kurikulum, kegiatan praktik kerja industri, penempatan tamatanm, dan OJT guru; Memanfaatkan peran-peran tertentu dari DUDI sebagai guru tamu, melakukan kunjungan ke dunia industri, workshop, dll; Melakukan kerjasama dalam bentuk MoU antara sekolah dengan DUDI.
2. Kerjasama melalui MoU antara SMK dengan DUDI yang isinya sesuai dengan bidang kerjasama yang disepakati,

seperti misalnya sinkronisasi kurikulum, kunjungan industri, dosen tamu, prakerin, uji kompetensi kejuruan (UKK), OJT guru, sertifikasi, bantuan peralatan praktek pendanaan sekolah, beasiswa dari dunia industri serta recruitment/penempatan kerja bagi tamatan.

3. Pengendalian pelaksanaan program kemitraan SMK dengan dunia usaha dan dunia industri dengan mempekerjakan dan melakukan peningkatan pelatihan peserta didik SMK yang dilaksanakan oleh mitra yaitu dunia usaha atau dunia industri yang berada disekitar wilayah sekolah dengan kompetensi keahlian dari masing-masing siswa.

7.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil Temuan di atas maka disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlu Penegasan Kurikulum yang digunakan di SMK, sehingga siswa, orang tua dan guru lebih jelas.
2. Perlu diadakan lokakarya Cara Penilaian bagi para Guru
3. Dinas Pendidikan lebih meningkatkan pengawasan pada Kualitas Pembelajaran SMK khususnya laboratorium, sebagian besar laboratorium SMK yang dikunjungi dalam kondisi tidak layak.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hendaknya menginventarisir semua produk hukum daerah yang terkait dengan Pariwisata, Administrasi Perkantoran, dan Broadcasting, kemudian melaporkan pada Pemerintah Daerah masing-masing dan Kemendikbud-Direktorat SMK terkait produk-produk hukum yang saling bertentangan dan tumpang tindih. Selanjutnya ditemukan solusinya yang dapat menopang kemajuan SMK.

5. Para Guru perlu diikutsertakan pemagangan pada dunia industry dengan dana dari Pemda dan Pusat
6. Perlu Surat Edaran tertulis pada hotel/TV/kalangan industry untuk mempekerjakan lulusan SMK, jangan hanya lulusan S1 saja yang diterima.
7. Perlu ditingkatkan Kerjasama antar kementrian, yaitu Kemendikbud; KemenPerindustrian, dan Kemeninfo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anshori, Nunung Isa. 1992. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Bumi Anka

Cammings, Williams. *Studi Pendidikan dan Tenaga Kerja pada Beberapa Industri Besar di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian BP3K

Enoch, Jusuf. 1992. *Dasar-dasar Perencanaan*. Jakarta: Bumi Aksara

Hasibuan, Sayuti. 1987. *Changing Manpower Requirements in The Face of Non-Oil Growth*

Indar, Djumberansyah. 1995. *Perencanaan Pendidikan Strategi dan Implementasinya*. Surabaya: Karya Aditama

Labor Force Growth and Fast Tehnological Change. Jakarta: Bappenas

Limongan, Andreas. *Masalah Pengangguran di Indonesia*. Diakses Tanggal 07 Januari 2008

Sa'ud, Udin Syaefudin dan Abin Syamsuddin Makmun, 2006. *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Cet II

Sindhunata (ed), 2001. *Pendidikan Kegelisahan Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Kanisius

Sindhunata (ed). 2000. *Menggegas Paradigma Baru Pendidikan: Demokrasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*. Yogyakarta: Kanisius

Soeharto, Bohar. 1991. *Perencanaan Sosial Kasus Pendekatan*. Bandung: Armico

Suryadi, Ace dan H.A.R. Tilaar. 1993. *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar*. Bandung: Rosdakarya

Tilaar, H.A.R. 1999. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Rosdakarya.
Cet IV

Usman, Husaini. 2006. *Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Jakarta:
Bumi Aksara

Internet

<http://elementary-education-schools.blogspot.com/2011/08/all-about-elementary-education-in.html>

<https://pangkalpinangkota.bps.go.id/pressrelease/2018/11/06/227/menurut-persepsi-konsumen--kondisi-ekonomi-kondisi-kepulauan-bangka-belitung-triwulan-iii-2018-menurun.html>

<http://www.pangkalpinangkota.go.id/pariwisata/>